

PEMBANGUNAN DAERAH DALAM ANGKA



Nusa Tenggara 2020



Kementerian PPN/
Bappenas

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

(BAPPENAS)

KATA PENGANTAR

Buku Profil Pembangunan Daerah Dalam Angka (PDDA) 2020 merupakan salah satu materi publikasi yang disusun oleh Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Deputi Bidang Pengembangan Regional. Penyusunan Buku PDDA ini ditujukan untuk memberikan gambaran kondisi dan perkembangan hasil pembangunan antardaerah dalam unit provinsi di wilayah Nusa Tenggara.

Buku PDDA 2020 ini menyajikan data dan informasi kondisi terakhir dan perkembangannya dalam periode 5 tahun terakhir dari Indikator-indikator pembangunan sebagai berikut: (i) 5 (lima) Perkembangan Indikator Utama Pembangunan yang meliputi Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia dan Gini Rasio, (ii) Perkembangan Kependudukan dan Ketenagakerjaan, (iii) Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat (iv) Perkembangan Ekonomi Wilayah, (v) Perkembangan Infrastruktur Wilayah, (v) Pengembangan Wilayah, serta (vi) Informasi mengenai perkembangan penyebaran covid-19 dan dampak terhadap sosial ekonomi masyarakat berdasarkan data dan informasi yang terkumpul hingga awal November 2020.

Uraian dari setiap pembahasan dalam publikasi ini lebih menekankan terhadap metode penyajian informasi yang mudah dipahami, sehingga pembaca akan dimudahkan dalam memahami gambaran capaian dari hasil pembangunan setiap provinsi, keberbandingannya antarprovinsi dalam lingkup wilayah pulau dan nasional, serta keberbandingan antar tahun. Gambaran tersebut tentunya menyesuaikan dengan ketersediaan data dan informasi yang digunakan, yaitu data-data yang bersumber dari Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), dan publikasi dari kementerian dan lembaga terkait.

Kami mengucapkan terimakasih atas segala dukungan berbagai pihak dalam penyusunan publikasi ini. Kami sangat menghargai kritik dan saran dari berbagai pihak guna menyempurnakan publikasi di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2020

Deputi Bidang Pengembangan Regional

TIM PENYUSUN

PENGARAH:

Ir. Rudy Soeprihadi Prawiradinata, MCRP, Ph.D

Deputi Bidang Pengembangan Regional

PENANGGUNG JAWAB:

Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D

Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana

TIM PENYUSUN :

Ika Retna Wulandary, ST, M.Sc; Zulfakar, S.Kom, ME; Fidelia Silvana, SP. M.Int. Econ& F; Supriyadi, S.Si, MT;

Moh. Agung Widodo, SP, MIDEC ; Bimo Fachrizal Arvianto, S.Si, MIT; Nur Fitrianto Adi Suasono, S.Kom; Afini

Mahabas, SKom, MPA; Asep Sukmayadi, ST, MT

TIM AHLI:

Setya Agung Riyadi; Eka Lesniawati;

TIM PENDUKUNG:

Anna Astuti; Eni Arni; Sapto Mulyono; Samsudin

Donny Yanuar; Toni Hernandi, Sri Wulandari;.

Komentar, saran dan kritik dapat disampaikan ke:

Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana

Deputi Bidang Pengembangan Regional

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Jl. TamanSuropati No. 2 JakartaPusat 10310

Telp/Fax. (021) 3193 4195

e-mail : dit.pw@bappenas.go.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	ix
LAMPIRAN	
1. PERKEMBANGAN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	2
1.1. Pertumbuhan Ekonomi	2
1.2. Pengangguran Terbuka	4
1.3. Kemiskinan	7
1.4. Indeks Pembangunan Manusia	8
1.5. Gini Ratio	9
2. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN	12
2.1. Kependudukan	12
2.2. Ketenagakerjaan	13
3. PERKEMBANGAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT	19
3.1. Pendidikan	19
3.2. Kesehatan	23
3.3. Ekonomi Masyarakat	31
4. PERKEMBANGAN EKONOMI WILAYAH	35
4.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	35
4.2. Investasi PMA dan PMDN	40
4.3. Ekspor dan Impor	42
4.4. Perbankan	45
4.5. Pembangunan Sektor Unggulan	47
4.6. Perkembangan Keuangan Daerah	58



5.	PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	65
5.1.	Jalan	65
5.2.	Listrik	66
6.	PENGEMBANGAN WILAYAH	68
6.1.	Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Di Wilayah Nusa Tenggara	68
6.2.	Pembangunan Daerah Tertinggal	73
7.	PERKEMBANGAN PENYEBARAN COVID-19 DAN DAMPAK TERHADAP SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT	77
7.1.	Penyebaran COVID-19	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Pertumbuhan Ekonomi ADHK Tahun 2010 Provinsi Di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2020, (dalam persen)	3
Tabel 2.	Perkembangan jumlah Pengangguran Terbuka dan Tingkat Pengangguran Terbuka Antarprovinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2020	4
Tabel 3.	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Antarprovinsi Menurut Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2020	5
Tabel 4.	Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Wilayah Nusa Tenggara, Tahun 2020	6
Tabel 5.	Perkembangan Pengangguran terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2015 dan tahun 2020	7
Tabel 6.	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Antarprovinsi di Perdesaan dan Perkotaan Periode 2015-2020	8
Tabel 7.	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Menurut Perdesaan dan Perkotaan Antarprovinsi Tahun 2015 dan 2020	8
Tabel 8.	Perkembangan IPM, Ranking dan Reduksi <i>Shortfall</i> Antarprovinsi Tahun 2015-2019	9
Tabel 9.	Perkembangan Gini Ratio Perdesaan dan Perkotaan Antarprovinsi Tahun 2015 - 2020	10
Tabel 10.	Luas Wilayah dan Kependudukan Antarprovinsi Di Wilayah Nusa Tenggara tahun 201	12
Tabel 11.	Perkembangan Kepadatan Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan <i>Dependency Ratio</i> Antarprovinsi Di Wilayah Nusa Tenggara	12
Tabel 12.	Perkembangan Angkatan Kerja Antarprovinsi di Wilayah Nusa Tenggara Periode 2015-2020	13
Tabel 13.	Penduduk Wilayah Nusa Tenggara Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Perdesaan- Perkotaan Tahun 2015 dan 2020	15
Tabel 14.	Penduduk Wilayah Nusa Tenggara Menurut Status Pekerjaan Utama dan Perdesaan- Perkotaan Tahun 2015 dan 2020	17
Tabel 15.	Perkembangan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Antarprovinsi di Wilayah Nusa Tenggara tahun 2015 - 2019	19
Tabel 16.	Perkembangan Angka Partisipasi sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Antarprovinsi Di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2019	20
Tabel 17.	Gambaran Rasio Murid-Guru, Murid-Rombel, Rombel-Kelas Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2019 Di Wilayah Nusa Tenggara	21
Tabel 18.	Kondisi Bangunan Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan TA. 2018/2019 Di Wilayah Nusa Tenggara	21
Tabel 19.	Persentase Siswa Umur 5-24 Tahun yang Menggunakan Komputer dan Internet Selama Tiga Bulan Terakhir Menurut Provinsi	22



Tabel 20.	Perkembangan Persentase Balita Menurut Status Gizi Dengan Indeks BB/U Di Wilayah Nusa Tenggara Periode Tahun 2013 dan 2018	24
Tabel 21.	Perkembangan Persentase Balita Menurut Status Gizi Dengan Indeks BB/U di Wilayah Nusa Tenggara Periode Tahun 2013 – 2018	25
Tabel 22.	Perkembangan Persentase Balita Menurut Status Gizi Dengan Indeks BB/Tinggi Badan (TB) Di Wilayah Nusa Tenggara Periode Tahun 2013 dan 2018	26
Tabel 23.	Perkembangan Jumlah Kasus Tuberkulosis Antarprovinsi di Wilayah Nusa Tenggara Periode 2015-2019	27
Tabel 24.	Perkembangan Angka Notifikasi Semua Kasus Tuberkulosis atau <i>Case Notification Rate</i> (CNR) Antarprovinsi di Wilayah Nusa Tenggara Periode 2015-2019	27
Tabel 25.	Perkembangan Kasus Baru HIV dan AIDS Tahun 2014 – 2018 di Wilayah Nusa Tenggara	28
Tabel 26.	Jumlah Puskesmas dan Rasio dengan Kecamatan Antarprovinsi Tahun 2015 dan 2019	29
Tabel 27.	Jumlah dan Persentase Puskesmas Rawat Inap dan Terakreditasi menurut Provinsi Tahun 2019	30
Tabel 28.	Jumlah Rumah Sakit dan Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk	30
Tabel 29.	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan Disesuaikan Antarprovinsi Tahun 2015-2019	32
Tabel 30.	Persentase Pengeluaran Perkapita/Bulan untuk Makanan dan Bukan Makanan di Perdesaan/ Perkotaan Antarprovinsi Tahun 2015 dan 2019	33
Tabel 31.	Nilai PDRB ADHB dan ADHK Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2020, (Rp. Triliun)	35
Tabel 32.	Peran Ekonomi Wilayah Nusa Tenggara terhadap Perekonomian Nasional ADHB Tahun 2015-2020, (dalam persen)	35
Tabel 33.	Peran Ekonomi Provinsi Terhadap Perekonomian Wilayah Nusa Tenggara ADHB Tahun 2015-2020, (dalam persen)	36
Tabel 34.	Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK (2010) menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2018, (persen)	37
Tabel 35.	Perkembangan PDRB Perkapita ADHB menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2018, (Rp. ribu/jiwa)	37
Tabel 36.	Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran ADHB (Tahun 2010) Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2020 Triwulan I, (dalam persen)	38
Tabel 37.	Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran ADHK (Tahun 2010) Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2020 Triwulan I, (persen)	38
Tabel 38.	Pertumbuhan PDRB Pengeluaran ADHK (Tahun 2010) Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2020 Triwulan I, (rata-rata persen)	39
Tabel 39.	Sumber Pertumbuhan PDRB Pengeluaran ADHK (Tahun 2010) Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2020, (rata-rata persen)	39

Tabel 40.	Share PDRB menurut Pengeluaran ADHB (Tahun 2010) Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2020 Triwulan I, (persen)	39
Tabel 41.	Share PDRB menurut Pengeluaran ADHB Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2020, (rata-rata persen)	40
Tabel 42.	Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Padi tahun 2020 dan Jagung serta Kedelai di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2018	50
Tabel 43.	Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Utama Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015 dan 2019	50
Tabel 44.	Penyebaran Produksi Tanaman Perkebunan Utama menurut Provinsi Di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2019	51
Tabel 45.	Populasi Ternak Besar menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2019. (ekor)	52
Tabel 46.	Perkembangan Populasi Ternak Unggas menurut Provinsi Di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015 dan 2019, (Ribu ekor)	52
Tabel 47.	Perkembangan Perikanan Tangkap Di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2014 dan 2018 Berdasarkan Provinsi (Ton)	53
Tabel 48.	Perkembangan Perikanan Budidaya di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2014 dan 2018 berdasarkan Provinsi (ribu Ton)	53
Tabel 49.	Jumlah Tamu Asing pada Hotel Bintang dan Non Bintang menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara, Tahun 2015-2019, (orang)	54
Tabel 50.	Jumlah Tamu Domestik pada Hotel Bintang dan Non Bintang menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara, Tahun 2015-2019, (orang)	54
Tabel 51.	Jumlah Akomodasi/Hotel Bintang dan Non Bintang menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara, Tahun 2013-2018	55
Tabel 52.	Jumlah kamar Akomodasi/Hotel Bintang dan Non Bintang Menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara, Tahun 2013-2018	55
Tabel 53.	Jumlah Tenaga Kerja Akomodasi/Hotel Bintang dan Non-Bintang menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2014-2018	55
Tabel 54.	Perkembangan Jumlah Pendapatan dan Tenaga Kerja Industri Mikro-Kecil menurut Provinsi Di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015 dan 2019	57
Tabel 55.	Perkembangan PAD dan Rasio Kemandirian Daerah Antarprovinsi Tahun 2015-2019	59
Tabel 56.	Perkembangan Belanja di Seluruh Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2019	60
Tabel 57.	Perkembangan Belanja Pegawai dan Rasio Belanja terhadap Total Belanja Tahun 2015-2019	61
Tabel 58.	Perkembangan Belanja Modal dan Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Tahun 2015-2019	62
Tabel 59.	Peta Kapasitas Fiskal Antarprovinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2019	62
Tabel 60.	Kualitas Jalan menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2018	65
Tabel 61.	Rencana Pengembangan Amenitas KEK Mandalika	69



Tabel 62.	Perkembangan Investasi KEK Mandalika	71
Tabel 63.	Status terakhir KEK Mandalika	72
Tabel 64.	Daerah Tertinggal di Wilayah Nusa Tenggara meliputi 14 Kabupaten	73
Tabel 65.	Karakteristik Daerah Tertinggal Di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2017/2019	74
Tabel 66.	Perkembangan Alokasi Dana Desa untuk Daerah Tertinggal di Wilayah Nusa Tenggara Periode 2015-2019	76
Tabel 67.	Jumlah Terkonfirmasi, Sembuh dan Meninggal Akibat COVID-19 Antarprovinsi di Wilayah Nusa Tenggara	78
Tabel 68.	Perkembangan Pengangguran Terbuka Periode Februari dan Agustus 2020	78
Tabel 69.	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II dan III menurut Lapangan Usaha dan Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2010 Wilayah Nusa Tenggara dan Nasional Tahun 2015-2020, (persen)	2
Gambar 2.	Sumber Utama Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2010 Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2020, (persen)	3
Gambar 3.	Sumber Utama Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2020 Triwulan I, (dalam persen)	4
Gambar 4.	Perkembangan Pengangguran Terbuka dan TPT di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2020	5
Gambar 5.	Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2020	6
Gambar 6.	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Antarprovinsi Tahun 2015 dan 2020 (Ribuan Jiwa)	7
Gambar 7.	Distribusi Jumlah Penduduk Miskin Antarprovinsi Tahun 2020 (Ribuan Jiwa)	7
Gambar 8.	Indeks Pembangunan Manusia Antarprovinsi 2014-2018	8
Gambar 9.	Perkembangan Gini Ratio Perdesaan dan Perkotaan NTB Tahun 2015-2020	9
Gambar 10.	Perkembangan Gini Ratio Perdesaan dan Perkotaan Provinsi NTT Tahun 2015-2020	9
Gambar 11.	Jumlah Penduduk dan <i>Dependency Ration</i> Antarprovinsi di Wilayah Nusa Tenggara	13
Gambar 12.	Perkembangan Angkatan Kerja di Wilayah Nusa Tenggara Menurut Perdesaan dan Perkotaan, Tahun 2015-2020	14
Gambar 13.	Penyebaran Angkatan Kerja Antarprovinsi Menurut Perdesaan dan Perkotaan, Tahun 2020	14
Gambar 14.	Penduduk Wilayah Nusa Tenggara menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2015 dan 2020	14
Gambar 15.	Persentase Lapangan Pekerjaan Utama Penduduk Antarprovinsi Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2020	16
Gambar 16.	Penduduk Wilayah Nusa Tenggara menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2015 dan 2020	16
Gambar 17.	Status Pekerjaan Utama Penduduk Antarprovinsi Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2020	17
Gambar 18.	Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Antarprovinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2019	19
Gambar 19.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Usia Antarprovinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2019	20
Gambar 20.	Persentase Guru/kepala Sekolah Minimal Berijazah D4/S1 Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2018/2019	22



Gambar 21.	Persentase Siswa Usia 5-24 Tahun yang Menggunakan Internet Selama Tiga Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tahun 2019	23
Gambar 22.	Umur Harapan Hidup (UHH) Antarprovinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015 dan 2019	23
Gambar 23.	Persentase Balita Menurut Status Gizi Dengan Indeks Berat Badan (Bb)/ Umur (U) di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2018	24
Gambar 24.	Persentase Balita Usia 0-59 Bulan menurut Status Gizi dengan Indeks Tinggi Badan (TB)/Umur (U) di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2018	25
Gambar 25.	Persentase Balita Usia 0-59 Bulan menurut Status Gizi dengan Indeks Berat Badan (TB)/Tinggi Badan (TB) di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2018	26
Gambar 26.	Perkembangan Jumlah Kasus Tuberkulosis di Wilayah Nusa Tenggara Periode 2015-2019	27
Gambar 27.	Kasus baru HIV dan AIDS Kumulatif Tahun 2015-2019 Antarprovinsi di Wilayah Nusa Tenggara	28
Gambar 28.	Perkembangan Jumlah Puskesmas menurut Provinsi Tahun 2015 dan 2019	29
Gambar 29.	Jumlah Puskesmas Rawat Inap dan Terakreditasi menurut Provinsi Tahun 2019	29
Gambar 30.	Jumlah Rumah Sakit dan Tempat Tidur Rumah Sakit Antarprovinsi Tahun 2019	30
Gambar 31.	Gambaran Tingkat Kecukupan Tenaga Medis di Puskesmas Antarprovinsi Tahun 2019	31
Gambar 32.	Persentase Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Wilayah Nusa Tenggara Menurut Kelompok Barang, Tahun 2015 dan 2019	32
Gambar 33.	Perkembangan Struktur Perekonomian di Wilayah Nusa Tenggara ADHB Tahun 2015 dan 2020 Triwulan 1, (dalam persen)	36
Gambar 34.	Struktur Perekonomian Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara ADHB Tahun 2015-2020, (rata-rata dalam persen)	37
Gambar 35.	Perkembangan Realisasi Investasi PMDN (Rp. Miliar) Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2019	40
Gambar 36.	Distribusi Nilai Realisasi Investasi PMDN (%) menurut Pulau dan Provinsi Tahun 2015-2019	41
Gambar 37.	Perkembangan Realisasi Investasi PMA (juta US\$) Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2019	41
Gambar 38.	Distribusi Nilai Realisasi Investasi PMA (%) menurut Pulau dan Provinsi Tahun 2015-2019	42
Gambar 39.	Perkembangan Perdagangan Migas dan Non Migas Wilayah Wilayah Nusa Tenggara dan Provinsi Tahun 2015-2019. (dalam juta US\$)	42
Gambar 40.	Perdagangan Migas dan Non Migas menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2019. (rata-rata dalam persen)	43
Gambar 41.	Perkembangan Nilai Ekspor Migas dan Non Migas Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2019, (dalam juta US\$)	43

Gambar 42.	Kontribusi Nilai Ekspor Migas dan Non Migas Menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015 - 2019. (rata-rata dalam persen)	44
Gambar 43.	Perkembangan Nilai Impor Migas dan Non-Migas Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2019, (dalam juta US\$)	44
Gambar 44.	Perkembangan Nilai Impor Migas dan Non-Migas Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2019, (dalam Juta US\$)	45
Gambar 45.	Perkembangan Nilai Pinjaman/Kredit dan Simpanan (Rp. Miliar) Masyarakat Rupiah dan Valas Bank Umum dan BPR menurut Tahun 2015 – 2020	45
Gambar 46.	Posisi Pinjaman/Kredit yang Diberikan Rupiah dan Valas Bank Umum dan BPR menurut Provinsi (Rp. Miliar)	46
Gambar 47.	Rasio Pinjaman/Kredit terhadap Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valas Bank Umum dan BPR menurut Provinsi Tahun 2015-2019	46
Gambar 48.	Rasio Kredit Bermasalah terhadap Pinjaman/Kredit menurut Provinsi	47
Gambar 49.	Perkembangan Produksi dan Produktivitas Padi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2016-2020	47
Gambar 50.	Distribusi Produksi Padi menurut Pulau dan Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2020	48
Gambar 51.	Perkembangan Produksi dan Produktivitas Jagung di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2014-2018	48
Gambar 52.	Distribusi Produksi Jagung menurut Pulau dan Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2018	49
Gambar 53.	Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Kedelai di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2014-2018	49
Gambar 54.	Distribusi Produksi Kedelai menurut Pulau dan Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2018	50
Gambar 55.	Perkembangan Populasi Ternak Besar di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015 dan 2019, (dalam ribu ekor)	51
Gambar 56.	Perkembangan Populasi Ternak Unggas Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015 dan 2019, (juta ekor)	52
Gambar 57.	Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya berdasarkan Wilayah di Indonesia, (ton)	53
Gambar 58.	Tingkat Penghunian Kamar pada Hotel Bintang di Provinsi Wilayah Nusa Tenggara, Tahun 2019-2020	56
Gambar 59.	Perkembangan Jumlah Industri Usaha Mikro-Kecil (IMK) Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015 dan 2019, (dalam unit)	56
Gambar 60.	Komposisi Perkembangan Nilai Tambah Industri Menengah Besar di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2017	57
Gambar 61.	Nilai Tambah Industri Menengah Besar di Wilayah Nusa Tenggara berdasarkan Provinsi Tahun 2017	58
Gambar 62.	Jumlah Tenaga Kerja Industri Menengah Besar di Wilayah Nusa Tenggara berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017	58



Gambar 63.	Perkembangan PAD dan Rasio Kemandirian Antarprovinsi Tahun 2015-2019	59
Gambar 64.	Perkembangan Belanja di Seluruh Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2019	60
Gambar 65.	Perkembangan Belanja Pegawai dan Rasio Belanja terhadap Total Belanja Tahun 2015-2019	60
Gambar 66.	Perkembangan Belanja Modal dan Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Tahun 2015-2019	61
Gambar 67.	Peta kapasitas Fiskal Antarprovinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015 dan 2019	63
Gambar 68.	Perkembangan Panjang Jalan menurut Kewenangan di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2018, (dalam Km)	65
Gambar 69.	Perkembangan Energi yang Diproduksi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2014-2018, (dalam GWh)	66
Gambar 70.	Komposisi Produksi Energi Listrik menurut Jenis Pembangkit di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2019, (dalam persen)	66
Gambar 71.	Perkembangan Rasio Elektrifikasi Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2016-2019, (dalam persen)	67
Gambar 72.	Rasio Elektrifikasi menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2019, (dalam persen)	67
Gambar 73.	Kawasan Ekonomi Khusus di Wilayah Nusa Tenggara	68
Gambar 74.	Masterplan KEK Mandalika	69
Gambar 75.	Gambar Rencana Pengembangan KEK Mandalika	70
Gambar 76.	Alokasi Dana Desa untuk Daerah Tertinggal di Wilayah Nusa Tenggara Periode 2015-2020	75
Gambar 77.	Alokasi Dana Desa Setiap Kabupaten Daerah Tertinggal di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2020	75
Gambar 78.	Jumlah Terkonfirmasi, Sembuh dan Meninggal Akibat COVID-19 Antarprovinsi di Wilayah Nusa Tenggara	77
Gambar 79.	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II dan III Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2019 dan 2020	79
Gambar 80.	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II dan III menurut Lapangan Usaha di Wilayah Nusa Tenggara	80
Gambar 81.	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II dan III menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara	81
Gambar 82.	Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN pada Triwulan I dan II menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara	82



PERKEMBANGAN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN WILAYAH NUSA TENGGARA

- ❖ Pada tahun 2019 ekonomi wilayah Nusa Tenggara tumbuh sebesar 4,51 persen, namun adanya pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 berdampak terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II hingga di angka -1,64 persen.
- ❖ Sektor yang memiliki andil terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Nusa Tenggara hingga triwulan 1 adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 1,59 persen, sektor administrasi pemerintahan sebesar 0,45 persen, dan sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 0,42 persen
- ❖ Pengangguran Terbuka pada Februari 2020 di wilayah Nusa Tenggara, di Provinsi NTB sebanyak 78.217 orang (TPT 3,14%) lebih tinggi dibanding di Provinsi NTT sebanyak 73.703 orang (2,80%)..
- ❖ Pengangguran terbuka di Provinsi NTB sebagian besar berpendidikan terakhir SMU (35,10%) dan Universitas (19,43%), sedangkan di Provinsi NTT berpendidikan SMU (33,61%) dan Universitas (22,97%).
- ❖ Tingkat kemiskinan pada semester I (Maret) tahun 2020, di Provinsi NTT sebesar 20,9 persen dan Provinsi NTB sebesar 13,97 persen, dan masih berada di atas tingkat kemiskinan nasional (9,78%).
- ❖ IPM Provinsi NTB tahun 2019 sebesar (68,14) menduduki ranking ke-29 ditingkat nasional, dan Provinsi NTT (65,23) dan menduduki ranking ke-32.
- ❖ Nilai koefisien Gini Ratio di Provinsi NTT dan NTB pada tahun 2020 sudah berada di bawah gini rasio nasional (0,381), yaitu Provinsi NTB sebesar 0,376, dan Provinsi NTT sebesar 0,354.



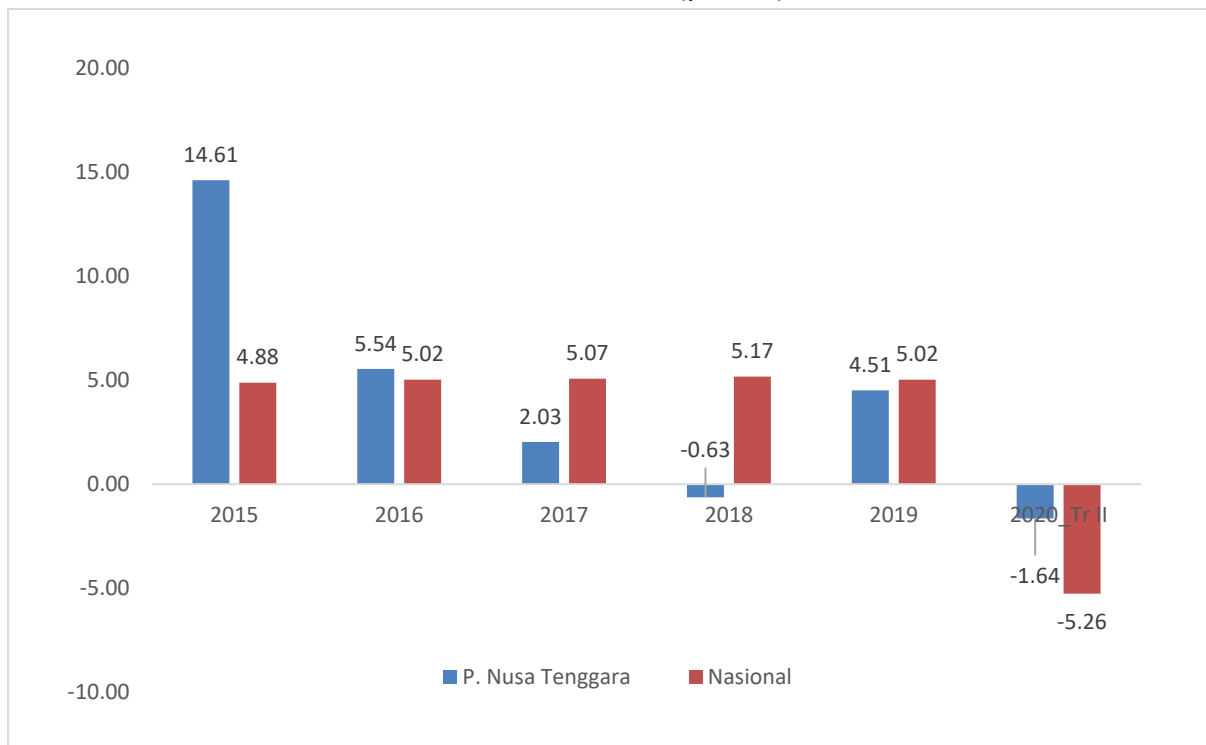
01 Perkembangan Indikator Utama Pembangunan



1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi wilayah Nusa Tenggara periode 2015-2019 menunjukkan perlambatan, bahkan tahun 2018 pertumbuhan terkontraksi di angka -0,63 persen, dan rata-rata tumbuh lebih rendah dari angka pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2019 ekonomi wilayah Nusa Tenggara tumbuh sebesar 4,51 meningkat cukup tajam dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 bersamaan dengan adanya pandemi Covid-19 berdampak cukup signifikan terhadap kinerja ekonomi wilayah Nusa Tenggara, dengan pertumbuhan di tahun 2020 Triwulan II terkontraksi pada angka -1,64 persen (**Gambar 1**). Sementara sektor yang memiliki andil terbesar dalam pertumbuhan ekonomi wilayah Nusa Tenggara hingga Triwulan 1, diantaranya adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 1,59 persen, sektor administrasi pemerintahan sebesar 0,45 persen, dan sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 0,42 persen (**Gambar 2**).

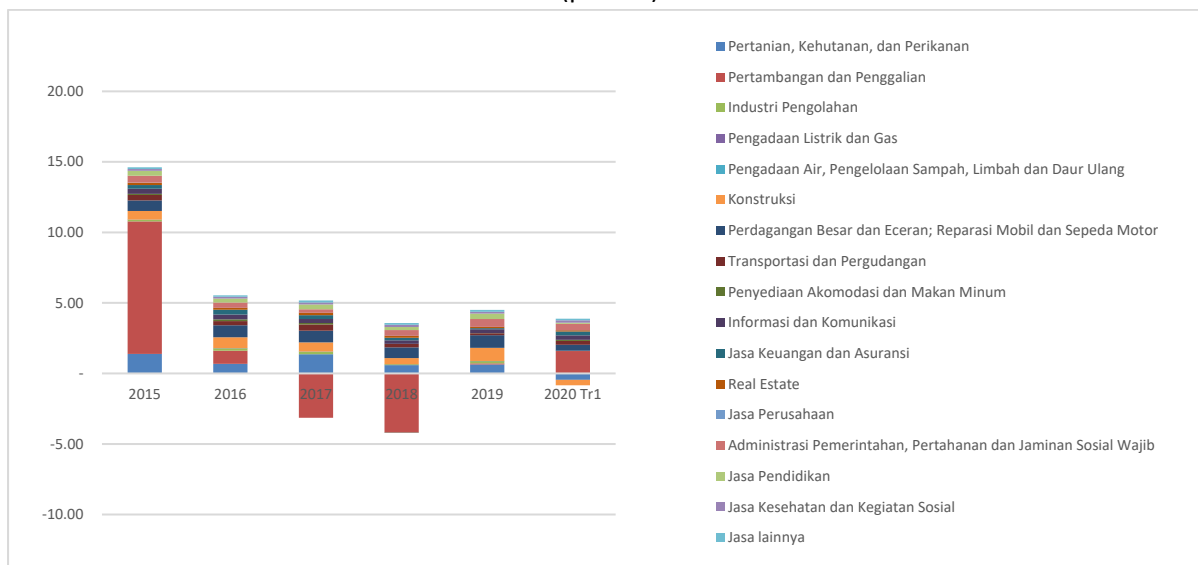
Gambar 1:
Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2010 di Wilayah Nusa Tenggara dan Nasional Tahun 2015-2020, (persen)



Sumber: PDRB Lapangan Usaha Provinsi 2015-2020, BPS

Gambar 2:

Sumber Utama Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2010 di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2020, (persen)



Sumber: PDRB Lapangan Usaha Provinsi 2015-2020, BPS

Pertumbuhan ekonomi antarprovinsi di wilayah Nusa Tenggara, rata-rata tumbuh positif selama periode 2015-2019, kecuali pertumbuhan di Provinsi NTB tahun 2018 terkontraksi di angka -4,46 persen. Perkembangan ekonomi selama periode 2015-2020 Triwulan I, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif, sementara untuk Provinsi NTT cenderung meningkat. Sementara perkembangan ekonomi provinsi pada 2020 Triwulan II, dampak pandemi Covid-19 berpengaruh cukup signifikan terhadap menurunnya kinerja ekonomi wilayah, seluruh provinsi pada tahun 2020 Triwulan II terkontraksi dengan angka pertumbuhan negatif (Tabel 1). Sektor-sektor yang memberikan andil terbesar dalam pertumbuhan ekonomi provinsi, Provinsi NTB meliputi sektor pertambangan dan penggalian dengan andil rata-rata sebesar 1,43 persen, sektor perdagangan besar dan eceran rata-rata 0,77 persen, dan sektor pertanian rata-rata sebesar 0,54 persen. Sementara di Provinsi NTT andil terbesar dari sektor pertanian rata-rata 0,92 persen, sektor administrasi pemerintahan sebesar 0,77 persen, dan sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 0,72 persen (**Gambar 3**).

Tabel 1:

Pertumbuhan Ekonomi ADHK Tahun 2010 Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2020, (dalam persen)

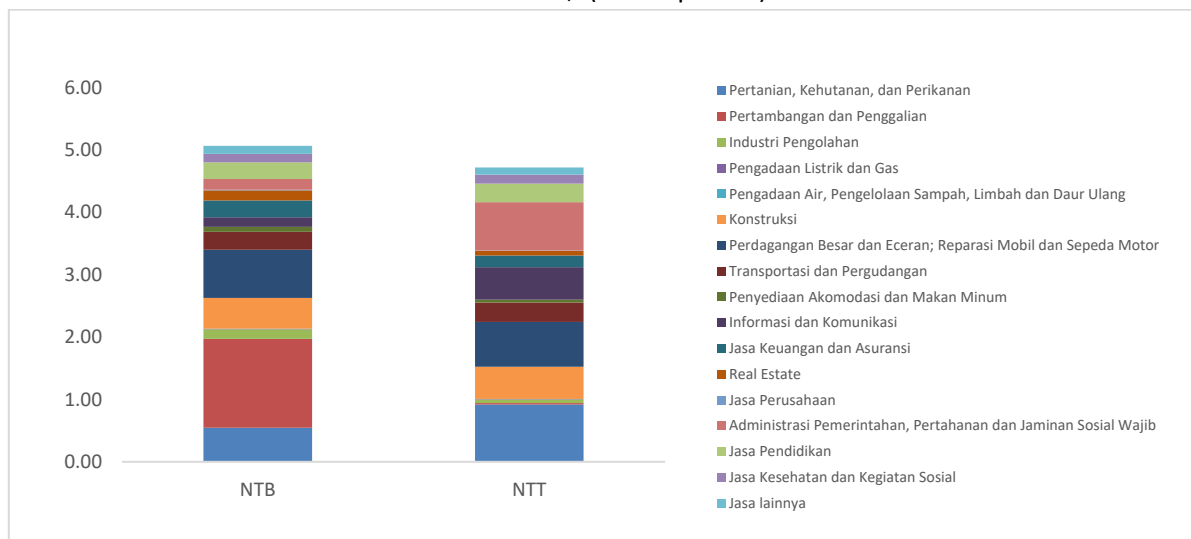
Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020_Tr II
Nusa Tenggara Barat	21,76	5,81	0,09	-4,46	4,01	-1,41
Nusa Tenggara Timur	4,92	5,12	5,11	5,13	5,20	-1,96
NUSA TENGGARA	14,61	5,54	2,03	-0,63	4,51	-1,64

Sumber: PDRB Lapangan Usaha Provinsi 2015-2020, BPS



Gambar 3:

Sumber Utama Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2020
Triwulan I, (dalam persen)



Sumber: PDRB Lapangan Usaha Provinsi 2015-2020, BPS

1.2. Pengangguran Terbuka

Pengangguran Terbuka di wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2020 sebanyak 151.920 orang atau dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2,96 persen, lebih rendah dibanding TPT Nasional (5,34%). Perkembangan pengangguran terbuka tersebut menunjukkan tren menurun sebanyak 43.316 orang atau 1,09 persen selama pada periode 2015-2020.

Pengangguran terbuka antarprovinsi di wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2020, di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebanyak 78.217 orang (TPT 3,14%) lebih tinggi dibanding di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 73.703 orang (2,80%). Perkembangan jumlah pengangguran terbuka dalam periode 2015-2020 di Provinsi NTT dan NTB menunjukkan tren menurun, dengan penurunan terbanyak terjadi di Provinsi NTB sebanyak 41.909 orang atau dengan penurunan TPT sebesar 1,84 persen.

Tabel 2 :

Perkembangan Jumlah Pengangguran Terbuka dan Tingkat Pengangguran Terbuka Antarprovinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2020.

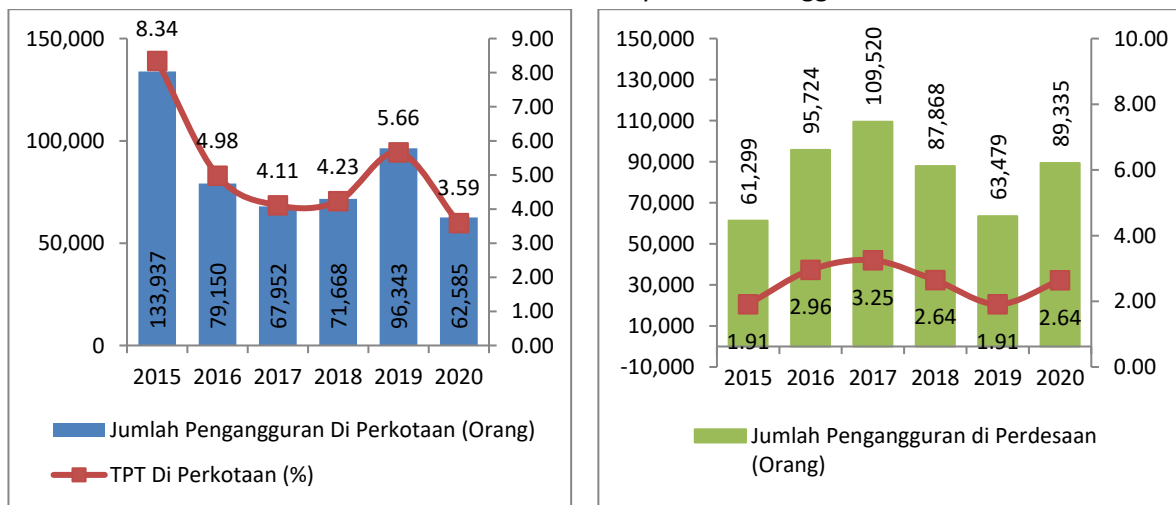
Wilayah	Tahun						Δ ('15-'20)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah Pengangguran Terbuka (ribu orang)							
Nusa Tenggara Barat	120.126	87.175	97.224	83.210	81.293	78.217	-41.909
Nusa Tenggara Timur	75.110	87.699	80.248	76.326	78.529	73.703	-1.407
NUSA TENGGARA	195.236	174.874	177.472	159.536	159.822	151.920	-43.316
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)							
Nusa Tenggara Barat	4,98	3,66	3,86	3,38	3,27	3,14	-1,84
Nusa Tenggara Timur	3,12	3,59	3,21	2,98	3,10	2,80	-0,32
NUSA TENGGARA	4,05	3,62	3,53	3,18	3,18	2,96	-1,09

Sumber : Sakernas Februari 2015-2020, BPS

Pengangguran Terbuka menurut Perdesaan-Perkotaan. Jumlah pengangguran terbuka dan TPT di wilayah Nusa Tenggara pada periode 2015-2020 menunjukkan pola yang berlawanan antara di perkotaan dan perdesaan. Pada tahun 2015-2017, pengangguran terbuka di perkotaan menunjukkan tren menurun (TPT 8,34% menjadi 4,11%), sedangkan di perdesaan menunjukkan tren meningkat (TPT 1,91% menjadi 3,25%). Sementara itu pada periode 2017-2019, TPT di perkotaan menunjukkan tren meningkat (4,11% menjadi 5,66%), dan di perdesaan menunjukkan tren menurun (3,25% menjadi 1,91%). Kemudian pada awal tahun 2020, TPT di perkotaan menunjukkan penurunan (3,59%), sementara di perdesaan menunjukkan tren meningkat (2,64%).

Gambar 4:

Perkembangan Jumlah Pengangguran Terbuka (orang) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Periode 2015-2020 di Wilayah Nusa Tenggara



Sumber : Sakernas Februari 2015-2020, BPS

Selama periode 2015-2020, tingkat pengangguran terbuka di perkotaan Provinsi NTB menunjukkan penurunan sebesar 5,45 persen, sedangkan di perdesaan menunjukkan peningkatan sebesar 1,14 persen. Di perkotaan Provinsi NTT menunjukkan penurunan TPT sebesar 3,35 persen, sementara di perdesaan meningkat sebesar 0,49 persen.

Tabel 3 :

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Antarprovinsi menurut Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2020

Provinsi	TPT Perkotaan (%)							TPT Perdesaan (%)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Δ ('15-'20)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Δ ('15-'20)
Nusa Tenggara Barat	8,41	3,62	3,88	3,64	4,47	2,96	-5,45	2,16	3,69	3,84	3,17	2,22	3,30	1,14
Nusa Tenggara Timur	8,20	7,83	4,61	5,42	8,17	4,85	-3,35	1,73	2,46	2,83	2,30	1,70	2,22	0,49
NUSA TENGGARA	8,34	4,98	4,11	4,23	5,66	3,59	-4,76	1,91	2,96	3,25	2,64	1,91	2,64	0,73

Sumber : Sakernas Februari 2015-2020, BPS

Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan. Pengangguran terbuka di wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2020 sebagian besar berpendidikan terakhir SMU (34,38%), dan berpendidikan tertinggi Universitas sebesar 21,15 persen. Pengangguran terbuka dengan pendidikan terakhir SMU dan SMK sebagian besar berada di Provinsi NTB yaitu masing-masing sebesar (35,10%) dan (14,83%), sedangkan pengangguran terbuka berpendidikan lebih tinggi, yaitu Diploma dan Universitas sebagian besar berada di Provinsi NTT, masing-masing sebesar (13,51%) dan (22,97%).



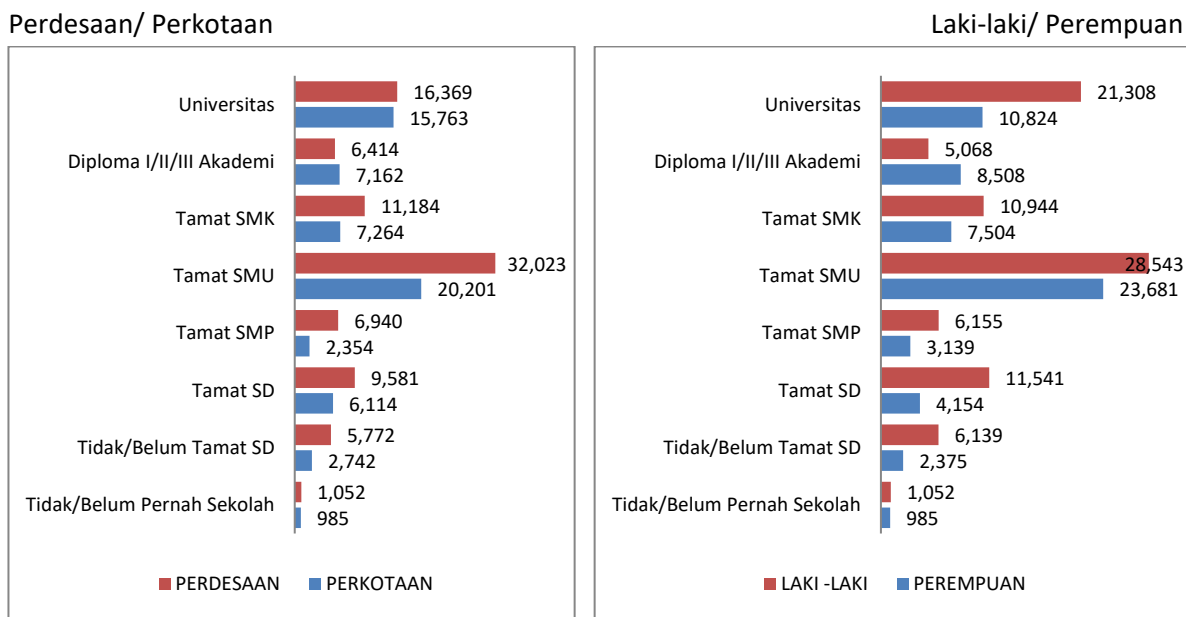
Tabel 4 :
Pengangguran Terbuka menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Wilayah Nusa Tenggara, Tahun 2020

Provinsi	Jumlah Pengangguran Terbuka (orang)	Persentase Pengangguran terbuka menurut Pendidikan							
		Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tidak/ Belum Tamat SD	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SMU	Tamat SMK	Diploma I/II/III Akademi	Universitas
Nusa Tenggara Barat	78.217	1,26	5,36	14,24	5,15	35,10	14,83	4,62	19,43
Nusa Tenggara Timur	73.703	1,43	5,87	6,18	7,14	33,61	9,29	13,51	22,97
NUSA TENGGARA	151.920	1,34	5,60	10,33	6,12	34,38	12,14	8,94	21,15

Sumber : Sakernas Februari 2015-2020, BPS

Berdasarkan keberadaan pengangguran terbuka di perdesaan dan perkotaan, menunjukkan dominasi pengangguran terbuka di setiap tingkat pendidikan berada di perdesaan. Sementara itu, pengangguran terbuka berdasarkan laki-laki dan perempuan, sebagian besar adalah kaum laki-laki, kecuali untuk pendidikan terakhir Diploma sebagian besar dari kaum perempuan.

Gambar 5:
Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2020



Sumber : Sakernas Februari 2020, BPS

Perkembangan pengangguran terbuka menurut pendidikan yang ditamatkan di wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2015 dan tahun 2020 menunjukkan penurunan jumlah dan persentase dari setiap tingkat pendidikan, kecuali untuk tingkat pengangguran terbuka untuk berpendidikan SMU meningkat sebanyak 6.008 orang (10,70%), Diploma sebanyak 1.209 orang (2,60%), dan Sarjana sebanyak 7.156 orang (8,36%).

Tabel 5 :

Perkembangan Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Wilayah Nusa Tenggara tahun 2015 dan tahun 2020

NUSA TENGGARA	Tahun	Pengang- guran Terbuka (orang)	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tidak/ Belum Tamat SD	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				Diploma I/II/III Akademi Diploma I/II/III	Univer sitas
					Sekolah Dasar	Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Atas			
							Umum	Kejuruan		
Jumlah (Orang)	2015	195.236	3.834	18.634	29.009	34.268	46.216	25.932	12.367	24.976
	2020	151.920	2.037	8.514	15.695	9.294	52.224	18.448	13.576	32.132
	Δ ('15-'20)	-43.316	-1.797	-10.120	-13.314	-24.974	6.008	-7.484	1.209	7.156
(%)	2015	100,00	1,96	9,54	14,86	17,55	23,67	13,28	6,33	12,79
	2020	100,00	1,34	5,60	10,33	6,12	34,38	12,14	8,94	21,15
	Δ ('15-'20)	0,00	-0,62	-3,94	-4,53	-11,43	10,70	-1,14	2,60	8,36

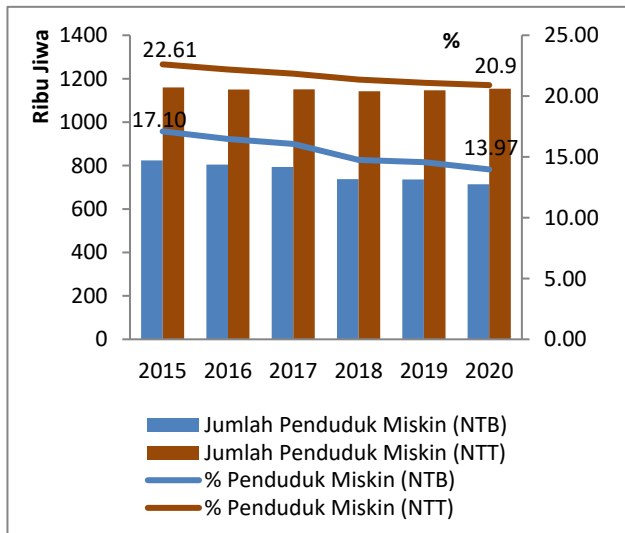
Sumber : Sakernas Februari, BPS

1.3. Kemiskinan

Kemiskinan. Jumlah penduduk miskin Indonesia semester 1 (Maret) tahun 2020 sebanyak 26,42 juta jiwa (9,78%), berkurang sebanyak 2,17 juta jiwa (1,44%) jika dibandingkan dengan penduduk miskin tahun 2015 sebanyak 28,59 Juta jiwa (11,22%). Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di wilayah Nusa Tenggara mencapai 1,87 juta jiwa atau 7,07 persen dari total penduduk miskin di Indonesia.

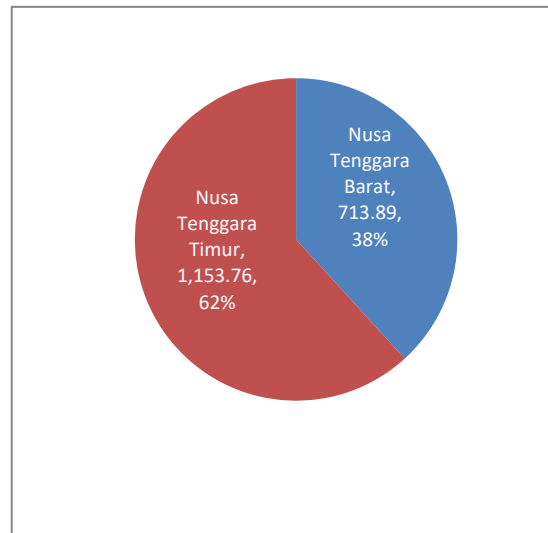
Gambar 6:

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Antarprovinsi Tahun 2015 dan 2020



Gambar 7:

Distribusi Jumlah Penduduk Miskin Antarprovinsi Tahun 2020



Sumber: Data Kemiskinan Semester 1 (maret), Publikasi BPS Tahun 2020

Berdasarkan penyebaran jumlah penduduk miskin tahun 2020 antarprovinsi sebagian besar berada di Provinsi NTT sebanyak 1,15 juta jiwa atau 61,78 persen dari total penduduk miskin wilayah Nusa Tenggara. Penyebaran penduduk miskin di provinsi NTT sebanyak 90,17 persen diantaranya berada di perdesaan, sedangkan di Provinsi NTB sebanyak 713,89 ribu jiwa, dan 51,61 persen diantaranya berada di perkotaan.



Tabel 6 :

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Antarprovinsi di Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 dan 2020

PROVINSI	Jumlah (ribu jiwa)			Perkotaan (%)			Perdesaan (%)		
	2015	2020	Δ ('15-'20)	2015	2020	Δ ('15-'20)	2015	2020	Δ ('15-'20)
Nusa Tenggara Barat	823,89	713,89	-110	47,56	51,61	4,04	52,44	48,39	-4,05
Nusa Tenggara Timur	1.159,84	1.153,76	-6,08	10,02	9,83	-0,19	89,98	90,17	0,19
NUSA TENGGARA	1.983,73	1.867,65	-116,08	25,61	25,80	0,19	74,39	74,20	-0,19

Sumber: Data Kemiskinan Semester 1 (maret), Publikasi BPS Tahun 2020

Berdasarkan persentase penduduk miskin antarprovinsi pada tahun 2020, tingkat kemiskinan di Provinsi NTT (20,9%) dan NTB (13,97%) masih berada di atas tingkat kemiskinan nasional (9,78%). Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Provinsi NTT sebagian besar dikontribusi tingkat kemiskinan di perdesaan yang mencapai 24,73 persen, dan di perkotaan sebesar 8,64 pesen. Tingkat di perkotaan Provinsi NTB (14,90%), lebih tinggi dibanding dengan tingkat kemiskinan di perdesaan (13,09%).

Tabel 7 :

Perkembangan Persentase Penduduk Miskin menurut Perdesaan dan Perkotaan Antarprovinsi Tahun 2015 dan 2020

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Jumlah		
	2015	2020	Δ ('15-'20)	2015	2020	Δ ('15-'20)	2015	2020	Δ ('15-'20)
Nusa Tenggara Barat	19,24	14,9	-4,34	15,53	13,09	-2,44	17,10	13,97	-3,13
Nusa Tenggara Timur	11,28	8,64	-2,64	25,46	24,73	-0,73	22,61	20,9	-1,71
INDONESIA	8,29	7,38	-0,91	14,21	12,82	-1,39	11,22	9,78	-1,44

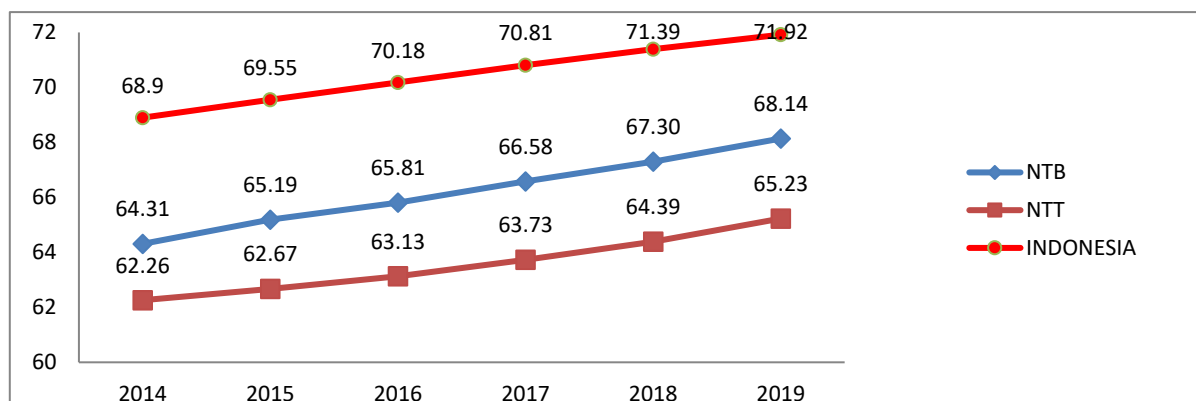
Sumber: Data Kemiskinan Semester 1 (maret), Publikasi BPS Tahun 2020

1.4. Indeks Pembangunan Manusia

IPM seluruh provinsi di wilayah Nusa Tenggara selama periode 2015 – 2019 menunjukkan peningkatan, namun masih berada di bawah IPM Nasional (71,92). IPM Provinsi NTB tahun 2019 sebesar (68,14) menduduki ranking ke-29 di tingkat nasional, dan Provinsi NTT (65,23) dan menduduki ranking 32 secara nasional.

Gambar 8:

Indeks Pembangunan Manusia Antarprovinsi Periode 2014-2018



Sumber: Publikasi BPS, 2020

Berdasarkan perkembangan IPM antara tahun 2015 dan 2019, seluruh provinsi menunjukkan peningkatan IPM, dengan peningkatan tertinggi di Provinsi NTB yang meningkat sebanyak 2,95 poin, dan di Provinsi NTT meningkat sebesar 2,56 poin. Untuk menunjukkan kecepatan perkembangan IPM selama periode 2015-2019 dapat diindikasikan melalui reduksi *shortfall* per tahun (*annual reduction in shortfall*) yaitu perhitungan secara sederhana untuk menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang harus ditempuh untuk mencapai IPM ideal (IPM =100). Berdasarkan hasil perhitungan, nilai reduksi *shortfall* per tahun di Provinsi NTB sebesar 1,71 termasuk kategori cepat, sementara di Provinsi NTT dengan nilai reduksi *shortfall* per tahun sebesar 1,62, termasuk kategori menengah (1,5-1,7).

Tabel 8 :

Perkembangan IPM, Ranking dan Reduksi *Shortfall* Antarprovinsi Tahun 2015-2019

Provinsi	2015		2016		2017		2018		2019		Δ ('15-'20)	Reduksi <i>Shortfall</i> Per tahun
	IPM	Ranking Nasional	IPM	Ranking Nasional	IPM	Ranking Nasional	IPM	Ranking Nasional	IPM	Ranking Nasional		
Nusa Tenggara Barat	65,19	30	65,81	30	66,58	29	67,30	29	68,14	29	2,95	1,71
Nusa Tenggara Timur	62,67	32	63,13	32	63,73	32	64,39	32	65,23	32	2,56	1,62
INDONESIA	69,55		70,18		70,81		71,39		71,92		2,37	1,67

Sumber data, BPS

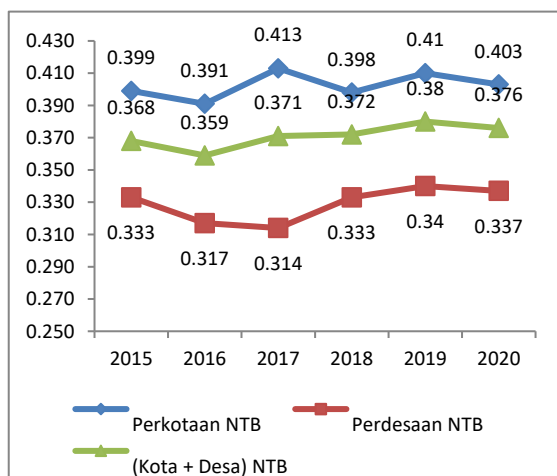
Keterangan: Kategori reduksi *shortfall* pertahun : (a) Sangat lambat jika : < 1,3; (b) Lambat jika : 1,3 – 1,5; (c). Menengah : 1,5 – 1,7; dan (d) Cepat jika : > 1,7.

1.5. Gini Ratio

Gini Ratio atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1, di mana Gino Ratio bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama, dan sebaliknya Gini Ratio bernilai 1 menunjukkan tidak merata sempurna.

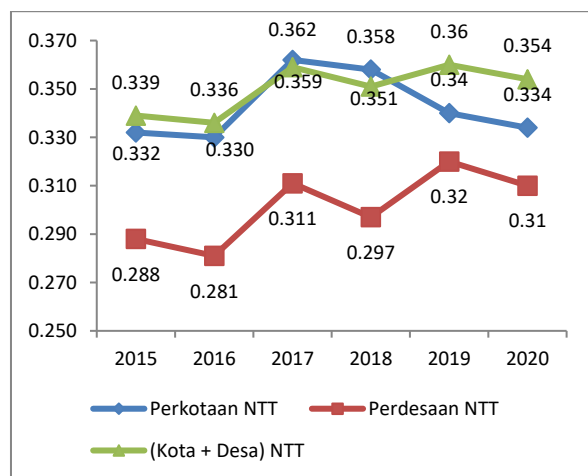
Gambar 9 :

Perkembangan Gini Ratio Perdesaan dan Perkotaan Provinsi NTB Tahun 2015 - 2020



Gambar 10 :

Perkembangan Gini Ratio Perdesaan dan Perkotaan Provinsi NTT Tahun 2015 - 2020



Sumber: Data Gini Ratio Semester 1 (maret), Publikasi BPS Tahun 2020



Berdasarkan data BPS, perkembangan nilai koefisien Gini Ratio secara nasional pada periode 2015-2020 menunjukkan penurunan, yaitu sebesar 0,408 pada tahun 2015 berkurang sebesar 0,027 menjadi 0,381 pada tahun 2020. Perkembangan nilai koefisien Gini Ratio di Provinsi NTB dan NTT pada periode 2015-2020, menunjukkan tren fluktuatif dan menunjukkan peningkatan dengan nilai koefisien Gini Ratio pada tahun 2020, tertinggi di Provinsi NTB sebesar 0,376, dan di Provinsi NTT sebesar 0,354. Peningkatan ketimpangan tersebut, dikontribusi dari peningkatan nilai koefisien Gini Ratio di perdesaan maupun di perkotaan, dengan peningkatan nilai koefisien Gini Ratio tertinggi di Provinsi NTT sebesar 0,015.

Tabel 9 :

Perkembangan Gini Ratio Perdesaan dan Perkotaan Antarprovinsi Tahun 2015 dan 2020

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	2015	2020	Δ ('15-20)	2015	2020	Δ ('15-20)	2015	2020	Δ ('15-20)
Nusa Tenggara Barat	0,399	0,403	0,004	0,333	0,337	0,004	0,368	0,376	0,008
Nusa Tenggara Timur	0,332	0,334	0,002	0,288	0,31	0,022	0,339	0,354	0,015
NASIONAL	0,428	0,393	-0,035	0,334	0,317	-0,017	0,408	0,381	-0,027

Sumber: Data Gini Ratio Semester 1 (maret), Publikasi BPS Tahun 2020



PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN

- ❖ Wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2019 berpenduduk sebanyak 10,53 juta jiwa atau 3,93 persen dari penduduk Indonesia. Jumlah penduduk tertinggi berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 5,46 juta jiwa atau 51,83 persen dari penduduk di wilayah Nusa Tenggara.
- ❖ Tingkat kepadatan penduduk antarprovinsi tahun 2019 di wilayah Nusa Tenggara mencapai 156,44 jiwa/Km², dengan kepadatan tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 273,01 Jiwa/Km², dan di Provinsi NTT sebesar 112,00 Jiwa/Km².
- ❖ Laju pertumbuhan penduduk pada periode 2010-2019 laju pertumbuhan di Provinsi NTT (1,66%) lebih tinggi dibanding NTB (1,29%).
- ❖ Angka beban tanggungan (*dependency ratio*) pada tahun 2020, di Provinsi NTT sebesar 63,4 persen, lebih tinggi dibanding dengan NTB sebesar 52,2 persen.
- ❖ Angkatan kerja di Provinsi NTT dan NTB pada tahun 2020, sebagian besar berada di perdesaan, terutama di Provinsi NTT yang mencapai 77,99 persen.
- ❖ penduduk wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2020 sebagian besar bergerak pada jenis pekerjaan: (i) pertanian, kehutanan dan perikanan (46,43%), dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (14,63%).
- ❖ Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2020 sebagian besar Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar (27,20%), buruh/karyawan/pegawai (26,43%), dan pekerja keluarga/ tak dibayar (22,06%).
- ❖ Status pekerjaan utama sebagai buruh/karyawan/pegawai, tertinggi di provinsi NTB (31,90%), pekerja berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, dan pekerja keluarga/tak dibayar tertinggi di Provinsi NTT masing-masing sebesar 31,13 persen dan 27,20 persen.



02 Perkembangan Kependudukan Dan Ketenagakerjaan



2.1. Kependudukan

Wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2019 berpenduduk sebanyak 10,53 juta jiwa atau 3,93 persen dari penduduk Indonesia. Jumlah penduduk tertinggi berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 5,46 juta jiwa atau 51,83 persen dari penduduk di wilayah Nusa Tenggara. Berdasarkan Rasio jenis kelamin laki-laki dan perempuan menunjukkan rasio laki-laki lebih rendah dibanding perempuan.

Tabel 10 :

Luas Wilayah dan Kependudukan Antarprovinsi di Wilayah Nusa Tenggara tahun 2019

Provinsi	Luas Wilayah Daratan		Penduduk		Rasio Jenis Kelamin	Laju Pertumbuhan Penduduk (2010-2019) (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km ²)
	(km ²)	%	(ribu jiwa)	%			
Nusa Tenggara Barat	18.572,3	27,60	5.070,4	48,167	94,40	1,29	273,01
Nusa Tenggara Timur	48.718,1	72,40	5.456,2	51,833	98,10	1,66	112,00
NUSA TENGGARA	67.290,4	100,00	10.526,6	100	96,25	1,48	156,44

Sumber: Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035 (Pertengahan tahun/Juni)

Tingkat kepadatan penduduk antarprovinsi di wilayah Nusa Tenggara mencapai 156,44 jiwa/km², dengan kepadatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 273,01 jiwa/km² lebih besar dibanding kepadatan di Provinsi NTT sebesar 112,00 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk pada periode 2010-2019 di wilayah Nusa Tenggara mencapai 1,48 persen, dengan laju pertumbuhan di Provinsi NTT (1,66%) lebih tinggi dibanding NTB (1,29%).

Kepadatan penduduk wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2015 sebesar 147,76 jiwa/km² meningkat sebesar 8,67 jiwa/km² menjadi 156,44 jiwa/km² pada tahun 2019. Pada periode 2015-2019, peningkatan kepadatan penduduk di Provinsi NTB sebesar 12,94 jiwa/km², sedangkan di NTT sebesar 7,05 jiwa/km².

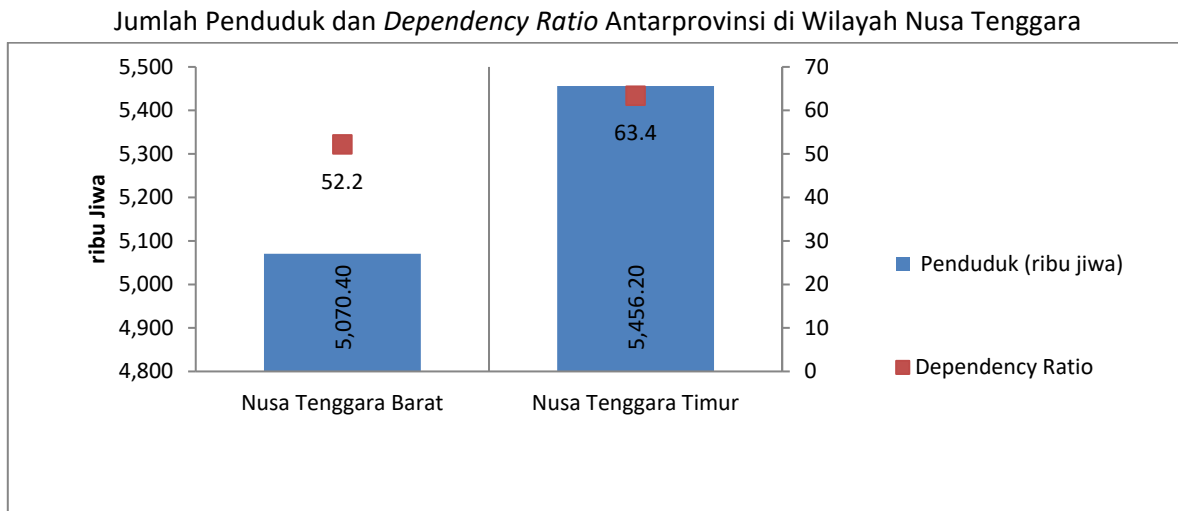
Tabel 11 :

Perkembangan Kepadatan Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan *Dependency Ratio* Antarprovinsi di Wilayah Nusa Tenggara

Provinsi	Penduduk (ribu jiwa)			Kepadatan Penduduk (jiwa per km ²)			<i>Dependency Ratio</i>		
	2015	2019	Δ ('15-'19)	2015	2019	Δ ('15-'19)	2015	2020	Δ ('10-'20)
Nusa Tenggara Barat	4.830,12	5.070,40	240,28	260,07	273,01	12,94	53,8	52,2	-1,6
Nusa Tenggara Timur	5.112,76	5.456,20	343,44	104,95	112,00	7,05	66,7	63,4	-3,3
NUSA TENGGARA	9.942,88	10.526,60	583,72	147,76	156,44	8,67			

Sumber: Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035

Gambar 11 :



Sumber: Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035

Angka beban tanggungan (*dependency Ratio*) di wilayah Nusa Tenggara masih berada di atas 50 persen, artinya masih lebih banyak kelompok usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dibanding usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun). Angka beban tanggungan di Provinsi NTT sebesar 63,4 persen, lebih tinggi dibanding dengan NTB sebesar 52,2 persen.

2.2. Ketenagakerjaan

Angkatan Kerja. Total angkatan kerja di wilayah Nusa Tenggara pada awal tahun 2020 sebanyak 5,13 juta orang atau meliputi 3,72 persen dari total angkatan kerja di Indonesia. Perkembangan selama periode 2015-2020 Provinsi NTT dan NTB menunjukkan peningkatan, dengan peningkatan di Provinsi NTT sebesar 230.776 orang lebih tinggi dibanding dengan Provinsi NTB sebesar 80.267 jiwa.

Tabel 12 :

Perkembangan Angkatan Kerja Antarprovinsi di Wilayah Nusa Tenggara Periode 2015-2020

Provinsi	Angkatan Kerja						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	$\Delta('15-'20)$
Nusa Tenggara Barat	2.410.979	2.382.616	2.520.674	2.459.021	2.489.388	2.491.246	80.267
Nusa Tenggara Timur	2.405.644	2.445.323	2.503.057	2.559.204	2.536.377	2.636.420	230.776
NUSA TENGGARA	4.816.623	4.827.939	5.023.731	5.018.225	5.025.765	5.127.666	311.043

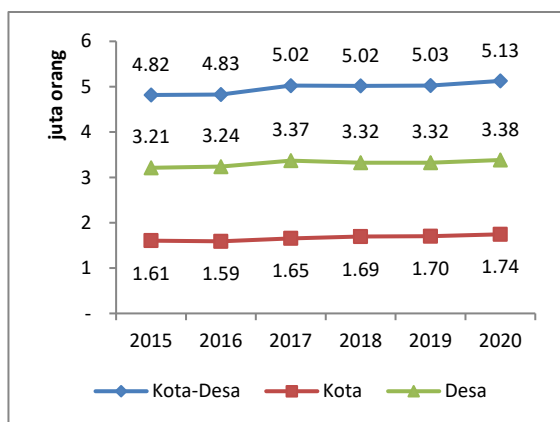
Sumber : Sakernas Februari 2015- 2020, BPS

Angkatan Kerja di Perdesaan-Perkotaan. Menurut distribusinya sebanyak 3,38 juta orang berada di perdesaan atau 65,98 persen dari total angkatan kerja. Perkembangan angkatan kerja pada periode 2015-2020, baik di perkotaan maupun di perdesaan menunjukkan peningkatan, dengan peningkatan di perkotaan (170 ribu orang) lebih tinggi dibanding perdesaan (130 ribu orang). Angkatan kerja di Provinsi NTT dan NTB pada tahun 2020, sebagian besar berada di perdesaan, terutama di Provinsi NTT yang mencapai 77,99 persen.



Gambar 12 :

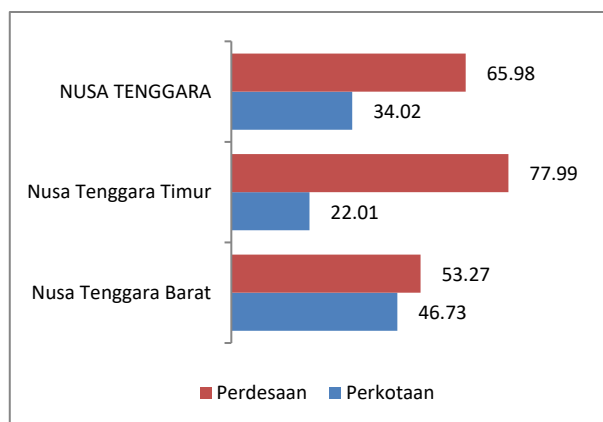
Perkembangan Angkatan Kerja di Wilayah Nusa Tenggara menurut Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015-2020



Sumber : Sakernas Februari 2015- 2020, BPS

Gambar 13:

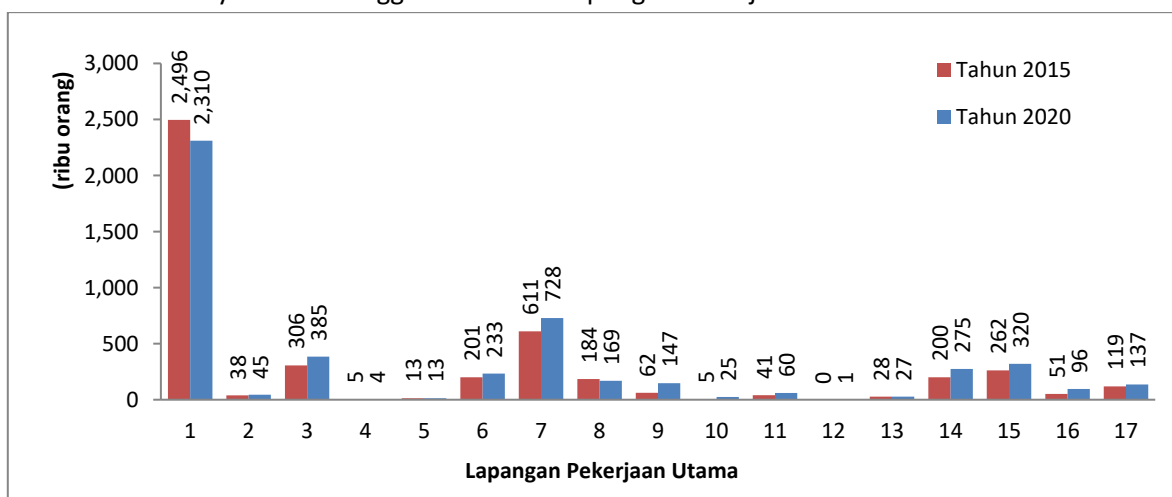
Penyebaran Angkatan Kerja Antarprovinsi menurut Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020



Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama. Berdasarkan 17 jenis lapangan pekerjaan utama, penduduk wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2020 sebagian besar bergerak pada jenis pekerjaan: (i) pertanian, kehutanan, dan perikanan (46,43%), dan perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (14,63%). Perkembangan pekerja antara tahun 2015 dan 2020 sebagian besar menunjukkan peningkatan, kecuali untuk jenis pekerjaan pertanian, kehutanan dan perikanan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; transportasi dan pergudangan; dan jasa perusahaan. **lihat Tabel 13.**

Gambar 14 :

Penduduk Wilayah Nusa Tenggara menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2015 dan 2020.



Sumber: Sakernas Februari 2015-2020, BPS

Keterangan:

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalan
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulan
6. Bangunan
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Jasa Persewaan Bangunan
13. Jasa Perusahaan
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. Jasa Lainnya.

Pada tahun 2020, masyarakat di wilayah perdesaan sebagian besar memiliki Jenis pekerjaan: (i) pertanian, kehutanan, dan perikanan (87,25%), (ii) pertambangan dan penggalian (70,02%), (iii) jasa pendidikan (63,39%). sementara itu, jenis pekerjaan yang sebagian besar berada di perkotaan adalah: (i) informasi dan komunikasi (83,60%), (ii) jasa persewaan bangunan (74,96%), (iii) dan jasa keuangan dan asuransi (71,12%).

Berdasarkan pertumbuhan pekerja pada setiap jenis pekerjaan utama pada periode 2015-2020, tertinggi pada jenis pekerjaan informasi dan komunikasi (366,02%), dan penyediaan akomodasi makan dan minum (136,37%).

Tabel 13 :

Penduduk Wilayah Nusa Tenggara menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Perdesaan-Perkotaan Tahun 2015 dan 2020

Lapangan Pekerjaan Utama	2015				2020				Δ ('15-'20) (ribu orang)	Tumbuh ('15-'20) (%)
	Pekerja		Kota (%)	Desa (%)	Pekerja		Kota (%)	Desa (%)		
	Jumlah (ribu)	%			Jumlah (ribu)	%				
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.495,94	54,01	14,02	85,98	2.310,26	46,43	12,75	87,25	-185,68	-7,44
2. Pertambangan dan Penggalian	38,37	0,83	29,35	70,65	45,25	0,91	29,98	70,02	6,88	17,94
3. Industri Pengolahan	306,06	6,62	44,08	55,92	384,98	7,74	42,11	57,89	78,93	25,79
4. Pengadaan Listrik dan Gas	4,62	0,10	72,22	27,78	4,25	0,09	62,82	37,18	-0,37	-7,91
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	12,81	0,28	68,29	31,71	12,70	0,26	55,72	44,28	-0,11	-0,84
6. Bangunan	200,58	4,34	48,15	51,85	233,16	4,69	46,94	53,06	32,58	16,24
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	610,57	13,21	56,44	43,56	728,07	14,63	59,60	40,40	117,50	19,24
8. Transportasi dan Pergudangan	184,16	3,98	47,31	52,69	168,77	3,39	49,35	50,65	-15,38	-8,35
9. Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	62,32	1,35	69,23	30,77	147,31	2,96	69,23	30,77	84,99	136,37
10. Informasi dan Komunikasi	5,36	0,12	100,00	-	24,97	0,50	83,60	16,40	19,62	366,02
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	40,88	0,88	70,24	29,76	59,81	1,20	71,12	28,88	18,94	46,33
12. Jasa Persewaan Bangunan	-	-			1,25	0,03	74,96	25,04	1,25	
13. Jasa Perusahaan	27,57	0,60	53,59	46,41	26,91	0,54	57,53	42,47	-0,66	-2,39
14. Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos	200,12	4,33	59,02	40,98	275,09	5,53	51,87	48,13	74,98	37,47
15. Jasa Pendidikan	261,65	5,66	44,34	55,66	320,28	6,44	36,61	63,39	58,63	22,41
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	51,19	1,11	49,83	50,17	96,10	1,93	49,73	50,27	44,92	87,75
17. Jasa Lainnya	119,21	2,58	69,88	30,12	136,56	2,74	62,75	37,25	17,36	14,56
TOTAL	4.621,39	100,0	31,84	68,16	4.975,75	100,0	33,80	66,20	354,36	7,67

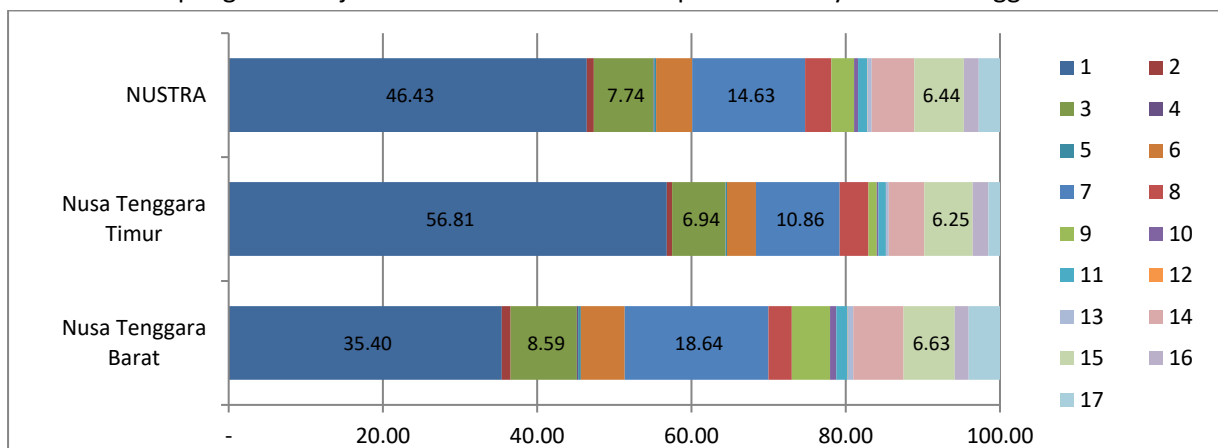
Sumber: Sakernas Februari 2015-2020, BPS

Lapangan pekerjaan utama di Provinsi NTB dan NTT paling dominan adalah lapangan pekerjaan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, terutama di Provinsi NTT mencapai 56,81 persen, sedangkan di Provinsi NTB sebesar 35,40 persen. Sementara itu untuk lapangan pekerjaan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebagian besar berada di Provinsi NTB (18,64%), dan industri pengolahan (8,59%).



Gambar 15 :

Persentase Lapangan Pekerjaan Utama Penduduk Antarprovinsi Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2020



Sumber: Sakernas Februari 2015-2020, BPS

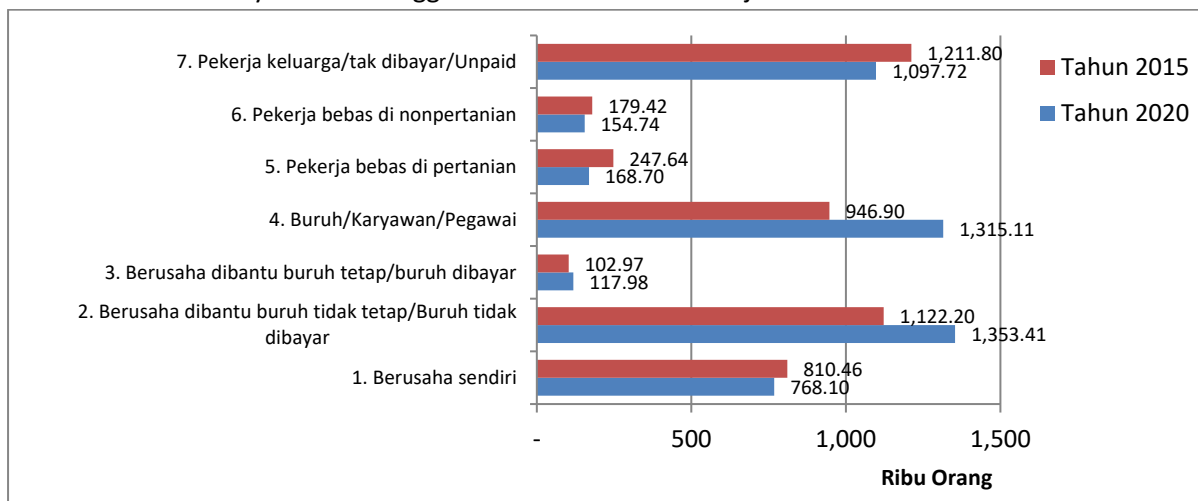
Keterangan:

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulan
6. Bangunan
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Jasa Persewaan Bangunan
13. Jasa Perusahaan
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. Jasa Lainnya.

Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama. Berdasarkan 7 jenis status pekerjaan utama, penduduk wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2020 sebagian besar berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar (27,20%), buruh/karyawan/pegawai (26,43%), dan pekerja keluarga/tak dibayar (22,06%). Pada periode 2015-2020, peningkatan jumlah pekerja terjadi pada status pekerjaan (i). Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar (ii). Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, (iii). Buruh/karyawan/pegawai, lihat Tabel 14.

Gambar 16:

Penduduk Wilayah Nusa Tenggara menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2015 dan 2020



Sumber: Sakernas Februari 2015-2020, BPS

Pada tahun 2020, status pekerja di kawasan perkotaan sebagian besar berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar (63,85%), dan buruh/karyawan/pegawai (53,25%). Sementara itu, status pekerja di kawasan perdesaan sebagian besar sebagai pekerja bebas di pertanian (80,69%), dan pekerja

keluarga/tak dibayar (82,60%), dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar (79,12%). Berdasarkan perkembangan pada periode 2015-2020, peningkatan jumlah pekerja terbanyak adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai sebanyak 368,20 ribu orang atau tumbuh sebesar 38,88 persen, dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar (231,21 ribu orang) atau tumbuh sebesar 20,60%.

Tabel 14 :

Penduduk Wilayah Nusa Tenggara menurut Status Pekerjaan Utama dan Perdesaan-Perkotaan Tahun 2015 dan 2020

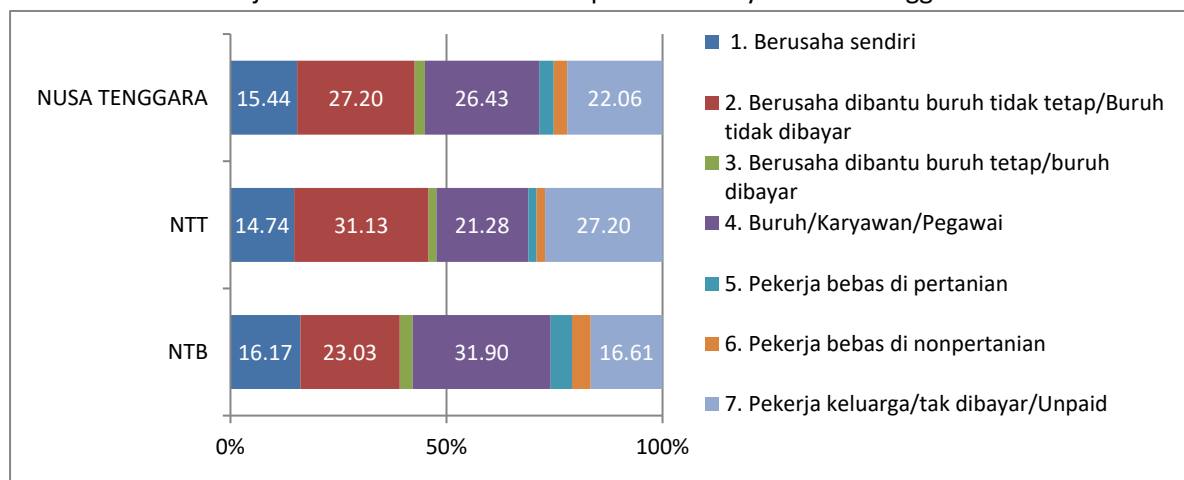
Lapangan Pekerjaan Utama	2015				2020				Δ ('15-'20) (ribu orang)	Tumbuh ('15-'20) (%)
	Pekerja		Kota (%)	Desa (%)	Pekerja		Kota (%)	Desa (%)		
	Jumlah (orang)	%			Jumlah (orang)	%				
1. Berusaha sendiri	810.458	17,54	42,24	57,76	768.097	15,44	42,57	57,43	-42.361	-5,23
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/Buruh tidak dibayar	1.122.199	24,28	18,96	81,04	1.353.412	27,20	20,88	79,12	231.213	20,60
3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	102.965	2,23	54,47	45,53	117.979	2,37	63,85	36,15	15.014	14,58
4. Buruh/Karyawan/Pegawai	946.903	20,49	56,65	43,35	1.315.106	26,43	53,25	46,75	368.203	38,88
5. Pekerja bebas di pertanian	247.644	5,36	21,37	78,63	168.699	3,39	19,31	80,69	-78.945	-31,88
6. Pekerja bebas di nonpertanian	179.419	3,88	48,40	51,60	154.736	3,11	47,17	52,83	-24.683	-13,76
7. Pekerja keluarga/tak dibayar	1.211.799	26,22	15,19	84,81	1.097.717	22,06	17,40	82,60	-114.082	-9,41
TOTAL	4.621.387	100,0	31,84	68,16	4.975.746	100,0	33,80	66,20	354.359	7,67

Sumber: Sakernas Februari 2015-2020, BPS

Status pekerjaan utama antarprovinsi, seluruh provinsi memiliki pekerja paling dominan pada status pekerjaan buruh/karyawan/pegawai, dengan persentase tertinggi di Provinsi NTB sebesar 31,90 persen dari total pekerjaannya. Status pekerjaan lainnya yang cukup tinggi adalah pekerja berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, dan pekerja keluarga/tak dibayar dengan persentase tertinggi di Provinsi NTT masing-masing sebesar 31,13 persen dan 27,20 persen.

Gambar 17 :

Status Pekerjaan Utama Penduduk Antarprovinsi Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2020



Sumber: Sakernas Februari 2015-2020, BPS



PERKEMBANGAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

Pendidikan

- ❖ Rata-rata Lama sekolah (RLS) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 7,55 tahun lebih tinggi dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 7,27 tahun, namun masih berada di bawah RLS nasional (8,34 tahun).
- ❖ Harapan Lama Sekolah (HLS) di Provinsi NTB sebesar 13,48 tahun, lebih tinggi dibanding Provinsi NTT (13,15 tahun), dan sudah berada di atas HLS nasional (12,95 tahun).
- ❖ Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok usia anak 07-12 tahun di Provinsi NTB dan NTT sudah berada di atas rata-rata nasional (99,24%), dengan APS tertinggi di Provinsi NTB sebesar 99,48 persen. Untuk APS kelompok usia 13-15 tahun, Provinsi NTB berada di atas APS Nasional (95,51%), dan APS Provinsi NTT (95,51%) masih berada di bawah APS nasional.
- ❖ Untuk APS 16-18 tahun dan APS 19-24 tahun Provinsi NTB dan NTT sudah berada di atas APS nasional, di Provinsi NTB (77,65%) lebih tinggi dari Provinsi NTT (75,36%), dan untuk APS kelompok usia 19-24 tahun di Provinsi NTT (29,27%) lebih tinggi dari Provinsi NTB (25,59%).
- ❖ Berdasarkan rasio Murid dan Guru di Provinsi NTB dan NTT telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan pemerintah, sedangkan untuk rasio rombel per kelas sudah dipenuhi oleh Provinsi NTT pada jenjang SD (0,98), dan Provinsi NTB untuk jenjang SMP (0,97), sedangkan untuk rasio rombel perkelas lainnya belum memenuhi ketentuan pemerintah.
- ❖ Kondisi bangunan sekolah di Provinsi NTT dan NTB setiap jenjang sekolah sebagian besar memiliki bangunan rusak ringan hingga melebihi angka di atas 50 persen, kecuali SMK di Provinsi NTB (49,9%). Sedangkan untuk bangunan rusak berat/total tertinggi adalah untuk jenjang Pendidikan SD (NTB : 12,57%, NTT : 17,17%), dan jenjang SMP (NTB: 11,76%, NTT 11,32%).
- ❖ Penggunaan komputer oleh siswa umur 5-24 tahun perkotaan Provinsi NTT (34,81%) dan NTB (25,28%), untuk di perdesaan persentase pengguna komputer di Provinsi NTB (12,46%) lebih tinggi dibanding Provinsi NTT (6,2%). Pengguna internet di perkotaan di Provinsi NTB (59,04%) lebih tinggi dibanding dengan Provinsi NTT (52,42%), sedangkan di perdesaan Provinsi NTB (36,52%), lebih tinggi dibanding dengan Provinsi NTT (15,49%).

Kesehatan

- ❖ Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2019 di Provinsi NTB (66,28 tahun) dan NTT (66,85 tahun) masih berada di bawah AHH nasional (71,34 tahun).
- ❖ Berdasarkan Data Riskesdas 2018, prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang Balita usia 0-59 bulan tertinggi di Provinsi NTT sebesar 29,50 persen, prevalensi Balita Sangat Pendek dan Pendek (stunting) tertinggi di Provinsi NTT (42,7%) dan NTB (33,5%).
- ❖ Jumlah kasus tuberculosis yang dilaporkan tahun 2019, di Provinsi NTB sebanyak 7.269 kasus lebih tinggi dibanding dengan Provinsi NTT (7.137 kasus).
- ❖ Kasus baru HIV kumulatif pada periode 2015-2019 tertinggi di Provinsi NTT sebanyak 3.286 kasus, dan NTB (827 kasus), dan untuk kasus baru Aids hingga Desember 2019 di NTT sebanyak 2.088 kasus dan di Provinsi NTB sebanyak 1.041 kasus.
- ❖ Puskesmas terakreditasi dan memiliki rawat inap terbanyak terdapat di Provinsi NTT masing-masing sebanyak 367 (91,29%) dan 239 puskesmas (59,45%). Sedangkan di Provinsi NTB sebanyak 47 puskesmas (27,81%) memiliki rawat inap, dan 163 puskesmas (96,45%) sudah terakreditasi.
- ❖ Kecukupan dokter di puskesmas di Provinsi NTT menunjukkan persentase puskesmas kurang dokter (49,74%) dan kurang dokter gigi (73,06%), dan persentase kurang dokter di Provinsi NTB sebanyak 21,3 persen dan kurang dokter gigi (36,09%)



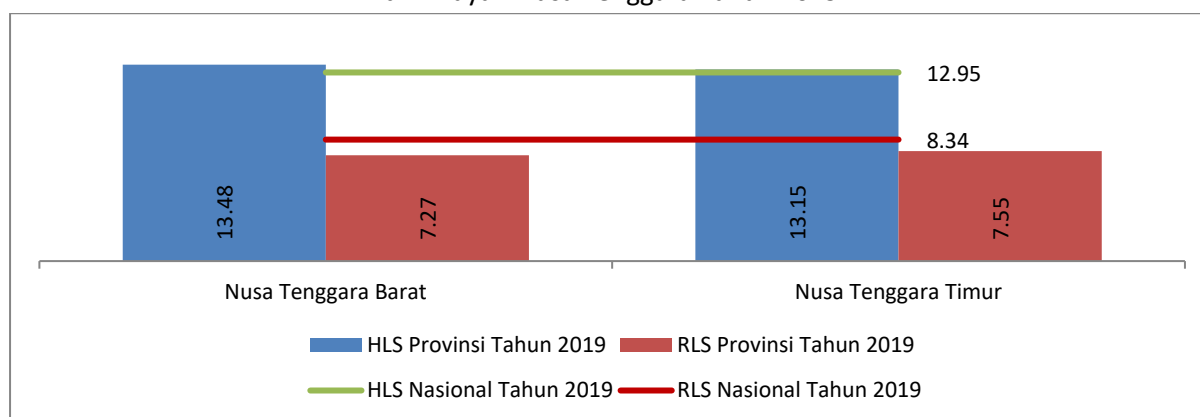
3.1. Pendidikan

3.1.1. Kondisi Pendidikan Masyarakat.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) antarprovinsi di Wilayah Nusa Tenggara tahun 2019, RLS Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 7,55 tahun lebih tinggi dari Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 7,27 tahun, namun masih berada di bawah RLS nasional (8,34 tahun). Sementara itu, berdasarkan indikator **Harapan Lama Sekolah (HLS)** yang menunjukkan peluang lamanya bersekolah bagi anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal, HLS di Provinsi NTB sebesar 13,48 tahun, lebih tinggi dibanding Provinsi NTT (13,15 tahun), dan sudah berada di atas HLS nasional (12,95 tahun).

Gambar 18:

Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Antarprovinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2019



Sumber: Publikasi BPS (bps.go.id) 2019.

Perkembangan HLS dan RLS antarprovinsi di wilayah Nusa Tenggara pada periode 2015-2019, seluruh provinsi menunjukkan tren peningkatan dengan peningkatan HLS di Provinsi NTB sebesar 0,44 tahun lebih tinggi dibanding Provinsi NTT (0,31 tahun). Sedangkan untuk peningkatan RLS di Provinsi NTT sebesar 0,62 tahun, lebih tinggi dari peningkatan Provinsi NTB sebesar 0,62 tahun.

Tabel 15 :

Perkembangan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Antarprovinsi di wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015 - 2019

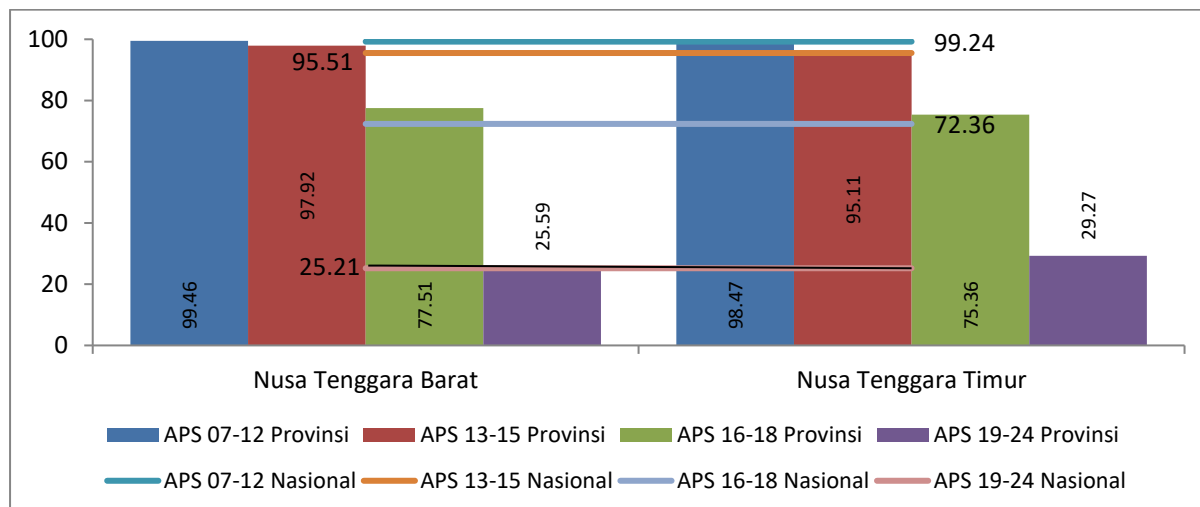
Provinsi	2015		2016		2017		2018		2019		Δ 2015-2019	
	HLS	RLS	HLS	RLS	HLS	RLS	HLS	RLS	HLS	RLS	HLS	RLS
Nusa Tenggara Barat	13,04	6,71	13,16	6,79	13,46	6,90	13,47	7,03	13,48	7,27	0,44	0,56
Nusa Tenggara Timur	12,84	6,93	12,97	7,02	13,07	7,15	13,10	7,30	13,15	7,55	0,31	0,62
INDONESIA	12,55	7,84	12,72	7,95	12,85	8,10	12,91	8,17	12,95	8,34	0,40	0,50

Sumber: Publikasi BPS (bps.go.id) 2019



Gambar 19 :

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Usia Antarprovinsi di wilayah Nusa Tenggara Tahun 2019



Sumber: Publikasi BPS (bps.go.id) 2019.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) wilayah Nusa Tenggara tahun 2019 untuk kelompok usia anak 07-12 tahun, Provinsi NTB dan NTT sudah berada di atas rata-rata nasional (99,24%), dengan APS tertinggi di Provinsi NTB sebesar 99,48 persen. Untuk APS kelompok usia 13-15 tahun, Provinsi NTB berada di atas APS nasional (95,51%), dan APS Provinsi NTT (95,51%) masih berada di bawah APS nasional. Untuk APS 16-18 tahun dan APS 19-24 tahun Provinsi NTB dan NTT sudah berada di atas APS nasional, dengan rincian APS kelompok usia 16-18 tahun di Provinsi NTB (77,65%) lebih tinggi dari Provinsi NTT (75,36%), dan untuk APS kelompok usia 19-24 tahun di Provinsi NTT (29,27%) lebih tinggi dari Provinsi NTB (25,59%).

Tabel 16 :

Perkembangan Angka Partisipasi sekolah (APS) menurut Kelompok Usia Antarprovinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015 dan 2019

Provinsi	APS (07-12)			APS (13-15)			APS (16-18)			APS (19-24)		
	2015	2019	Δ	2015	2019	Δ	2015	2019	Δ	2015	2019	Δ
Nusa Tenggara Barat	99,48	99,46	-0,02	97,44	97,92	0,48	75,86	77,51	1,65	26,84	25,59	-1,25
Nusa Tenggara Timur	98,13	98,47	0,34	94,39	95,11	0,72	74,25	75,36	1,11	26,54	29,27	2,73
INDONESIA	99,09	99,24	0,15	94,72	95,51	0,79	70,61	72,36	1,75	22,95	25,21	2,26

Sumber: Publikasi BPS (bps.go.id) 2019.

Berdasarkan perkembangan APS pada seluruh kelompok usia selama periode 2015-2019, Provinsi NTB menunjukkan penurunan pada APS 07-12 tahun dan APS 19-24 tahun.

3.1.2. Pelayanan Pendidikan

Kondisi dan Kecukupan Ruang Kelas. Berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SM, SMK, menyebutkan bahwa pada jenjang SD satu rombongan belajar layaknya mencakup 20-28 peserta didik (murid), jenjang SMP mencakup 20-32 murid, jenjang SMA mencakup 20-36 murid, dan SMK mencakup 15-36 murid. Berdasarkan batasan tersebut, secara rata-rata rasio murid per rombongan belajar sekolah antarprovinsi di wilayah Nusa Tenggara telah memenuhi persyaratan rombongan belajar (rombel) yang diatur dalam peraturan tersebut.

Tabel 17 :

Gambaran Rasio Murid-Guru, Murid-Rombel, Rombel-Kelas menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2019 di Wilayah Nusa Tenggara

Provinsi	SD			SMP			SMA			SMK		
	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid	Rasio Rombel	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Rombel	Rasio Rombel-Kelas	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Rombel	Rasio Rombel-Kelas	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Rombel	Rasio Rombel-Kelas
Nusa Tenggara Barat	13	23	1,06	10	26	0,97	11	29	1,01	11	25	1,14
Nusa Tenggara Timur	14	20	0,98	13	27	1,05	13	28	1,12	12	25	1,12
NASIONAL	16	22	1,06	15	28	0,98	15	29	1,01	16	27	1,11
KETENTUAN*	20	20-28	1	20	20-32	1	20	20-36	1	15	15-36	1

Sumber: Publikasi BPS (bps.go.id) 2019.

Berdasarkan rasio rombel per kelas, idealnya menunjukkan jumlah rombel sama dengan jumlah kelas yang tersedia. Hal ini menandakan tidak ada ruang kelas yang digunakan sebagai sarana belajar untuk dua atau lebih rombel yang berbeda. Kondisi tersebut sudah terpenuhi oleh Provinsi NTT untuk jenjang SD (0,98), dan Provinsi NTB untuk jenjang SMP (0,97), sedangkan untuk rasio rombel per kelas lainnya masih berada di atas ketentuan.

Penyediaan sarana dan prasarana sekolah harus sesuai standar mutu pendidikan yang telah ditentukan, sehingga akan mendukung proses pembelajaran yang lebih kondusif. Namun demikian, ruang kelas yang ada masih didominasi oleh ruang kelas dengan kondisi rusak, baik rusak ringan/sedang maupun rusak berat/total. Lihat tabel 18

Tabel 18 :

Kondisi Bangunan Sekolah menurut Jenjang Pendidikan TA. 2018/2019 di Wilayah Nusa Tenggara

Provinsi	SD			SMP			SMA			SMK		
	Baik	Rusak		Baik	Rusak		Baik	Rusak		Baik	Rusak	
		Ringan/Sedang	Berat/Total		Ringan/Sedang	Berat/Total		Ringan/Sedang	Berat/Total		Ringan/Sedang	Berat/Total
Nusa Tenggara Barat	23,31	64,11	12,57	24,76	63,48	11,76	29,36	62,68	7,96	46,91	49,9	3,19
Nusa Tenggara Timur	18,41	65,42	16,17	24,43	64,24	11,32	37,72	55,1	7,18	43,12	52,18	4,69

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kondisi bangunan sekolah di Provinsi NTT dan NTB setiap jenjang sekolah sebagian besar memiliki bangunan rusak ringan hingga melebihi angka di atas 50 persen, kecuali untuk jenjang pendidikan SMK di Provinsi NTB (49,9%). Kondisi bangunan rusak berat/total tertinggi adalah untuk jenjang Pendidikan SD (NTB : 12,57%, NTT : 17,17%), dan jenjang SMP (NTB: 11,76%, NTT 11,32%).

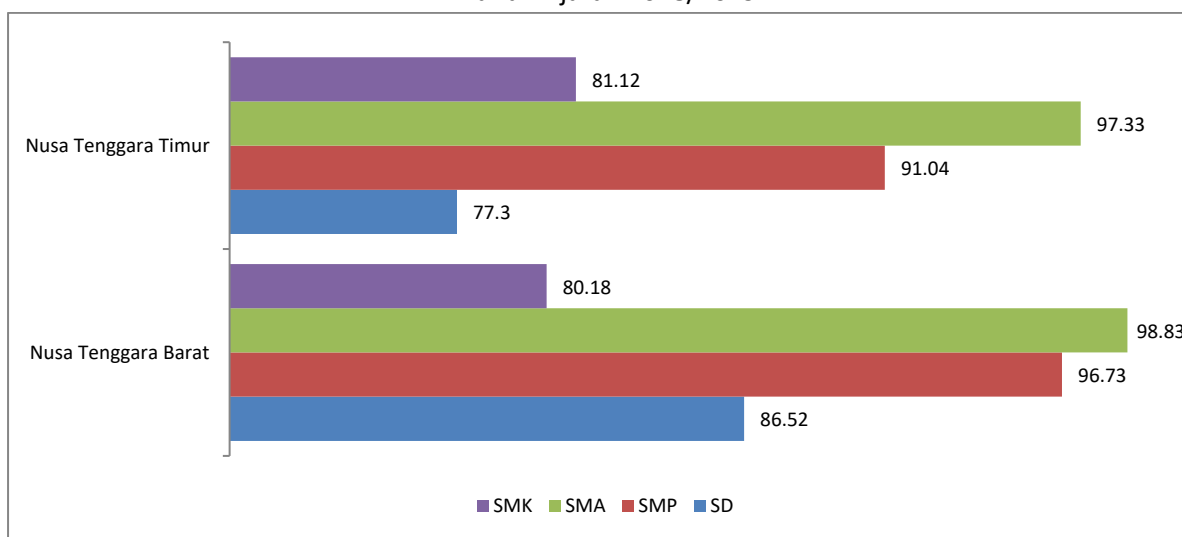
Ketersediaan dan Pendidikan Guru. Beban kerja guru dapat dilihat dengan menghitung rasio murid-guru yang menggambarkan jumlah murid terhadap jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) telah memiliki acuan dalam menentukan Rasio Murid-Guru pada setiap jenjang pendidikan. Berdasarkan ketentuan tersebut rasio pada agregat per provinsi (NTB dan NTT), sudah memenuhi ketentuan pada setiap jenjang pendidikan.

Berdasarkan aspek pendidikan guru/kepala sekolah yang dianggap layak adalah minimal berpendidikan D4/S1. Di Provinsi NTB dan NTT telah mencapai di atas 90 persen untuk guru jenjang pendidikan SMP dan SMA, sedangkan untuk jenjang SD di Provinsi NTB mencapai 86,52 persen, dan Provinsi NTT mencapai 77,3 persen.



Gambar 20 :

Persentase Guru/Kepala Sekolah Minimal Berijazah D4/S1 menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2018/2019



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

3.1.3. Akses Teknologi Informasi Siswa

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, perangkat komputer beserta internet sudah menjadi kebutuhan siswa dalam meningkatkan wawasan pengetahuan umum, serta kemudahan dalam mempelajari dan menggali pengetahuan baru di samping materi pelajaran yang diajarkan oleh guru. Berdasarkan persentase siswa umur 5-24 Tahun yang menggunakan komputer selama tiga bulan terakhir, di perkotaan Provinsi NTT memiliki persentase sebesar 34,81 persen, lebih tinggi dibanding Provinsi NTB (25,28%) dan lingkup nasional (31,37%). Sedangkan untuk di perdesaan persentase pengguna komputer di Provinsi NTB (12,46%) lebih tinggi dibanding Provinsi NTT (6,2%). Sementara itu, untuk pengguna internet di perkotaan di Provinsi NTB sebesar 59,04 persen, lebih tinggi dibanding dengan Provinsi NTT (52,42%), sedangkan di perdesaan Provinsi NTB sebesar 36,52 persen, lebih tinggi dibanding dengan Provinsi NTT (15,49%).

Tabel 19 :

Persentase Siswa Umur 5-24 Tahun yang Menggunakan Komputer dan Internet Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Provinsi

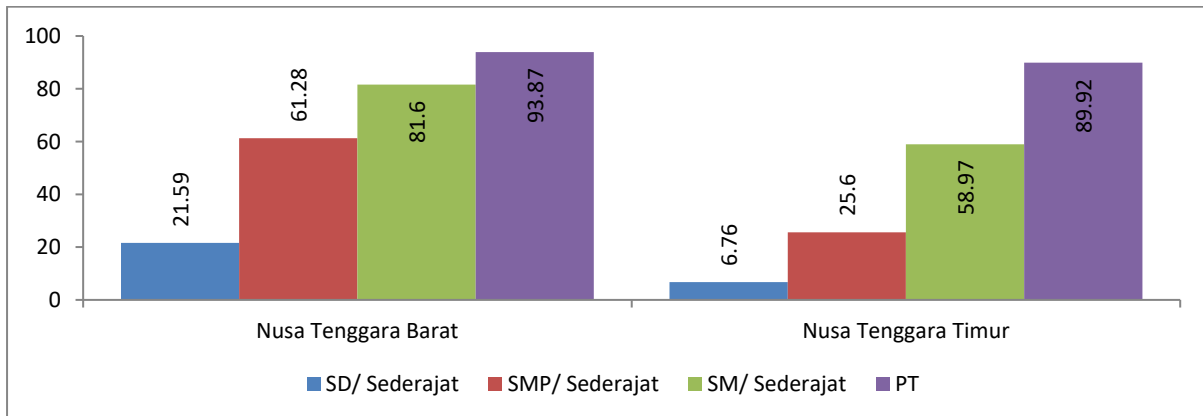
Provinsi	Menggunakan Komputer*			Menggunakan Internet*		
	K	D	K + D	K	D	K + D
Nusa Tenggara Barat	25,28	12,46	18,93	59,04	36,52	47,89
Nusa Tenggara Timur	34,81	6,2	13,65	52,42	15,49	25,11
INDONESIA	31,37	15,43	24,52	62,51	40,53	53,06

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Sementara itu pada Gambar 22, penggunaan internet siswa dari setiap tingkatan (SD sampai dengan Perguruan Tinggi) lebih dominan di Provinsi NTB dibanding NTT, dengan pengguna tertinggi pada siswa Perguruan Tinggi sebesar 93,87 persen, sementara siswa pengguna internet terendah adalah siswa SD di Provinsi NTT (6,76%).

Gambar 21:

Persentase Siswa Usia 5-24 Tahun yang Menggunakan Internet Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2019



Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

3.2. Kesehatan

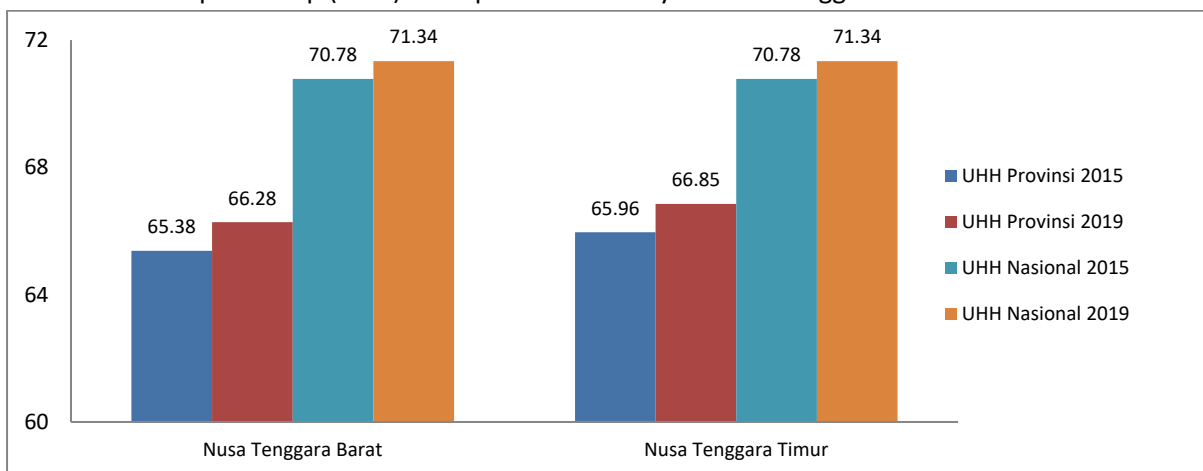
Kesehatan. Perkembangan kondisi kesehatan penduduk antarprovinsi di wilayah Nusa Tenggara selama periode tahun 2015-2019 menunjukkan kondisi perbaikan yang diindikasikan oleh menurunnya status gizi buruk pada balita, dan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH). Sementara untuk prevalensi penyakit menular diindikasikan oleh jumlah kasus Tuberculosis, HIV dan AIDS yang masih menunjukkan kecenderungan peningkatan sejalan dengan pelaporan kasus di daerah.

3.2.1. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) tahun 2019 di Provinsi NTB (66,28 tahun) dan NTT (66,85 tahun) masih berada di bawah UHH nasional (71,34 tahun). Peningkatan UHH selama periode 2015-2019, di Provinsi NTB sebesar 0,9 Tahun lebih tinggi dibanding dengan peningkatan di Provinsi NTT (0,89 tahun) dan peningkatan UHH nasional sebesar 0,56 tahun.

Gambar 22:

Umur Harapan Hidup (UHH) Antarprovinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015 dan 2019



Sumber: Publikasi BPS (bps.go.id) 2020.



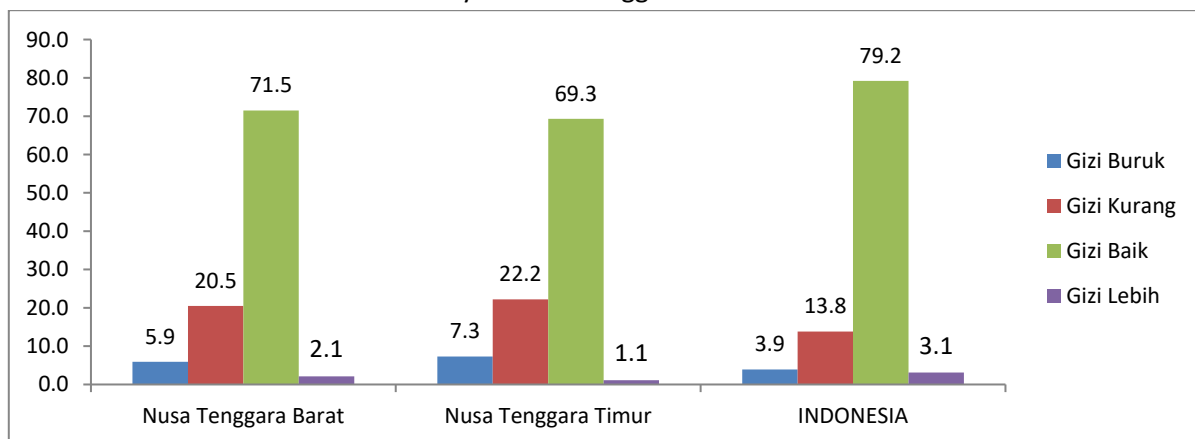
3.2.2. Status Gizi Balita

Gizi Buruk dapat terjadi pada semua kelompok umur, tetapi yang perlu lebih diperhatikan pada kelompok bayi dan balita. Pada usia 0-2 tahun merupakan masa tumbuh kembang yang optimal (*golden period*) terutama untuk pertumbuhan janin sehingga bila terjadi gangguan pada masa ini tidak dapat dicukupi pada masa berikutnya dan akan berpengaruh negatif pada kualitas generasi penerus.

Status gizi balita dapat diukur dengan indeks berat badan per umur (BB/U), tinggi badan per umur (TB/U) dan berat badan per tinggi badan (BB/TB). Berdasarkan Data Riskesdas 2018, prevalensi Gizi Guruk dan Gizi Kurang bayi berusia di bawah lima tahun (Balita usia 0-59 bulan) di wilayah Nusa Tenggara, angka tertinggi terdapat di Provinsi NTT sebesar 29,50 persen yang terdiri dari 7,3 persen Gizi Buruk dan 22,2 persen Gizi Kurang. Berdasarkan angka status Gizi Buruk dan Sedang tersebut di Provinsi NTT dan NTB memiliki angka lebih tinggi dibanding dengan angka nasional (17,7%).

Gambar 23 :

Persentase Balita menurut Status Gizi dengan Indeks Berat Badan (Bb)/ Umur (U) di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2018



Sumber: Riskesdas 2013, 2018, Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes.

Perkembangan status gizi balita pada periode 2013 dan 2018 hampir seluruh provinsi di wilayah Nusa Tenggara menunjukkan penurunan. Penurunan angka status Gizi Buruk tertinggi selama periode 2013-2018 terdapat di Provinsi NTT (4,2%), dan untuk Gizi Kurang tertinggi di Provinsi NTB sebesar 1,1 persen. Peningkatan Gizi Baik dan penurunan Gizi Lebih tertinggi berada di Provinsi NTT.

Tabel 20 :

Perkembangan Persentase Balita menurut Status Gizi dengan Indeks BB/U di Wilayah Nusa Tenggara Periode Tahun 2013 dan 2018

Provinsi	Gizi Buruk			Gizi Kurang			Gizi Baik			Gizi Lebih		
	2013	2018	Δ ('13-'18)	2013	2018	Δ ('13-'18)	2013	2018	Δ ('13-'18)	2013	2018	Δ ('13-'18)
Nusa Tenggara Barat	6,3	5,9	-0,4	20,5	19,4	-1,1	71,5	71,5	0,0	2,8	2,1	-0,7
Nusa Tenggara Timur	11,5	7,3	-4,2	22,2	21,5	-0,7	64,4	69,3	4,9	2,5	1,1	-1,4
INDONESIA	5,7	3,9	-1,8	13,9	13,8	-0,1	75,9	79,2	3,3	4,5	3,1	-1,4

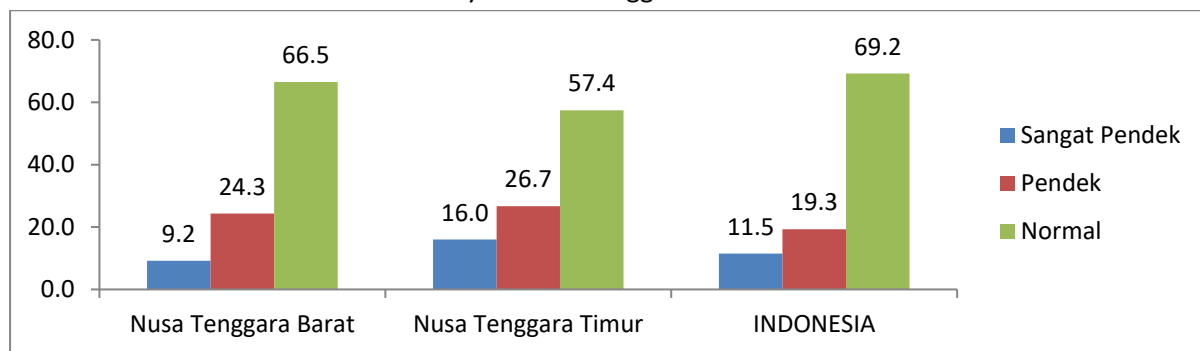
Sumber: Riskesdas 2013, 2018, Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes.

Status Gizi Balita Dengan Indeks Tinggi Badan (TB)/Umur (U) - Stunting

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Prevalensi balita sangat pendek dan pendek di wilayah Nusa Tenggara, angka tertinggi terdapat di Provinsi NTT sebesar 42,7 persen yang terdiri dari 16 persen Balita Sangat Pendek dan 26,7 persen Balita Pendek. Berdasarkan angka stunting Provinsi NTT (42,7%) dan NTB (33,5%) memiliki angka stunting lebih tinggi dibanding dengan angka nasional (30,8%).

Gambar 24 :

Persentase Balita Usia 0-59 Bulan menurut Status Gizi dengan Indeks Tinggi Badan (TB)/Umur (U) di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2018



Sumber: Riskesdas 2013, 2018, Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes.

Perkembangan proporsi status gizi sangat pendek dan pendek (stunting) antarprovinsi di wilayah Nusa Tenggara selama periode 2013 dan 2018 menunjukkan penurunan untuk balita sangat pendek, dengan penurunan tertinggi terdapat di Provinsi NTB sebesar 11,3 persen. Pada periode yang sama, balita pendek di Provinsi NTB berkurang sebesar 0,4 persen, sementara di Provinsi NTT menunjukkan peningkatan sebesar 1,2 persen.

Tabel 21 :

Perkembangan Persentase Balita menurut Status Gizi dengan Indeks BB/U di Wilayah Nusa Tenggara Periode Tahun 2013 dan 2018

Provinsi	Sangat Pendek			Pendek			Normal		
	2013	2018	Δ ('13-'18)	2013	2018	Δ ('13-'18)	2013	2018	Δ ('13-'18)
Nusa Tenggara Barat	20,5	9,2	-11,3	24,7	24,3	-0,4	54,7	66,5	11,8
Nusa Tenggara Timur	26,2	16,0	-10,2	25,5	26,7	1,2	48,3	57,4	9,1
INDONESIA	18,0	11,5	-6,5	19,2	19,3	0,1	62,8	69,2	6,4

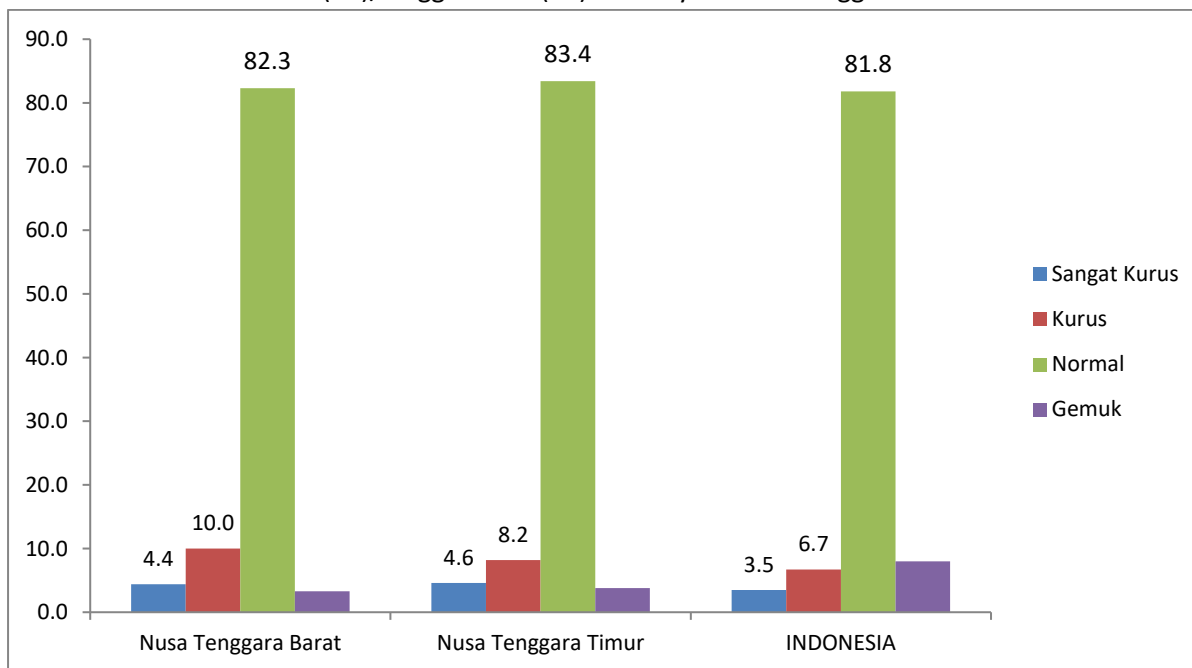
Sumber: Riskesdas 2013, 2018, Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes.

Persentase Balita menurut Status Gizi dengan Indeks Berat Badan (BB)/Tinggi Badan (TB)

Prevalensi gizi balita sangat kurus dan kurus di wilayah Nusa Tenggara menunjukkan angka lebih tinggi dibanding dengan angka nasional (10,2 persen). Persentase balita sangat kurus dan kurus tertinggi terdapat di Provinsi NTB sebesar 14,4 persen yang terdiri dari 4,4 persen balita sangat kurus dan 10,0 persen balita kurus.



Gambar 25 :
 Persentase Balita Usia 0-59 Bulan menurut Status Gizi dengan Indeks Berat Badan (TB)/Tinggi Badan (TB) di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2018



Sumber: Riskesdas 2013, 2018, Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes.

Perkembangan proporsi status gizi balita sangat kurus dan kurus antarprovinsi di wilayah Nusa Tenggara pada periode 2013 dan 2018 menunjukkan penurunan untuk balita sangat kurus, namun menunjukkan peningkatan untuk balita kurus baik di Provinsi NTB maupun NTT. Peningkatan tertinggi terdapat di Provinsi NTB sebesar 3,3 persen. Untuk balita gemuk menunjukkan perkembangan penurunan dengan tertinggi di Provinsi NTB sebesar 5,2 persen.

Tabel 22 :
 Perkembangan Persentase Balita menurut Status Gizi dengan Indeks BB/Tinggi Badan (TB) di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2013 dan 2018

Provinsi	Sangat Kurus			Kurus			Normal			Gemuk		
	2013	2018	Δ ('13-'18)	2013	2018	Δ ('13-'18)	2013	2018	Δ ('13-'18)	2013	2018	Δ ('13-'18)
Nusa Tenggara Barat	5,2	4,4	-0,8	6,7	10,0	3,3	79,7	82,3	2,6	8,5	3,3	-5,2
Nusa Tenggara Timur	7,4	4,6	-2,8	8,1	8,2	0,1	76,6	83,4	6,8	8,0	3,8	-4,2
INDONESIA	5,3	3,5	-1,8	6,8	6,7	-0,1	76,1	81,8	5,7	11,8	8,0	-3,8

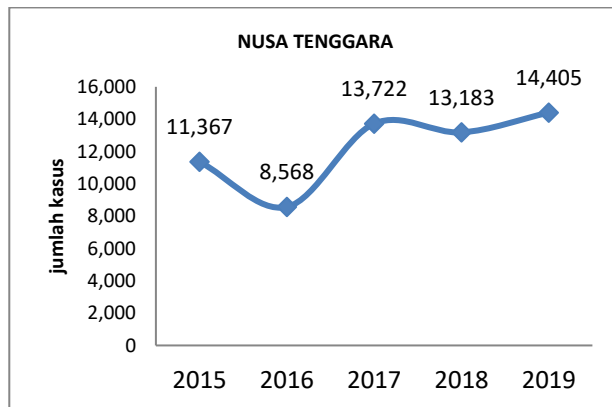
Sumber: Riskesdas 2013, 2018, Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes.

3.2.3. Kasus Penyakit Menular

Tuberkulosis. Tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium Tuberculosis*, dan masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menjadi tantangan global. Jumlah kasus tuberkulosis pada tahun 2019 di wilayah Nusa Tenggara ditemukan sebanyak 14.405 kasus, menunjukkan peningkatan dibanding dengan jumlah kasus tahun 2015 (11,367 kasus), dengan peningkatan sebanyak 3.038 kasus.

Jumlah kasus tuberkulosis antarprovinsi yang dilaporkan, di Provinsi NTB sebanyak 7.269 kasus lebih tinggi dibanding dengan Provinsi NTT (7.137 kasus). Berdasarkan peningkatan jumlah kasus selama periode 2015-2019 di Provinsi NTT sebanyak 1.769 kasus, lebih tinggi dibanding dengan Provinsi NTB sebesar 1.269 kasus.

Gambar 26 :
Perkembangan Jumlah Kasus Tuberkulosis di Wilayah Nusa Tenggara Periode 2015-2019



Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2019

Tabel 23 :

Perkembangan Jumlah Kasus Tuberkulosis Antarprovinsi di Wilayah Nusa Tenggara Periode 2015-2019

PROVINSI	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	Δ '15-'19
Nusa Tenggara Barat	5.999	2.931	6.769	6.437	7.268	1.269
Nusa Tenggara Timur	5.368	5.637	6.953	6.746	7.137	1.769
NUSA TENGGARA	11.367	8.568	13.722	13.183	14.405	3.038

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes.

Angka Notifikasi Semua Kasus Tuberkulosis atau *Case Notification Rate* (CNR) adalah jumlah semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan diantara 100.000 penduduk yang ada di suatu wilayah tertentu. Tabel 24 menunjukkan angka notifikasi semua kasus tuberkulosis per 100.000 penduduk dari tahun 2015-2019. Angka notifikasi semua kasus tuberkulosis pada tahun 2019 di Provinsi NTB sebesar 243 per 100.000 penduduk, lebih tinggi dibanding Provinsi NTT sebesar 131 per 100.000 penduduk. Peningkatan selama periode 2015-2019 tertinggi di Provinsi NTT (20 per 100.000 penduduk).

Tabel 24 :

Perkembangan Angka Notifikasi Semua Kasus Tuberkulosis atau *Case Notification Rate* (CNR) Antarprovinsi di Wilayah Nusa Tenggara Periode 2015-2019.

Provinsi	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	Δ '15-'19
Nusa Tenggara Barat	125	122	137	128	143	18
Nusa Tenggara Timur	111	119	132	126	131	20
NUSA TENGGARA	236	241	269	254	274	38

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes.

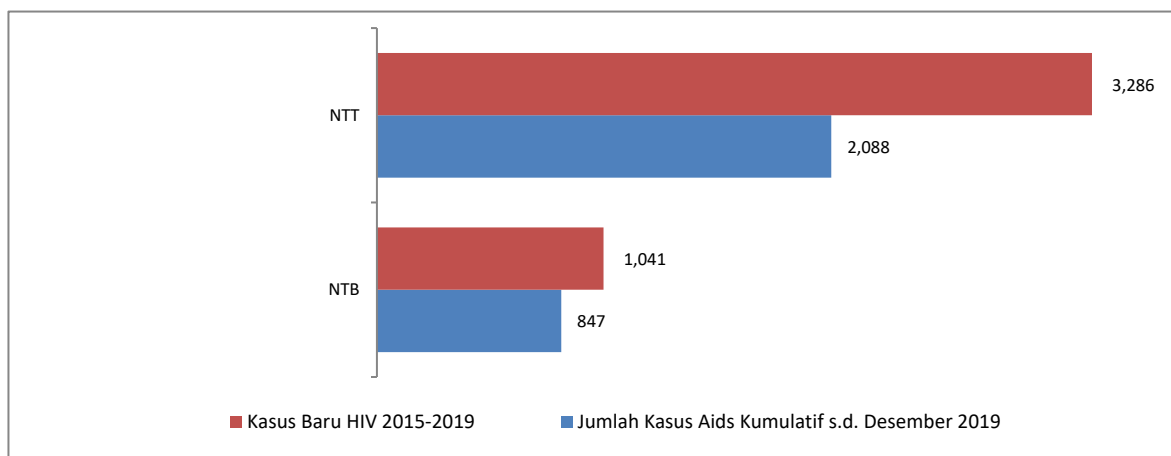


Penyakit menular HIV/AIDS, merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi *Human Immunodeficiency Virus* yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dulu dinyatakan sebagai HIV positif. Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat diketahui melalui layanan konseling dan tes HIV baik secara sukarela (Konseling dan Tes Sukarela/KTS) maupun atas dasar Tes atas Inisiatif Pemberi layanan kesehatan dan Konseling (TIPK). Sedangkan prevalensi HIV pada suatu populasi tertentu dapat diketahui melalui metode sero survey, dan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP).

Jumlah kasus baru HIV kumulatif yang dilaporkan pada periode 2015-2019 antarprovinsi di wilayah Nusa Tenggara mencapai 4.327 kasus, dan untuk jumlah kasus AIDS kumulatif sampai dengan bulan Desember 2019 sebanyak 2.935 kasus. Kasus baru HIV kumulatif antara periode 2015-2019 tertinggi di Provinsi NTT sebanyak 3.286 kasus, dan untuk kasus baru AIDS hingga Desember 2019 sebanyak 2.088 kasus. Di Provinsi NTB jumlah kasus baru HIV kumulatif antara periode 2015-2019 mencapai 1.041 kasus, sedangkan untuk kasus baru AIDS mencapai 847 kasus.

Gambar 27 :

Kasus baru HIV dan AIDS Komulatif Antarprovinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2019



Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2015-2019, Kemenkes.

Berdasarkan perkembangannya, kasus baru AIDS di Provinsi NTB menunjukkan penurunan dari periode 2017-2019, namun untuk kasus HIV menunjukkan peningkatan selama periode 2015-2019. Di Provinsi NTT, kasus baru AIDS cenderung fluktuatif dan menunjukkan penurunan pada periode 2018-2019, sedangkan untuk kasus baru HIV menunjukkan peningkatan selama periode 2015-2019.

Tabel 25 :

Perkembangan Kasus Baru HIV dan AIDS Tahun 2014 – 2018 di Wilayah Nusa Tenggara

Provinsi	Kasus Baru Aids					Jumlah Kumulatif sd. Des '19	Kasus Baru HIV					Periode '15-'19
	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
Nusa Tenggara Barat	91	75	93	27	34	847	194	175	222	192	258	1.041
Nusa Tenggara Timur	-	27	11	94	29	2.088	299	487	837	842	821	3.286
NUSA TENGGARA	91	102	104	121	63	2.935	493	662	1.059	1.034	1.079	4.327

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2015-2019, Kemenkes.

3.2.4. Pelayanan Kesehatan

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Pada periode 2015-2019 jumlah puskesmas di wilayah Nusa Tenggara semakin meningkat, dengan rasio puskesmas terhadap kecamatan pada tahun 2019 sebesar 1,34. Hal ini menggambarkan bahwa rasio ideal puskesmas terhadap kecamatan minimal 1 puskesmas secara kuantitas sudah terpenuhi. Namun demikian, perlu diperhatikan terkait aksesibilitas masyarakat dalam menjangkau puskesmas yang dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya kondisi geografis, luas wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana dasar, dan kemajuan suatu daerah.

Jumlah puskesmas pada tahun 2019, di Provinsi NTT mencapai 402 puskesmas dengan rasio dengan kecamatan mencapai 1,30, sedangkan di Provinsi NTB terdapat 169 puskesmas, dengan rasio sebesar 1,44.

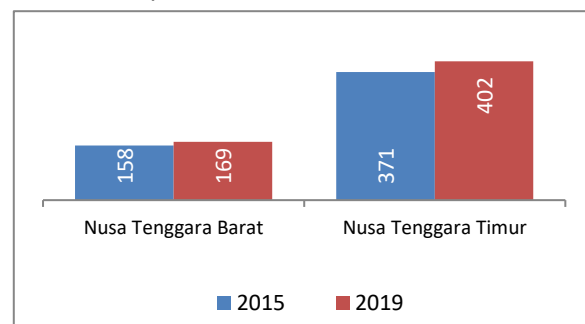
Tabel 26 :

Jumlah Puskesmas dan Rasio dengan Kecamatan Antarprovinsi Tahun 2015 dan 2019

Provinsi	Jml Kec.	Jumlah Puskesmas		Rasio Th. 2019
		2015	2019	
Nusa Tenggara Barat	117	158	169	1,44
Nusa Tenggara Timur	309	371	402	1,30
NUSA TENGGARA	426	529	571	1,34

Gambar 28 :

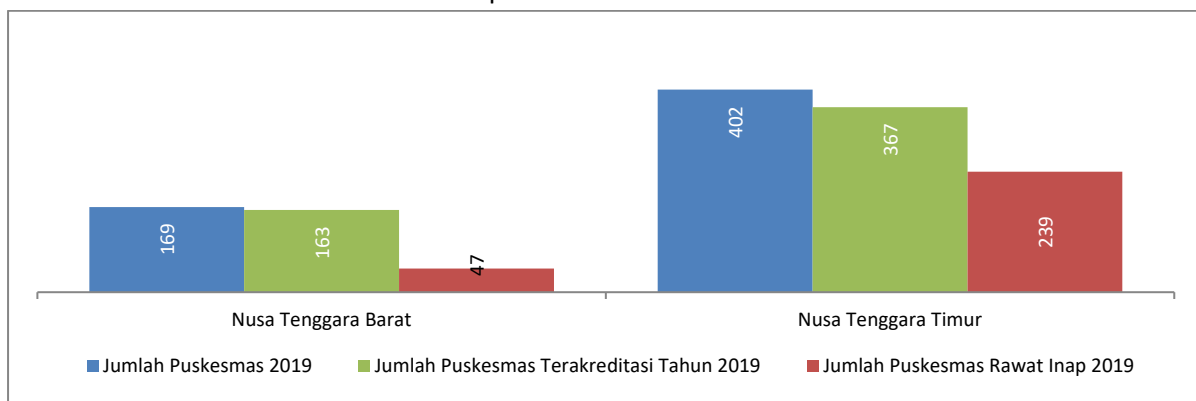
Perkembangan Jumlah Puskesmas Antarprovinsi Tahun 2015 dan 2019



Sumber: Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2015-2019, Kemenkes

Gambar 29 :

Jumlah Puskesmas Rawat Inap dan Terakreditasi menurut Provinsi Tahun 2019



Berdasarkan jumlah puskesmas terakreditasi dan ketersediaan fasilitas rawat inap, puskesmas di wilayah Nusa Tenggara masing-masing sudah mencapai 530 puskesmas (92,82%) dan 286 puskesmas (50,09%). Distribusi antarprovinsi untuk puskesmas terakreditasi dan memiliki rawat inap terbanyak terdapat di Provinsi NTT masing-masing sebanyak 367 (91,29%) dan 239 puskesmas (59,45%). Sedangkan di Provinsi NTB sebanyak 47 puskesmas (27,81%) memiliki rawat inap, dan 163 puskesmas (96,45%) sudah terakreditasi.



Tabel 27 :

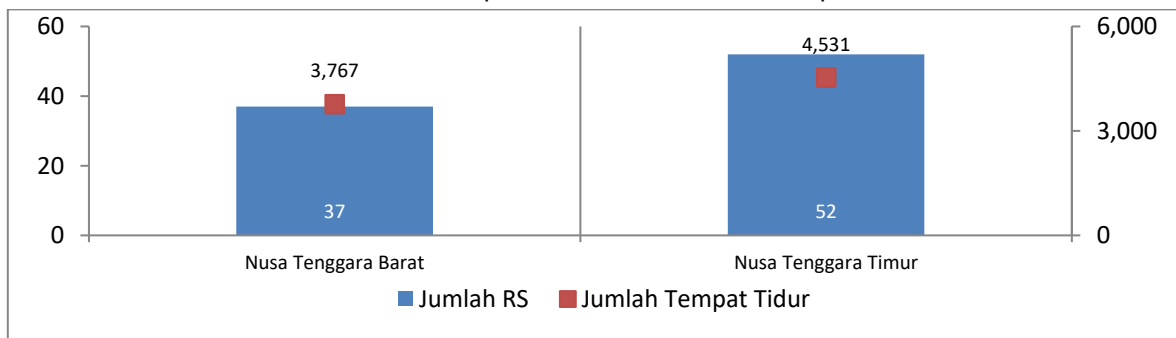
Jumlah dan Persentase Puskesmas Rawat Inap dan Terakreditasi menurut Provinsi tahun 2019.

Provinsi	Jumlah Puskesmas	Jumlah Puskesmas Rawat Inap		Jumlah Puskesmas Terakreditasi	
		Jumlah	%	Jumlah	%
Nusa Tenggara Barat	169	47	27,81	163	96,45
Nusa Tenggara Timur	402	239	59,45	367	91,29
NUSA TENGGARA	571	286	50,09	530	92,82

Rumah Sakit. Rumah Sakit di wilayah Nusa Tenggara pada periode 2015-2019 mengalami peningkatan sebanyak 17 rumah sakit (RS) dan 266 tempat tidur. Distribusi rumah sakit dan tempat tidur pada tahun 2019, terbanyak terdapat di Provinsi NTT yakni sebanyak 52 RS dan 4.531 tempat tidur. Sementara, rumah sakit di provinsi NTB yakni sebanyak 37 rumah sakit dan 3.767 tempat tidur.

Gambar 30 :

Jumlah Rumah Sakit dan Tempat Tidur Rumah Sakit Antarprovinsi Tahun 2019



Berdasarkan standar WHO adalah 1 tempat tidur untuk 1.000 penduduk. Dengan demikian, Provinsi NTB dan NTT masih belum memenuhi standar (rasio di bawah 1). Perkembangan rasio tidur untuk 1.000 penduduk selama periode 2015-2019 di Provinsi NTB menunjukkan peningkatan sebesar 0,01, sedangkan di Provinsi NTT menunjukkan penurunan sebesar (-0,02). Lihat Tabel 28.

Tabel 28 :

Jumlah Rumah Sakit dan Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk

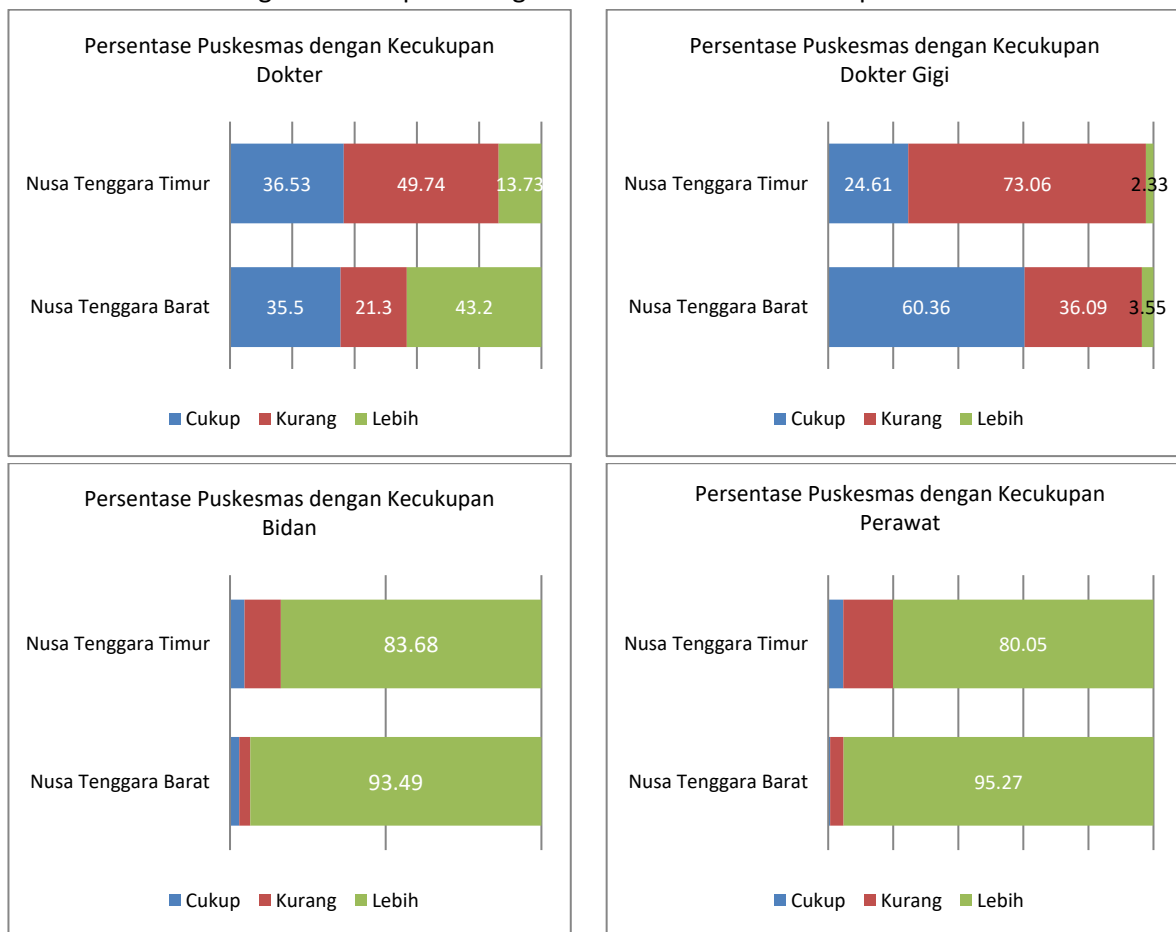
Provinsi	2015			2019			Δ (2015 - 2019)		
	RS	Tempat Tidur		RS	Tempat Tidur		RS	Tempat Tidur	
		Jumlah	Rasio		Jumlah	Rasio		Jumlah	Rasio
Nusa Tenggara Barat	28	3.508	0,73	37	3.767	0,74	9	259	0,01
Nusa Tenggara Timur	44	4.524	0,88	52	4.531	0,83	8	7	-0,05
NUSA TENGGARA	72	8.032	0,805	89	8298	0,785	17	266	-0,02

Kecukupan Tenaga Medis di Puskesmas. Kecukupan tenaga kesehatan di puskesmas diatur berdasarkan Permenkes, yaitu pada puskesmas non rawat inap minimal jumlah dokter adalah satu orang, sedangkan pada puskesmas rawat inap minimal jumlah dokter dua orang, baik pada wilayah perkotaan, perdesaan, maupun kawasan terpencil dan sangat terpencil.

Berdasarkan gambaran tingkat kecukupan tersebut, proporsi puskesmas dengan kecukupan bidan dan perawat di Provinsi NTB dan NTT telah menunjukkan kategori lebih, terutama di Provinsi NTB masing-masing dengan persentase kecukupan bidan (93,49%) dan perawat (95,27%). Untuk kecukupan dokter, Provinsi NTT menunjukkan persentase tertinggi untuk puskesmas kurang dokter (49,74%) dan kurang dokter gigi (73,06%). Sementara itu, di Provinsi NTB relatif lebih baik dengan persentase kurang dokter sebanyak 21,3 persen dan kurang dokter gigi (36,09%)

Gambar 31 :

Gambaran Tingkat Kecukupan Tenaga Medis di Puskesmas Antarprovinsi Tahun 2019



3.3. Ekonomi Masyarakat

Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Riil Yang Disesuaikan. Kondisi ekonomi masyarakat di antaranya dapat didekati dengan perhitungan standar hidup layak yang menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya perekonomian. BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (purchasing power parity) berbasis formula Rao, dan menjadi komponen dalam perhitungan IPM.

Gambaran dari standar hidup layak masyarakat wilayah Nusa Tenggara selama periode 2015-2019 berdasarkan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan menunjukkan tren peningkatan, dengan rata-rata pengeluaran per kapita pada tahun 2019 di Provinsi NTB menunjukkan nilai tertinggi yakni sebesar Rp. 886.667,- sedangkan di Provinsi NTT sebesar Rp. 647.417,-. Berdasarkan peningkatannya selama periode 2015-2019, di Provinsi NTB meningkat sebesar Rp. 116,583,- (15,14%), sedangkan di provinsi NTT meningkat sebesar Rp. 63,833,- (10,94%).



Tabel 29 :

Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan Disesuaikan Antarprovinsi Tahun 2015-2019

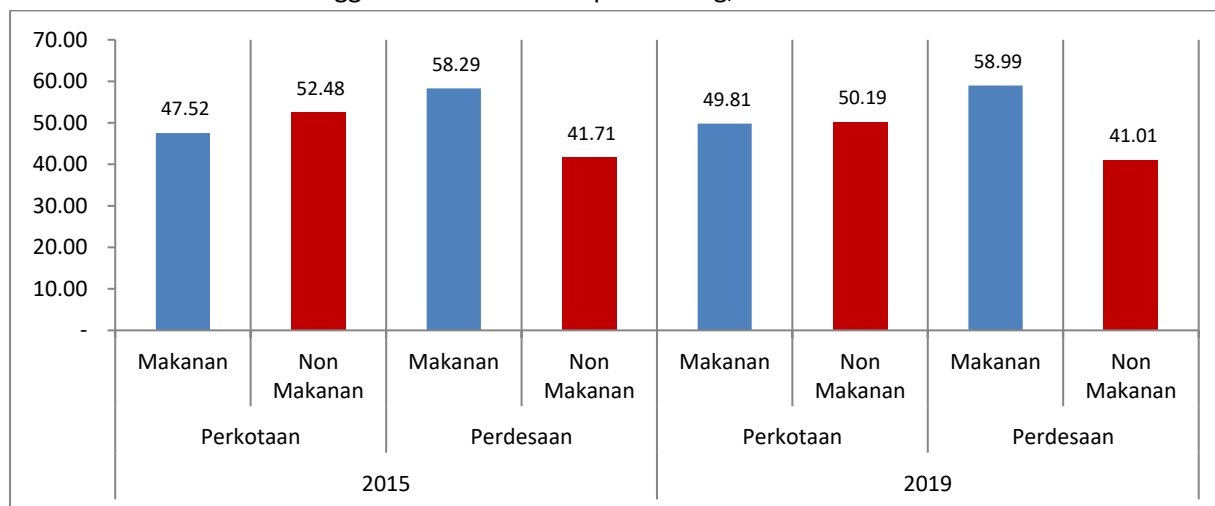
Provinsi	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp./Bulan)						Pertumbuhan 2015-2019 (%)
	2015	2016	2017	2018	2019	Δ (2019-2015)	
Nusa Tenggara Barat	770.083	797.917	823.083	857.000	886.667	116.583	15,14
Nusa Tenggara Timur	583.583	593.500	612.500	630.500	647.417	63.833	10,94
NUSA TENGGARA	676.833	695.708	717.792	743.750	767.042	90.208	13,33

Sumber: BPS, 2020

Rata-Rata Pengeluaran Untuk Konsumsi. Persentase pengeluaran untuk makanan akan menurun sejalan dengan meningkatnya pendapatan (Hukum Engel). Porsi pengeluaran pangan merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan. Porsi pengeluaran pangan semakin kecil, menggambarkan tingkat kesejahteraan yang makin membaik (Trisnowati,2013).

Gambar 32 :

Persentase Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Wilayah Nusa Tenggara menurut Kelompok Barang, Tahun 2015 dan 2019



Sumber: Susenas, BPS.

Pada tahun 2015 dan tahun 2019, rata-rata pengeluaran per kapita/bulan masyarakat di perdesaan seluruh provinsi di wilayah Nusa Tenggara sebagian besar untuk makanan, bahkan menunjukkan peningkatan persentase sebesar 0,70 persen untuk makanan di tahun 2019. Sementara itu, untuk persentase rata-rata pengeluaran per kapita/bulan masyarakat di perkotaan sebagian besar untuk bukan makanan, walaupun menunjukkan penurunan sebesar 2,29 persen dibanding tahun 2015. Berdasarkan gambaran perubahan persentase pengeluaran per kapita/bulan antar tahun 2015 dan 2019, menunjukkan porsi pengeluaran untuk makanan cenderung meningkat, artinya hal ini mengindikasikan adanya sedikit penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Perubahan persentase pengeluaran untuk makanan antarprovinsi selama antar tahun 2015 dan tahun 2019, peningkatan persentase untuk makanan yang diikuti oleh penurunan persentase untuk bukan makanan di perkotaan terjadi di Provinsi NTT dan NTB, kecuali di perdesaan NTB menunjukkan penurunan persentase makanan sebesar (-1,71%) dan diikuti peningkatan persentase bukan makanan. Perubahan peningkatan persentase makanan tertinggi terdapat di Provinsi NTT sebesar 4,52 persen, yang diikuti oleh penurunan persentase bukan makanan.

Tabel 30 :
 Persentase Pengeluaran per Kapita/Bulan untuk Makanan dan Bukan Makanan
 di Perdesaan/ Perkotaan Antarprovinsi Tahun 2015 dan 2019

Provinsi	2015				2019				Δ (2019-2015)			
	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan		Perdesaan	
	Makanan	Bukan Makanan	Makanan	Bukan Makanan	Makanan	Bukan Makanan	Makanan	Bukan Makanan	Makanan	Bukan Makanan	Makanan	Bukan Makanan
Nusa Tenggara Barat	49,43	50,57	56,47	43,53	50,66	49,34	54,76	45,24	1,23	-1,23	-1,71	1,71
Nusa Tenggara Timur	45,86	54,14	60,74	39,26	48,95	51,05	65,26	34,74	3,09	-3,09	4,52	-4,52
NUSA TENGARA	47,52	52,48	58,29	41,71	49,81	50,19	58,99	41,01	2,29	-2,29	0,70	-0,70

Sumber: Susenas, BPS.



PEREKONOMIAN DAERAH

- ❖ Perekonomian wilayah Nusa Tenggara dari sisi lapangan Usaha didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor perdagangan besar dan eceran, dan sektor konstruksi dengan total kontribusi sekitar 57,8 persen. Sektor pertambangan dan penggalian berkontribusi cukup besar (18,14 %) terhadap perekonomian Nusa Tenggara Barat atau kedua setelah sektor pertanian.
- ❖ Dari sisi pengeluaran didominasi oleh konsumsi rumah tangga (rata-rata 67,23 %), investasi/PMTB (rata-rata 40,52 %), dan Pengeluaran pemerintah (rata-rata 20,44 %).
- ❖ Peran ekonomi Nusa Tenggara 2015-2020 Triwulan II terhadap perekonomian nasional rata-rata sebesar 1,53 persen dan cenderung menurun.
- ❖ PDRB Per kapita Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur masih di bawah rata-rata PDRB per kapita 34 provinsi.
- ❖ Perkembangan nilai realisasi PMDN dalam lima tahun terakhir cenderung meningkat dengan proporsi rata-rata 1,76 persen terhadap total PMDN nasional. Sementara untuk perkembangan nilai PMA tahun 2015 hingga 2017 menunjukkan penurunan yang cukup tajam, namun pada periode 2017 hingga 2019 menunjukkan peningkatan. Nilai proporsi PMA Nusa Tenggara rata-rata sebesar 1,56 persen dari total nilai PMA nasional.
- ❖ Perdagangan wilayah Nusa Tenggara 2015-2019 mengalami penurunan dan didominasi oleh perdagangan non-migas rata-rata mencapai 94,84 persen. Perdagangan non-migas terbesar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 91 persen, sementara perdagangan migas terbesar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu mencapai 74 persen. Sementara impor migas terbesar di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
- ❖ Pada tahun 2019 jumlah kunjungan tamu asing di wilayah Nusa Tenggara mencapai 604 ribu orang dengan pertumbuhan rata-rata pertahunnya sebesar 22,5 persen dengan share 4,15% dari total Indonesia. Sementara untuk perkembangan jumlah tamu domestik tahun 2019 mencapai 2,4 juta orang, naik jika dibandingkan dengan tahun 2018 dengan pertumbuhan rata-rata 2015-2019 sebesar 17,3 persen per tahun
- ❖ Tingkat hunian kamar pada hotel berbintang di wilayah Nusa Tenggara dalam satu tahun terakhir mengalami penurunan. Pada bulan April 2020 tingkat hunian kamar pada hotel berbintang wilayah Nusa Tenggara sebesar 9,8 poin, menurun dari tahun sebelumnya yaitu pada bulan April 2019 sebesar 47,1 poin, namun di bulan oktober 2020 sudah mulai menunjukkan adanya peningkatan.
- ❖ Jumlah IMK pada tahun 2019 terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 140.163 unit, dan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 108.481 unit.
- ❖ Rasio kemandirian daerah antarprovinsi pada periode 2015-2019 di Provinsi NTB dan NTT menunjukkan tren menurun, dengan penurunan tertinggi di Provinsi NTB sebesar (-0,88%), dan NTT sebesar (-0,17%)
- ❖ Kapasitas fiskal di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan perkembangan yang konstan tidak ada perubahan dengan kategori rendah selama periode 2015-2017. Sementara di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan tren konstan dengan kategori rendah selama periode 2015-2018, dan menurun menjadi kategori sangat rendah di tahun 2019.



4.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Peran dan Struktur Ekonomi Nusa Tenggara. Nilai PDRB wilayah Nusa Tenggara tahun 2015 berdasarkan harga belaku sebesar Rp. 181,8 triliun meningkat menjadi Rp. 239,6 pada tahun 2019, dan berdasarkan harga konstan (2015) sebesar Rp. 146,1 triliun meningkat menjadi Rp. 163,4 triliun pada tahun 2019. PDRB terbesar di wilayah Nusa Tenggara terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp. 132,7 triliun dan Nilai PDRB Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 106,9 triliun (**Tabel 31**).

Kontribusi perekonomian Nusa Tenggara selama periode 2015-2020 triwulan I terhadap pembentukan PDB nasional rata-rata sebesar 1,53 persen, dengan kecenderungan menurun dari tahun 2015-2019 (**Tabel 32**). Kontribusi terbesar perekonomian Nusa Tenggara berasal dari Nusa Tenggara Barat dengan rata-rata kontribusi sebesar 56,79 persen, sementara kontribusi Provinsi terhadap PDB nasional NTB rata-rata berkontribusi sebesar 0,87 persen dan NTT sebesar 0,66 persen (**Tabel 33**).

Tabel 31 :

Nilai PDRB ADHB dan ADHK Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2020, (Rp. Triliun)

Provinsi	Nilai ADHB						Nilai ADHK					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nusa Tenggara Barat	105,7	116,5	123,8	124,0	132,7	65,7	89,3	94,5	94,6	90,4	94,0	46,1
Nusa Tenggara Timur	76,1	83,7	90,8	99,1	106,9	52,0	56,8	59,7	62,7	65,9	69,4	33,7
NUSA TENGGARA	181,8	200,2	214,6	223,1	239,6	117,7	146,1	154,2	157,3	156,3	163,4	79,7

Sumber: PDRB Provinsi 2015-2020, BPS

Tabel 32:

Peran Ekonomi di Wilayah Nusa Tenggara terhadap Perekonomian Nasional ADHB Tahun 2015-2020, (dalam persen)

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020_Tr II	Rata-Rata
Nusa Tenggara Barat	0,91	0,92	0,90	0,83	0,83	0,84	0,87
Nusa Tenggara Timur	0,65	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
NUSA TENGGARA	1,56	1,59	1,56	1,49	1,49	1,50	1,53

Sumber: PDRB Provinsi 2015-2020, BPS



Tabel 33:

Peran Ekonomi Provinsi terhadap Perekonomian di Wilayah Nusa Tenggara ADHB
Tahun 2015-2020, (dalam persen)

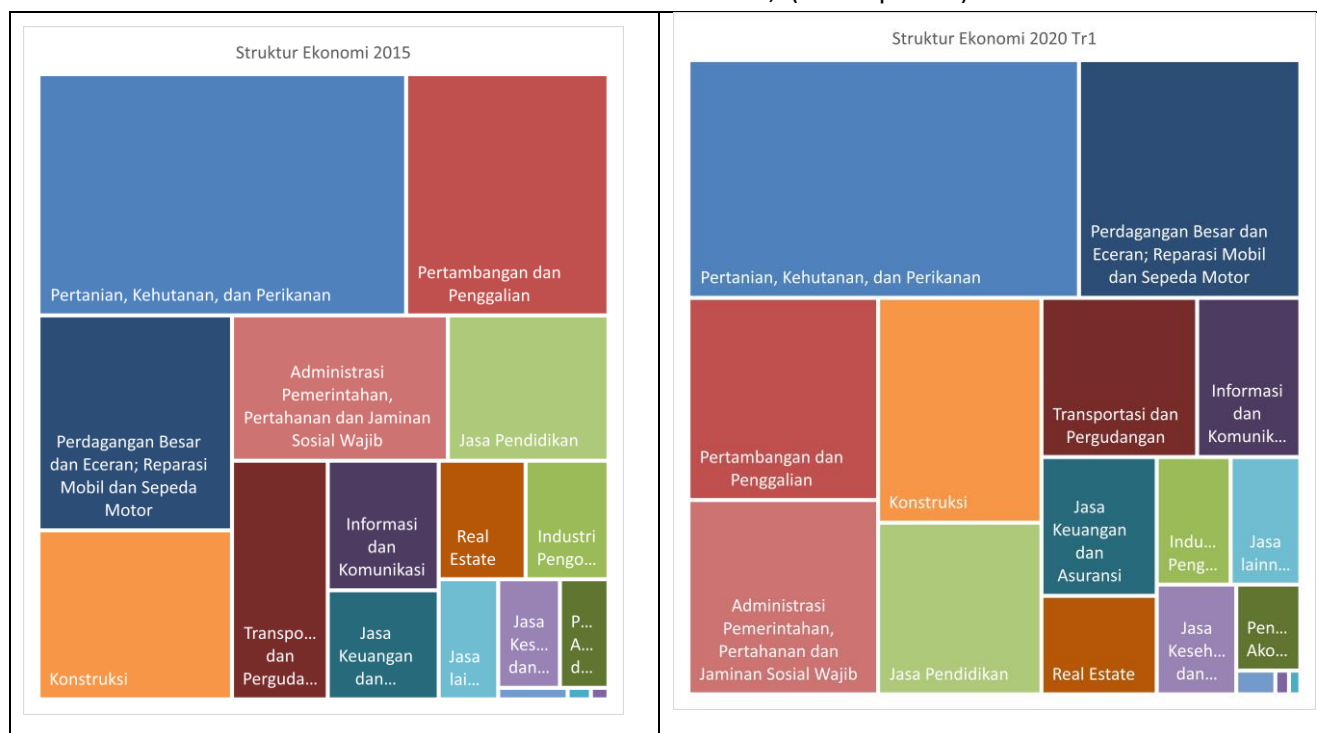
Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020_Tr II	Rata-rata
Nusa Tenggara Barat	58,13	58,17	57,70	55,58	55,38	55,81	56,79
Nusa Tenggara Timur	41,87	41,83	42,30	44,42	44,62	44,19	43,21

Sumber: PDRB Provinsi 2015-2020, BPS

Struktur perekonomian wilayah Nusa Tenggara sebagian besar disumbang dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor konstruksi. Keempat sektor tersebut berkontribusi sekitar 57,8 persen tahun 2019 (**Gambar 34**). Sementara untuk struktur perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat terbesar disumbang dari sektor pertambangan, sektor pertanian, sektor perdagangan besar dan eceran, dan sektor konstruksi, sedangkan sumbangan ekonomi Nusa Tenggara Timur dari sektor pertanian, sektor adm. Pemerintahan, sektor perdagangan besar dan eceran, dan sektor konstruksi (**Gambar 35**).

Gambar 33:

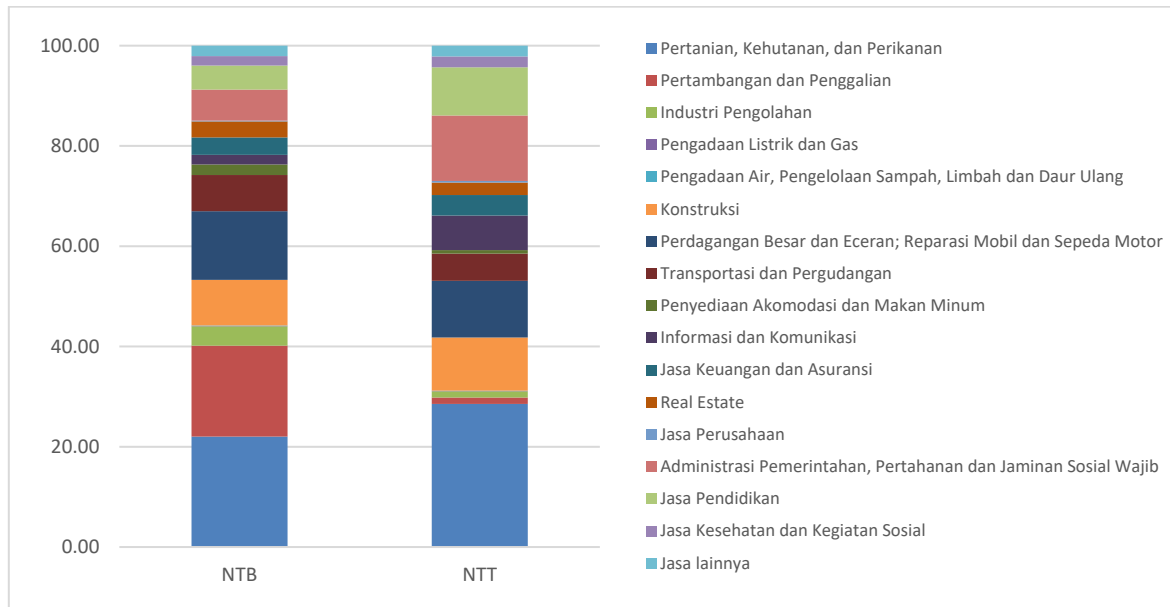
Perkembangan Struktur Perekonomian di Wilayah Nusa Tenggara ADHB
Tahun 2015 dan 2020 Triwulan 1, (dalam persen)



Sumber: PDRB Lapangan Usaha Provinsi 2015-2020, BPS

Gambar 34:

Struktur Perekonomian Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara ADHB Tahun 2015-2020, (rata-rata dalam persen)



Sumber: PDRB Lapangan Usaha Provinsi 2015-2020, BPS

PDRB Per kapita, Perkembangan PDRB per kapita provinsi di wilayah Nusa Tenggara selama periode 2015-2019 rata-rata mengalami peningkatan, kecuali di Nusa Tenggara Barat tumbuh negatif di tahun 2017 dan 2018 (**Tabel 34**). Perbandingan PDRB per kapita antarprovinsi, menunjukkan adanya gap (ketimpangan) yang cukup tinggi antarwilayah, hal ini ditunjukkan dengan PDRB per kapita tertinggi mencapai Rp. 26.166 ribu per jiwa di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan PDRB per kapita Nusa Tenggara Timur hanya mencapai Rp. 19.591 ribu jiwa (**Tabel 35**).

Tabel 34:

Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK (2010) menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2016-2019, (persen)

Provinsi	2016	2017	2018*	2019**
Nusa Tenggara Barat	4,50	-1,11	-5,56	2,85
Nusa Tenggara Timur	3,44	3,44	3,49	3,56

Sumber: PDRB 2019, BPS

Tabel 35:

Perkembangan PDRB per Kapita ADHB menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2019, (Rp. ribu/jiwa)

Provinsi	ADHK					ADHB				
	2015	2016	2017	2018*	2019**	2015	2016	2017	2018*	2019**
Nusa Tenggara Barat	18.475	19.306	19.091	18.029	18.542	21.852	23.787	24.987	24.726	26.166
Nusa Tenggara Timur	11.088	11.469	11.863	12.277	12.714	14.867	16.094	17.165	18.448	19.591

Sumber: PDRB 2019, BPS

PDRB Pengeluaran, pertumbuhan ekonomi wilayah Nusa Tenggara dari sisi pengeluaran selama periode 2015-2020 Triwulan I terjadi pada hampir semua komponen tumbuh positif, kecuali komponen ekspor tumbuh negatif di tahun 2017 hingga tahun 2020 Triwulan I, dan impor luar negeri tumbuh negatif di tahun 2017 dan 2019. Pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran tahun 2020



triwulan I seiring dengan kondisi pandemi Covid-19, pertumbuhan komponen pengeluaran rata-rata mengalami perlambatan, terutama untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT berkontraksi di angka -4,02 persen, komponen ekspor berkontraksi di angka -10,27 persen, sebaliknya untuk komponen impor dan perubahan inventori meningkat cukup tajam, masing-masing tumbuh sebesar 14,88 persen dan 12,95 persen (**Tabel 36**).

Tabel 36:
Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran ADHB (Tahun 2010) di Wilayah Nusa Tenggara
Tahun 2015-2020 Triwulan I, (persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Tr1	Rata-rata
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,10	2,81	3,15	3,24	4,18	3,62	3,52
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,60	2,13	6,59	10,01	4,71	(4,02)	4,00
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,84	0,77	3,46	4,80	2,26	2,48	3,10
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	11,74	11,90	4,61	4,80	5,23	0,60	6,48
5. Perubahan Inventori	(24,72)	(24,71)	9,75	16,47	3,04	12,95	1,20)
6. Ekspor Luar Negeri	241,23	14,54	(26,14)	(47,84)	(37,44)	(10,27)	22,35
7. Impor Luar Negeri	14,06	(9,47)	30,03	26,77	(22,12)	14,88	9,03
8. Net Ekspor Antar Daerah	7,76	7,27	(4,03)	2,27	(0,59)	(2,21)	1,75

Sumber: PDRB Pengeluaran, BPS 2020

Sumber utama pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara periode 2015-2020 Triwulan I tertinggi berasal dari komponen konsumsi rumah tangga memberikan andil rata-rata sebesar 2,54 persen, diikuti komponen PMTB rata-rata sebesar 2,34 persen, sementara untuk komponen lain yang memberikan andil cukup besar terhadap pertumbuhan adalah komponen konsumsi pemerintah dengan andil rata-rata 0,58 persen (**Tabel 37**). Sementara sumber pertumbuhan utama Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur terbesar dari komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, PMTB, dan konsumsi pemerintah (**Tabel 38**).

Tabel 37:
Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran ADHK (Tahun 2010) di Wilayah Nusa Tenggara
Tahun 2015-2020 Triwulan I, (persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Tr1	Rata-rata
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,02	1,88	2,05	2,14	2,86	2,54	2,42
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,11	0,05	0,14	0,22	0,12	(0,11)	0,09
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,01	0,15	0,63	0,89	0,44	0,37	0,58
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,16	4,11	1,69	1,80	2,07	0,23	2,34
5. Perubahan Inventori	(0,23)	(0,15)	0,04	0,08	0,02	0,07	(0,03)
6. Ekspor Luar Negeri	9,57	1,72	(3,35)	(4,44)	(1,82)	(0,31)	0,23
7. Impor Luar Negeri	0,29	(0,20)	0,53	0,61	(0,64)	0,37	0,16
8. Net Ekspor Antar Daerah	(2,74)	(2,41)	1,36	(0,72)	0,19	0,61	(0,62)
PDRB	14,61	5,54	2,03	(0,63)	4,51	3,04	4,85

Sumber: PDRB Pengeluaran, BPS 2020

Tabel 38:

Pertumbuhan PDRB Pengeluaran ADHK (Tahun 2010) Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2020 Triwulan I, (rata-rata persen)

Komponen Pengeluaran	NTB	NTT
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,47	4,74
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,03	4,00
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,44	3,53
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,86	7,14
5. Perubahan Inventori	1,12	4,58
6. Ekspor Luar Negeri	30,29	(3,94)
7. Impor Luar Negeri	4,39	66,83
8. Net Ekspor Antar Daerah	(5,90)	5,15

Sumber: PDRB Pengeluaran, BPS 2020

Tabel 39:

Sumber Pertumbuhan PDRB Pengeluaran ADHK (Tahun 2010) Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2020 Triwulan I, (rata-rata persen)

Komponen Pengeluaran	NTB	NTT
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,55	3,68
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,05	0,14
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,32	0,96
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,80	3,18
5. Perubahan Inventori	(0,02)	(0,04)
6. Ekspor Luar Negeri	0,52	(0,06)
7. Impor Luar Negeri	0,10	0,27
8. Net Ekspor Antar Daerah	0,94	(2,87)

Sumber: PDRB Pengeluaran, BPS 2020

Struktur perekonomian Nusa Tenggara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar berasal dari komponen pengeluaran rumah tangga rata-rata sebesar 67,23 persen, diikuti komponen pengeluaran PMTB rata-rata sebesar 40,52 persen, dan komponen konsumsi pemerintah rata-rata sebesar 20,44 persen (**Tabel 40**). Hal yang sama untuk struktur perekonomian provinsi, komponen terbesar di sumbang dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, PMTB, konsumsi pemerintah, dan komponen ekspor luar negeri menyumbang cukup besar di Nusa Tenggara Barat (**Tabel 41**).

Tabel 40:

Share PDRB menurut Pengeluaran ADHB (Tahun 2010) Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2020 Triwulan I, (persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Tr I	Rata-rata
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	67,59	66,02	65,97	67,38	67,02	69,41	67,23
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,23	2,14	2,20	2,40	2,41	2,37	2,29
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	21,43	20,86	20,96	22,08	21,14	16,18	20,44
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	36,92	40,38	40,74	42,34	42,51	40,26	40,52
5. Perubahan Inventori	0,73	0,71	0,73	0,79	0,76	0,81	0,76
6. Ekspor Luar Negeri	12,64	12,42	9,15	5,43	3,16	2,85	7,61
7. Impor Luar Negeri	2,31	2,01	2,35	3,14	2,27	2,80	2,48
8. Net Ekspor Antar Daerah	(39,23)	(40,52)	(37,40)	(37,28)	(34,71)	(29,08)	(36,37)

Sumber: PDRB Pengeluaran, BPS 2020



Tabel 41:

Share PDRB menurut Pengeluaran ADHB Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2020, (rata-rata persen)

Komponen Pengeluaran	NTB	NTT
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	62,52	73,48
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,54	3,28
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	15,49	26,98
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	36,68	45,61
5. Perubahan Inventori	0,70	0,83
6. Ekspor Luar Negeri	11,79	1,95
7. Impor Luar Negeri	3,55	1,07
8. Net Ekspor Antar Daerah	(25,17)	(51,06)

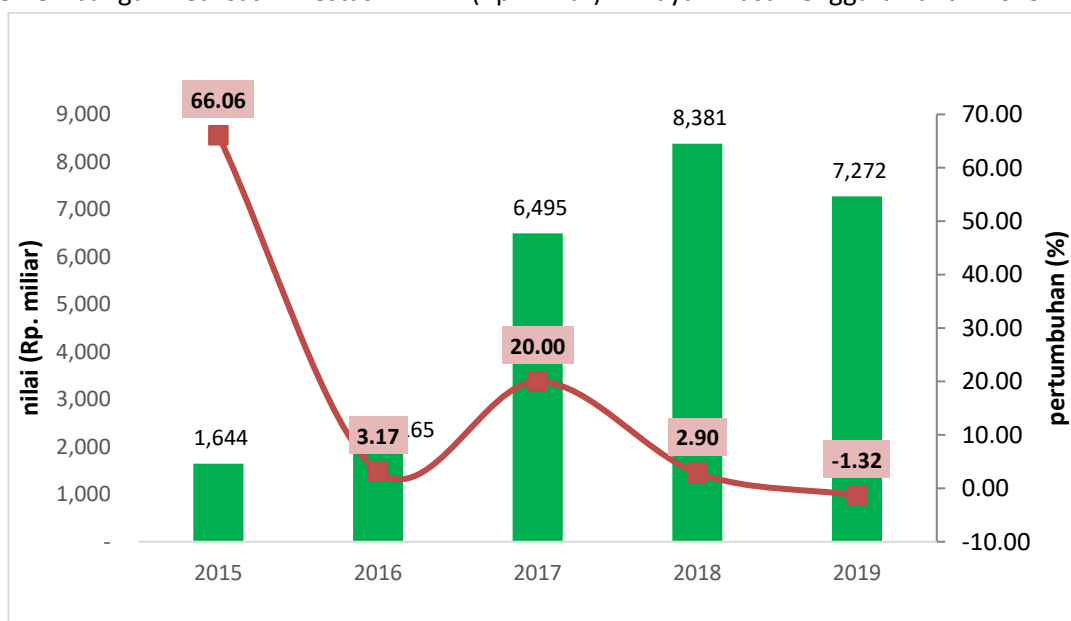
Sumber: PDRB Pengeluaran, BPS 2020

4.2. Investasi PMA dan PMDN

Investasi PMDN dan PMA. Nilai PMDN Nusa Tenggara Tahun 2019 mencapai 7.272 miliar rupiah atau rata-rata (2015-2019) sekitar 1,76 persen per tahun dari total realisasi PMDN nasional. Perkembangan realisasi investasi PMDN selama periode 2015-2019 menunjukkan peningkatan cukup tajam dalam empat tahun terakhir dengan pertumbuhan terbesar di tahun 2015 dan tahun 2017, yaitu masing-masing tumbuh sebesar 66,06 persen dan 20 persen (**Gambar 36**). Secara spasial penyebaran investasi PMDN di wilayah Nusa Tenggara selama periode 2015-2019 relatif merata, proporsi PMDN di Provinsi Nusa Tenggara Barat rata-rata sebesar 52,9 persen dan 47,1 persen di Provinsi Nusa Tenggara Timur (**Gambar 37**).

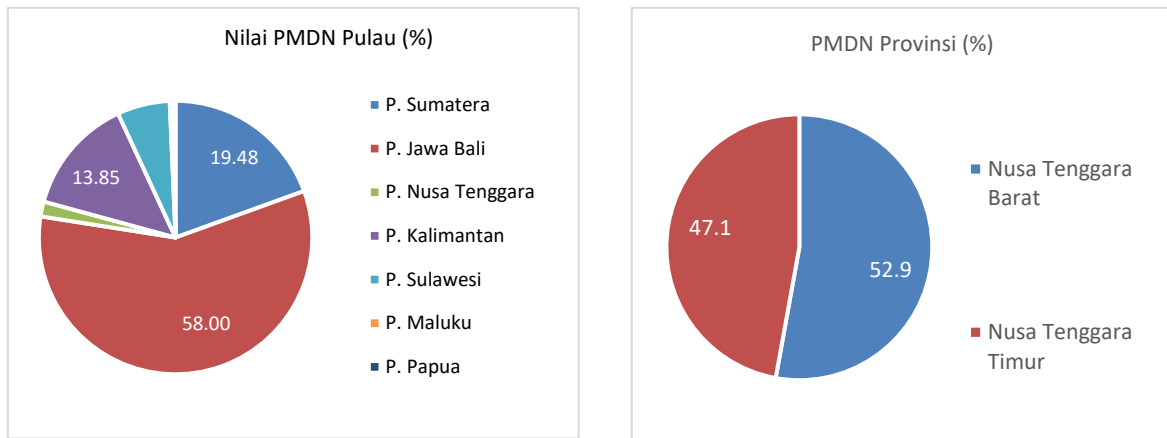
Gambar 35:

Perkembangan Realisasi Investasi PMDN (Rp. miliar) Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2019



Sumber: BKPM, Tahun 2019

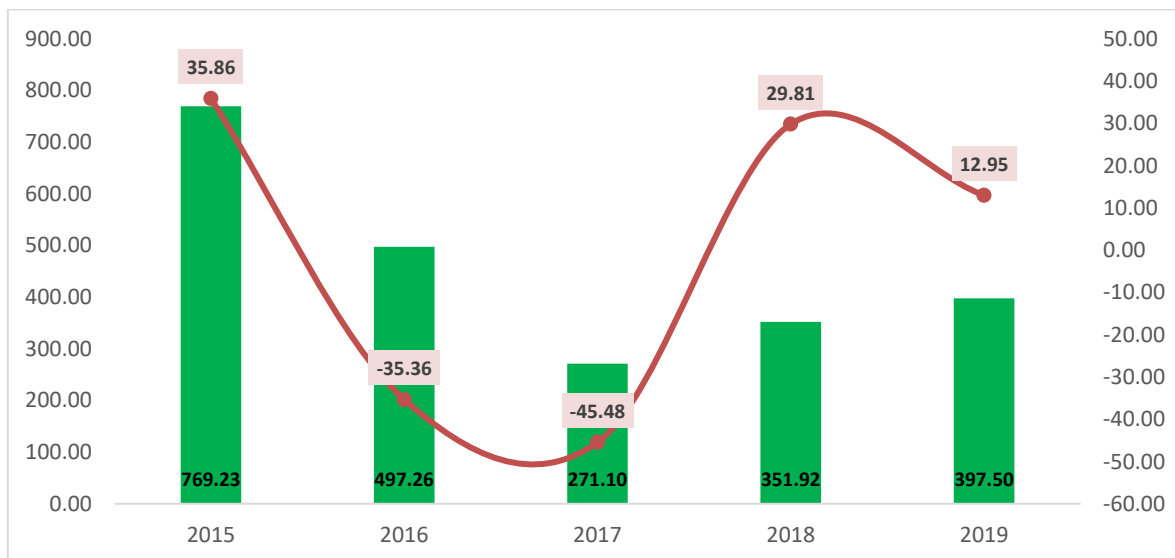
Gambar 36:
Distribusi Nilai Realisasi Investasi PMDN (%) menurut pulau dan Provinsi
Tahun 2015-2019



Sumber : BKPM, Tahun 2019

Nilai realisasi PMA Nusa Tenggara tahun 2019 mencapai 397,50 juta US\$ atau rata-rata (2015-2019) sekitar 1,56 persen per tahun dari total realisasi PMA nasional. Perkembangan realisasi investasi PMA selama periode 2015-2019 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, nilai realisasi PMA 2015-2017 mengalami penurunan, dan pada tiga tahun terakhir (2017-2019) nilai PMA kembali mengalami peningkatan dengan nilai PMA tahun 2019 tercatat sebesar 397,50 juta US\$ (**Gambar 38**). Secara spasial, proporsi nilai realisasi PMA Nusa Tenggara Barat tercatat rata-rata sebesar 73,5 persen dan Nusa Tenggara Timur rata-rata sebesar 26,5 persen (**Gambar 39**).

Gambar 37:
Perkembangan Realisasi Investasi PMA (juta US\$) Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2019

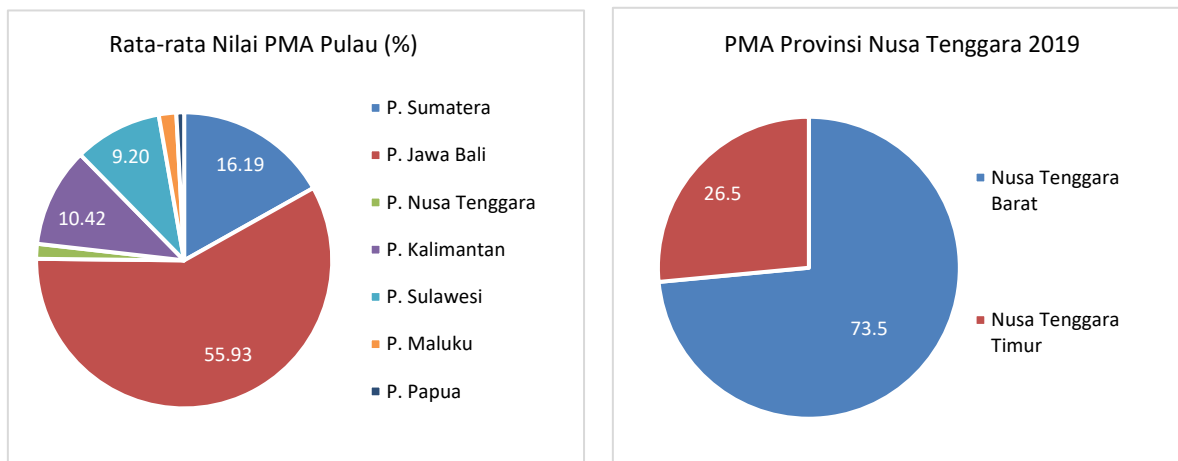


Sumber : BKPM, Tahun 2018



Gambar 38:

Distribusi Nilai Realisasi Investasi PMA (%) menurut Pulau dan Provinsi Tahun 2015-2019.



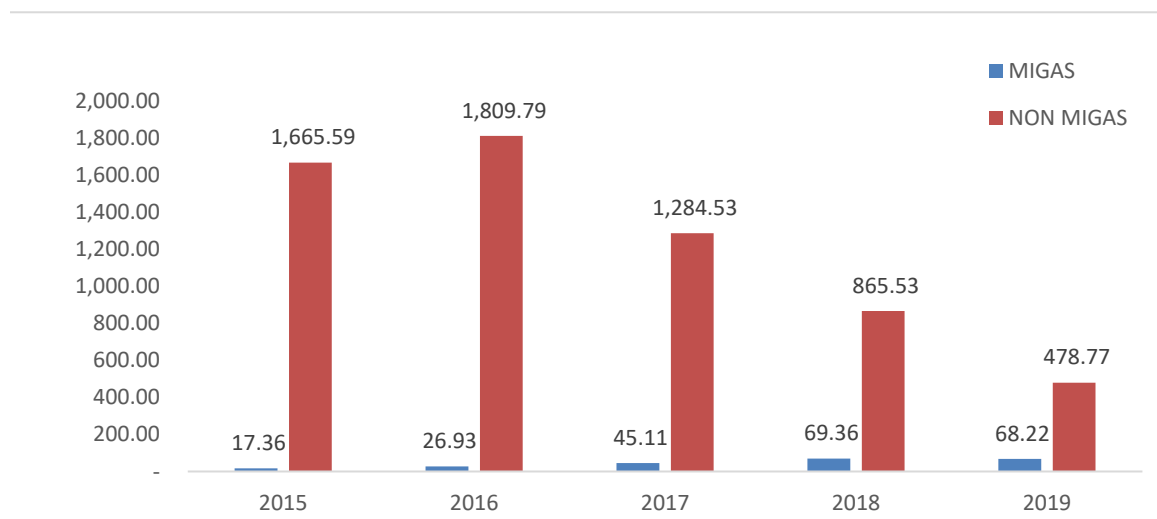
Sumber : BKPM, Tahun 2019

4.3. Ekspor dan Impor

Perdagangan Ekspor-Impor. Perkembangan perdagangan wilayah Nusa Tenggara selama periode 2015-2019 lebih didominasi perdagangan non-migas atau rata-rata mencapai 94,84 persen, dengan kecenderungan menurun. Nilai perdagangan non-migas tahun 2019 tercatat sebesar 478,77 juta US\$ mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sebaliknya untuk perkembangan nilai perdagangan migas cenderung meningkat, nilai migas tahun 2019 tercatat sebesar 68,22 juta US\$ (**Gambar 40**). Secara spasial perdagangan migas terbesar berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 74 persen dari total perdagangan migas Nusa Tenggara, dan non-migas terbesar dari Nusa Tenggara Barat yaitu mencapai 91 persen (**Gambar 41**).

Gambar 39:

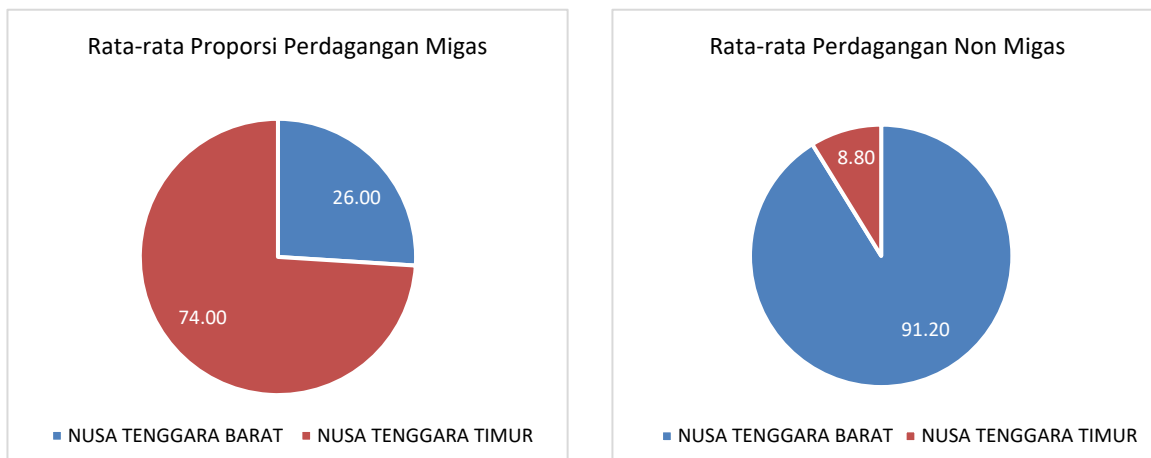
Perkembangan Perdagangan Migas dan Non-Migas Wilayah Nusa Tenggara dan Provinsi Tahun 2015-2019, (dalam juta US\$).



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan 2019

Gambar 40:

Perdagangan Migas dan Non Migas menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2019, (rata-rata dalam persen).

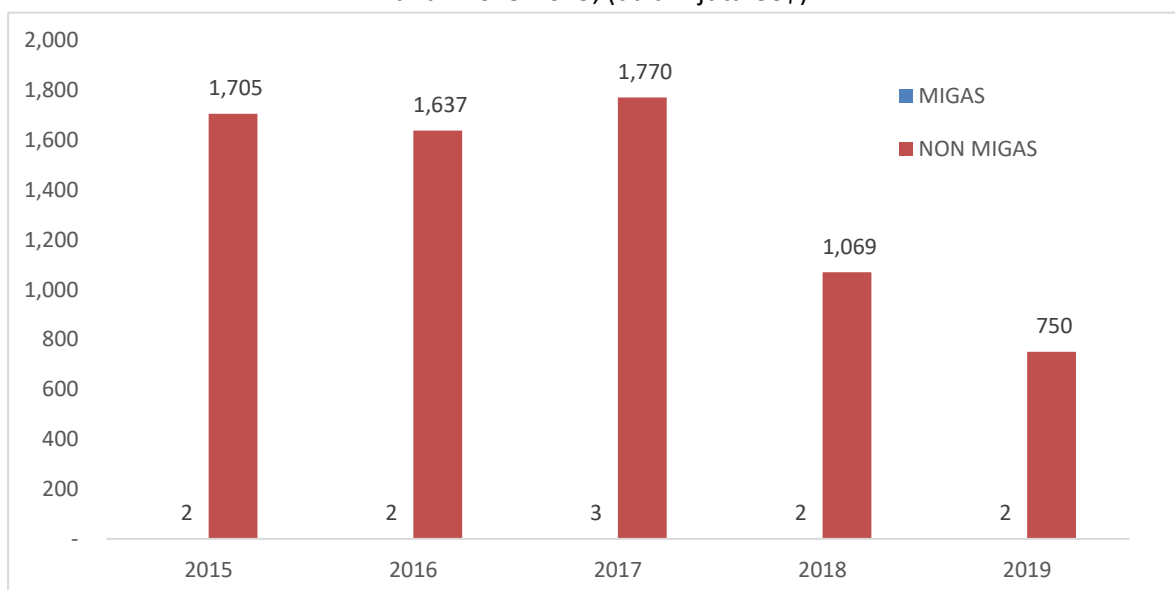


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan tahun 2019

Perkembangan nilai ekspor wilayah Nusa Tenggara 2019 didominasi dari ekspor non-migas yang rata-rata mencapai lebih dari 90 persen, dengan kecenderungan mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Nilai ekspor non-migas tahun 2019 tercatat sebesar 750 juta US\$ menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 1.069 juta US\$ (**Gambar 42**). Secara spasial rata-rata nilai ekspor non-migas terbesar dari Nusa Tenggara Timur, sebaliknya untuk nilai non-migas terbesar dari Nusa Tenggara Barat rata-rata sebesar 64,08 persen per tahun (**Gambar 43**).

Gambar 41:

Perkembangan Nilai Ekspor Migas dan Non Migas Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2019, (dalam juta US\$)

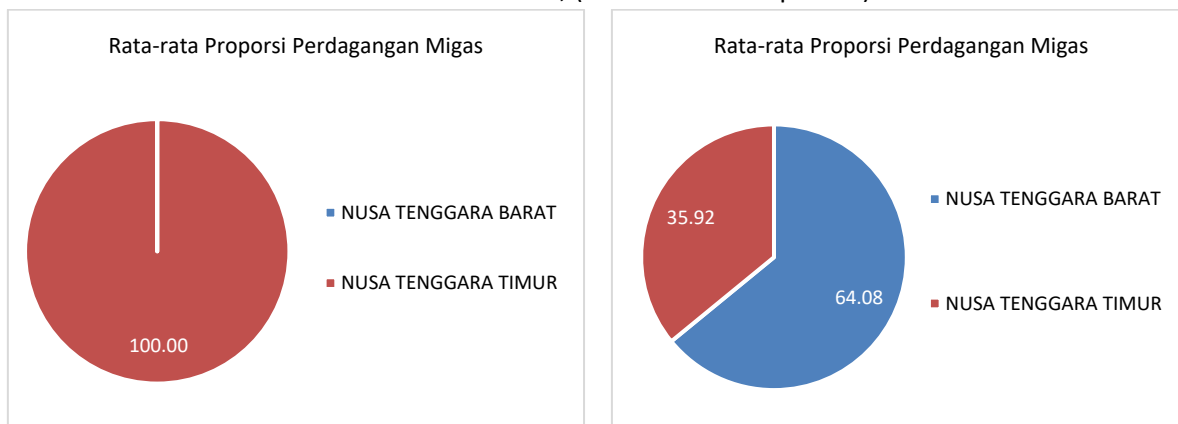


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan tahun 2019



Gambar 42:

Kontribusi Nilai Ekspor Migas dan Non Migas menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015 – 2019, (rata-rata dalam persen)

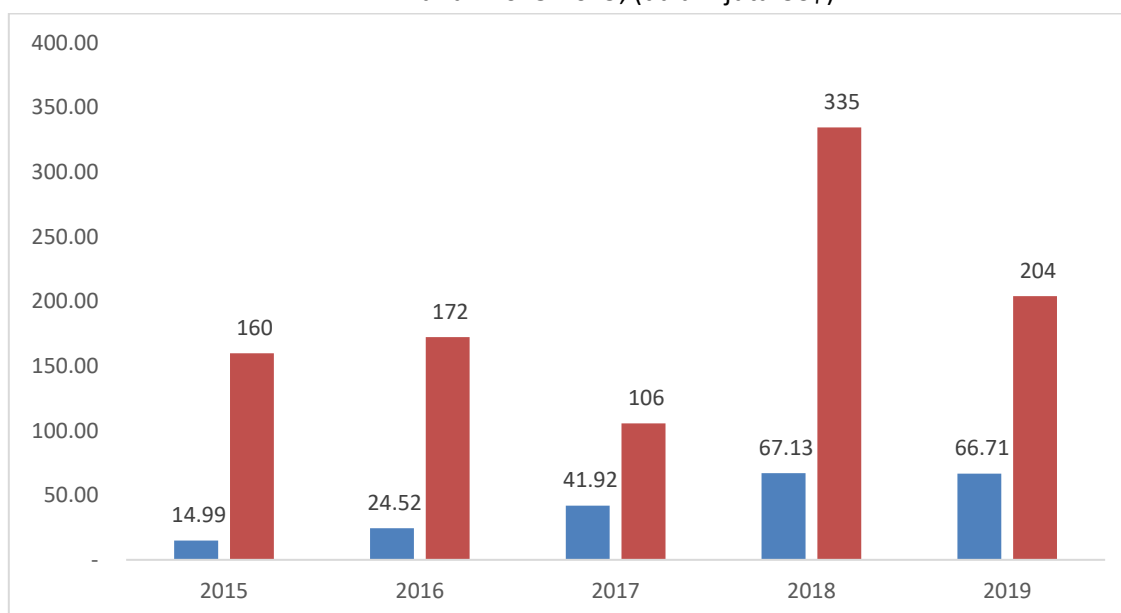


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan Tahun 2018

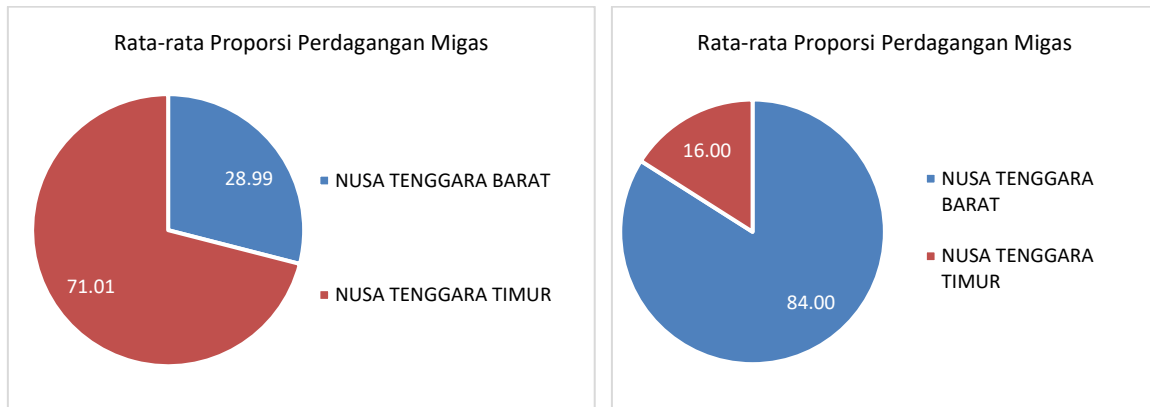
Nilai total Impor Wilayah Nusa Tenggara 2019 mencapai 204 juta US\$ menurun dibandingkan nilai impor tahun 2018 yang mencapai 335 juta US\$. Nilai impor terbesar Nusa Tenggara masih didominasi dari non-migas yaitu sebesar 23.538 juta US\$ atau rata-rata sekitar 81,84 persen, sebaliknya untuk nilai impor migas tahun 2019 mencapai sebesar 66,71 juta US\$ sedikit meningkat dibandingkan tahun 2018 yang mencapai sebesar 67,13 persen (**Gambar 44**). Secara spasial impor non-migas terbesar berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat rata-rata mencapai 84 persen, dan untuk migas terbesar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (**Gambar 45**).

Gambar 43:

Perkembangan Nilai Impor Migas dan Non Migas Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2019, (dalam juta US\$)



Gambar 44:
Perkembangan Nilai Impor Migas dan Non Migas Wilayah Nusa Tenggara
Tahun 2015-2019. (dalam juta US\$)

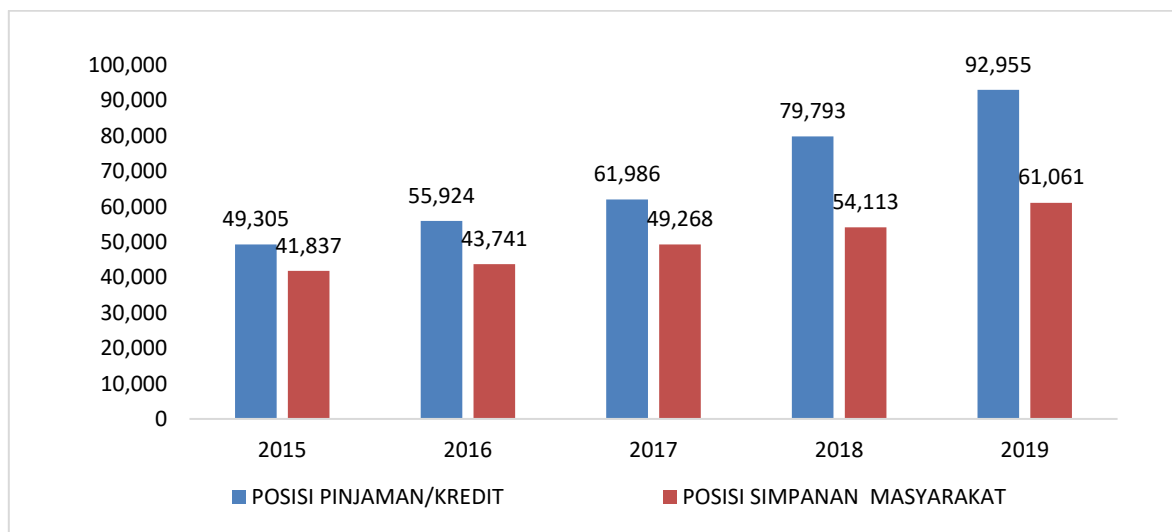


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian perdagangan Tahun 2019

4.4. Perbankan

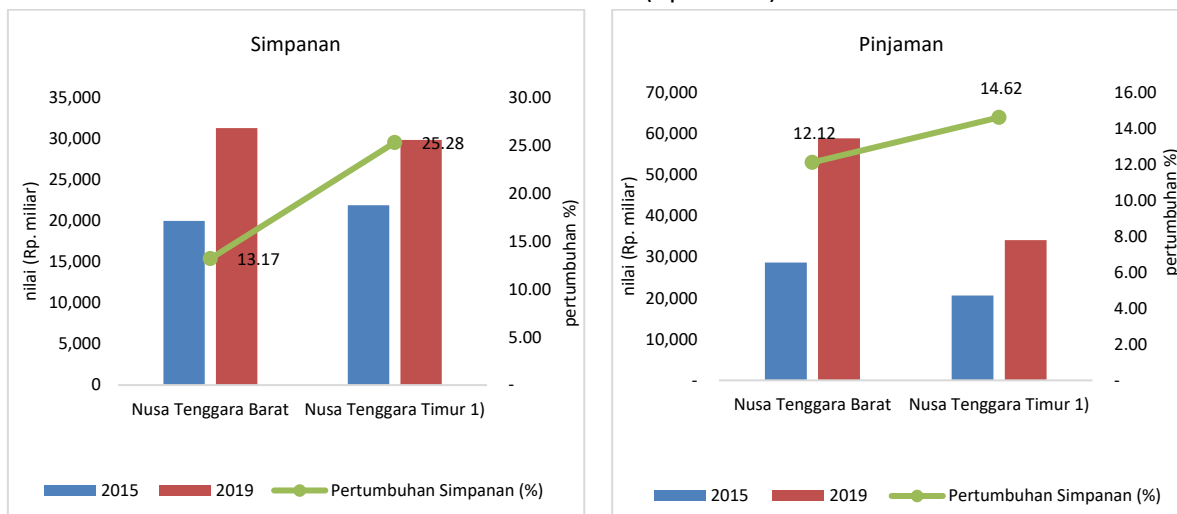
Sektor perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, di mana peranan penting perbankan yaitu dalam menggerakkan roda perekonomian wilayah. Selama periode 2015-2019, jumlah tabungan masyarakat menurut rupiah dan valas Bank Umum dan BPR di wilayah Nusa Tenggara mengalami peningkatan, tahun 2015 tercatat sebesar Rp. 41.837 miliar dan meningkat menjadi Rp. 61.061 miliar pada tahun 2019. Hal yang sama untuk nilai pinjaman/kredit mengalami peningkatan, tahun 2015 tercatat sebesar Rp. 49.305 miliar dan meningkat menjadi Rp. 92.955 miliar (**Gambar 45**). Secara spasial distribusi nilai tabungan relatif merata di kedua provinsi dan kecenderungan meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Sementara untuk posisi pinjaman di Nusa Tenggara Barat lebih tinggi dibandingkan Nusa Tenggara Timur, namun nilai simpanan di kedua provinsi menunjukkan penurunan pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2015 (**Gambar 46**).

Gambar 45:
Perkembangan Nilai Pinjaman/Kredit dan Simpanan (Rp. miliar) Masyarakat Rupiah dan Valas Bank Umum dan BPR Menurut Tahun 2015-2019





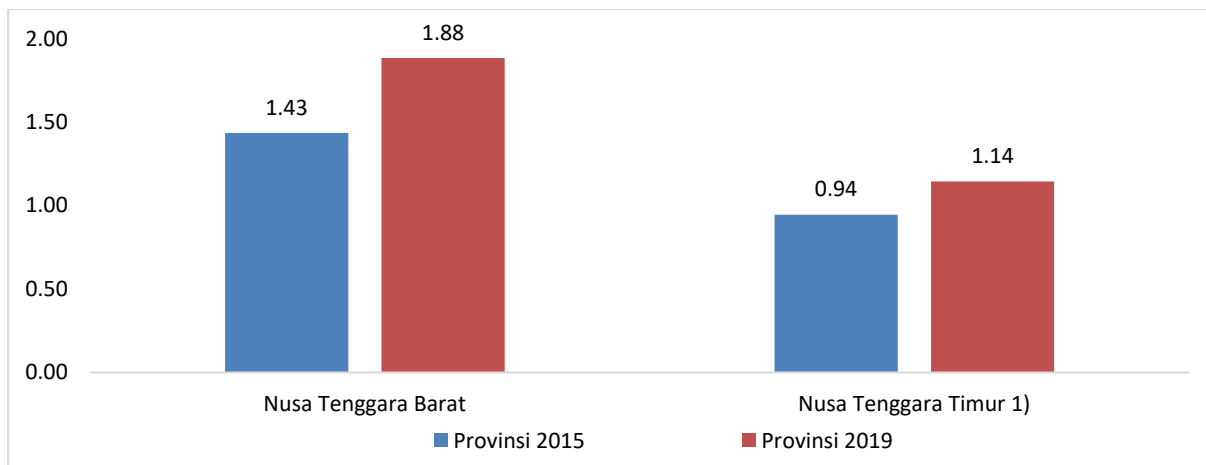
Gambar 46:
Posisi Pinjaman/Kredit yang Diberikan Rupiah dan Valas Bank Umum dan BPR menurut Provinsi (Rp. miliar)



Sumber: Bank Indonesia, Tahun 2019

Sementara berdasarkan rasio pinjaman terhadap simpanan masyarakat Rupiah dan Valas pada Bank Umum dan BPR rata-rata sudah mencapai di atas 0,9. Pada tahun 2019, tercatat rasio pinjaman terhadap simpanan provinsi baik di Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukan peningkatan, dan dibandingkan antarprovinsi rasio pinjaman terhadap simpanan di Nusa Tenggara Barat lebih tinggi dibandingkan Nusa Tenggara Timur (**Gambar 47**).

Gambar 47:
Rasio Pinjaman/Kredit terhadap Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valas Bank Umum dan BPR menurut Provinsi Tahun 2015 dan 2019.

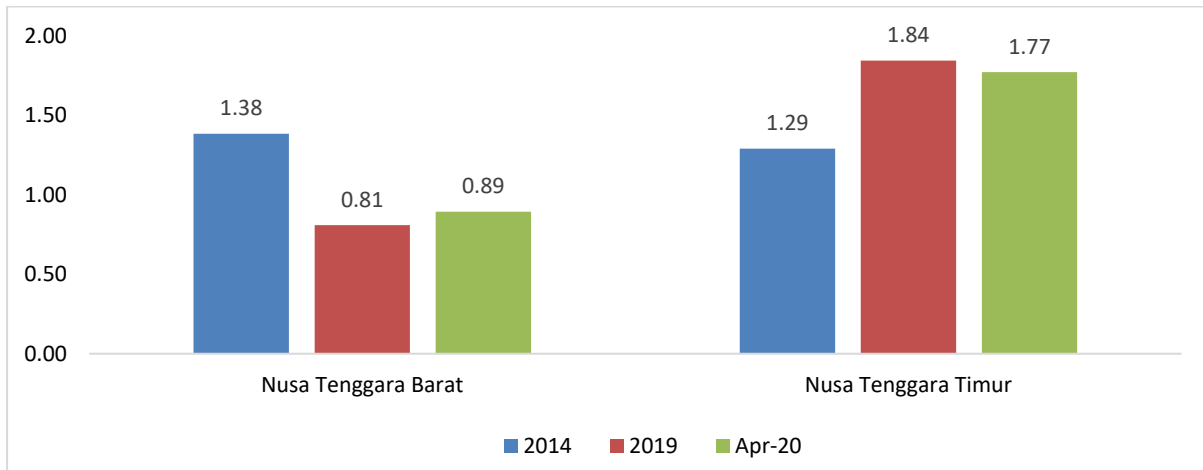


Sumber: Bank Indonesia, Tahun 2019

Sementara berdasarkan rasio kredit bermasalah terhadap jumlah pinjaman/kredit di wilayah Nusa Tenggara, Provinsi Nusa Tenggara Barat cenderung turun dibandingkan dengan tahun 2014 dengan 2019, berbeda dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang cenderung naik. Sedangkan di masa pandemi covid-19, Provinsi Nusa Tenggara Barat meningkat rasio kredit bermasalahnya terhadap jumlah pinjaman pada April 2020 dibandingkan dengan tahun 2019, berbeda dengan kondisi di Provinsi Nusa Tenggara yang mengalami penurunan. (**Gambar 48**).

Gambar 48:

Rasio Kredit Bermasalah terhadap Pinjaman/Kredit menurut Provinsi



Sumber: Bank Indonesia, Tahun 2018

4.5. Pembangunan Sektor Unggulan

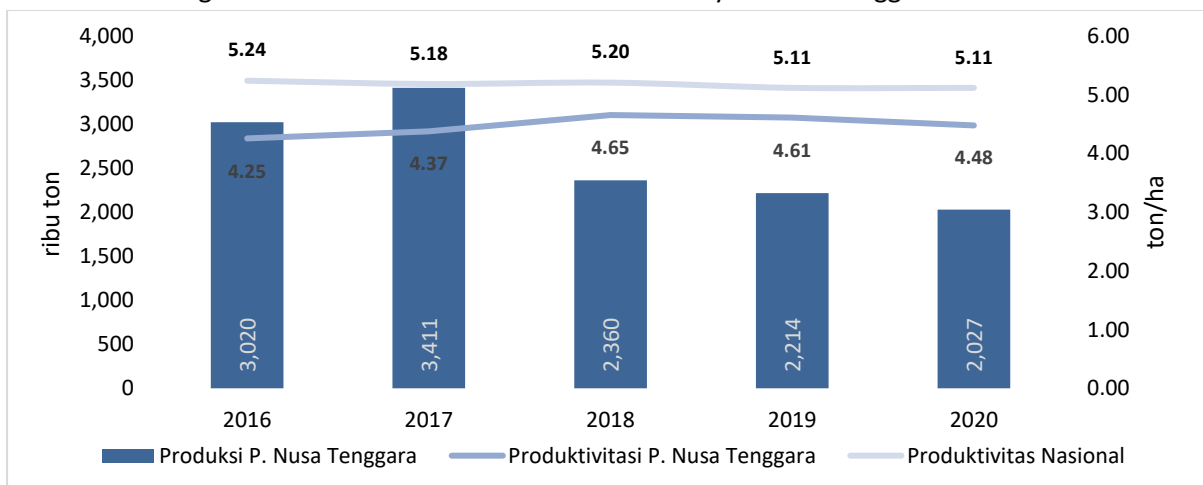
Pengembangan Sektor Pangan dan Perkebunan

Tanaman Pangan. Produksi padi tahun 2020 mencapai 2,02 juta ton atau 3,68 persen dari total produksi padi nasional, dengan produktivitas 4,48 ton/ha, masih lebih rendah dari produktivitas padi nasional (**Gambar 49**). Perkembangan produksi padi selama 2016-2020 rata-rata menurun 248 ribu ton per tahun atau menurun 8,12 persen per tahun. Tahun 2018 menjadi tahun dengan penurunan tertinggi sebesar 1,05 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan luas panen rata-rata 64,22 ribu ha per tahun atau menurun 9,03 persen per tahun. Penurunan luas panen tertinggi terjadi pada tahun 2018 mencapai 272,4 ribu hektar dan ini sangat mempengaruhi produksi di tahun 2018. Produksi padi terbesar berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 1,3 juta ton atau 64,6 persen dari produksi padi di wilayah Nusa Tenggara (**Gambar 50**).

Gambar 49 :

Perkembangan Produksi dan Produktivitas Padi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2016-2020

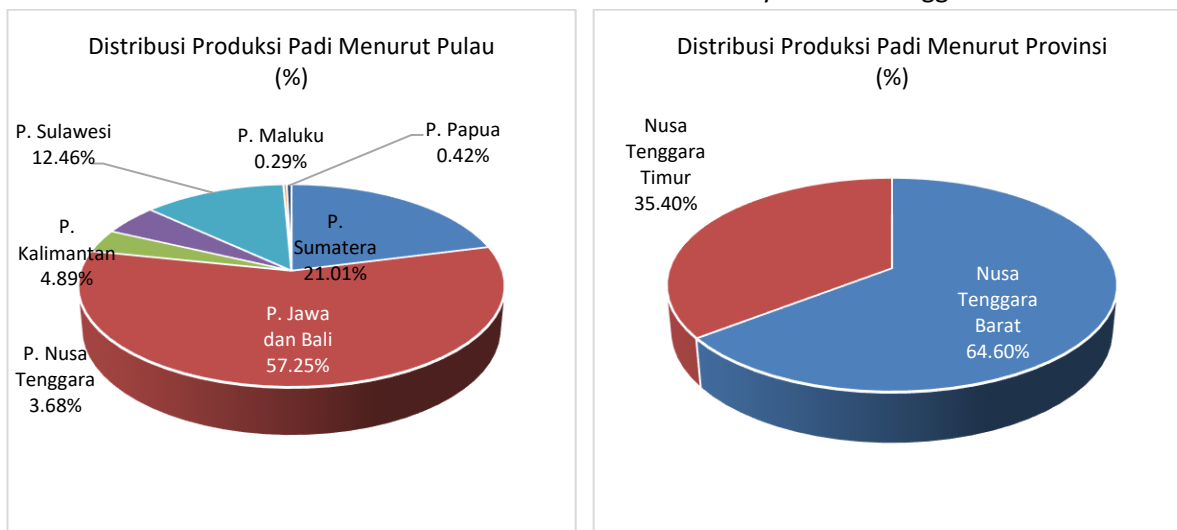


Sumber: BPS, Tahun 2020



Gambar 50 :

Distribusi Produksi Padi menurut Pulau dan Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2020

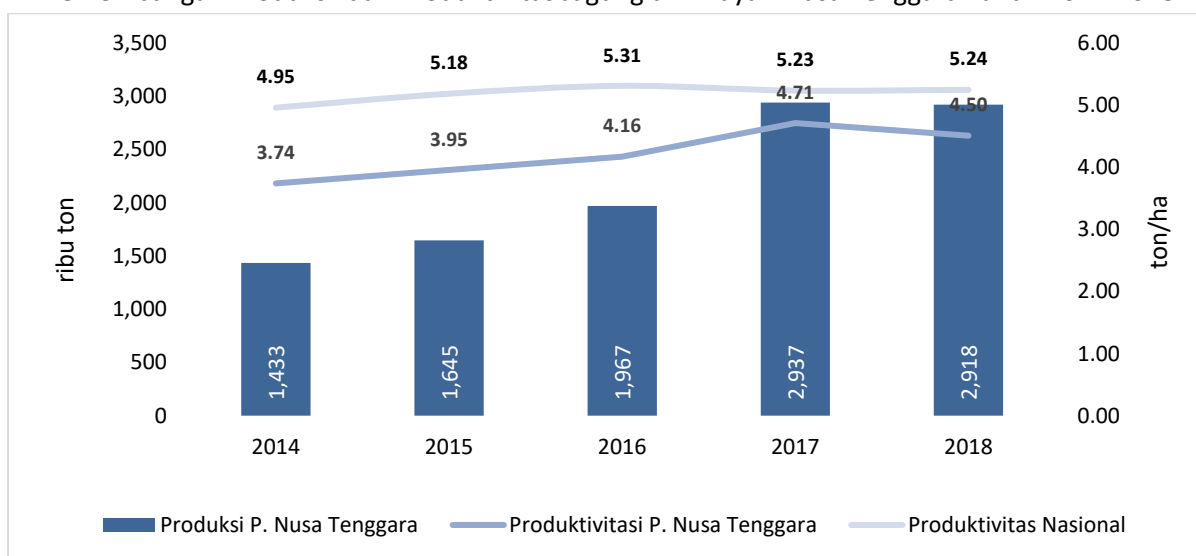


Sumber: BPS, Tahun 2020

Produksi Jagung tahun 2018 mencapai 2,92 juta ton atau sekitar 9,71 persen dari total produksi jagung nasional, dengan produktivitas sebesar 4,5 ton/ha lebih rendah dari produktivitas jagung nasional (5,24 ton/ha). Produksi jagung selama periode 2015-2018 rata-rata meningkat sebesar 371,4 ribu ton per tahun atau 20,76 persen per tahun. Untuk luas panen juga terjadi peningkatan luas panen rata-rata sebesar 66,14 ribu ha per tahun atau 14,49 persen per tahun. Produksi jagung terbesar terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat diikuti oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu masing-masing mencapai 2,06 juta ton (70,56 %) dan 859,23 ribu ton (29,44 %) dari produksi jagung wilayah Nusa Tenggara.

Gambar 51:

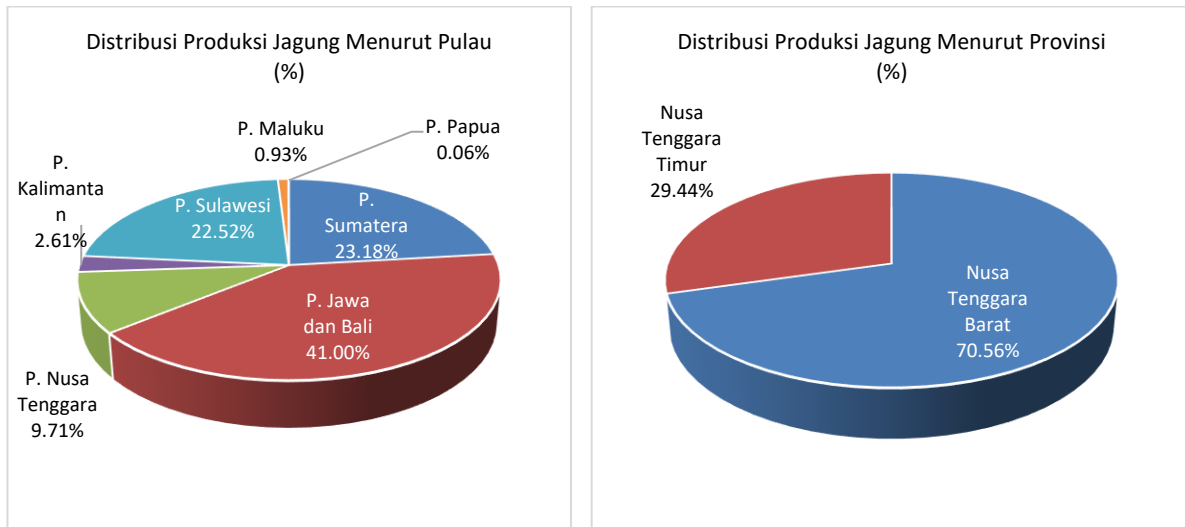
Perkembangan Produksi dan Produktivitas Jagung di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2014-2018



Sumber: BPS, Tahun 2020

Gambar 52 :

Distribusi Produksi Jagung menurut Pulau dan Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2018

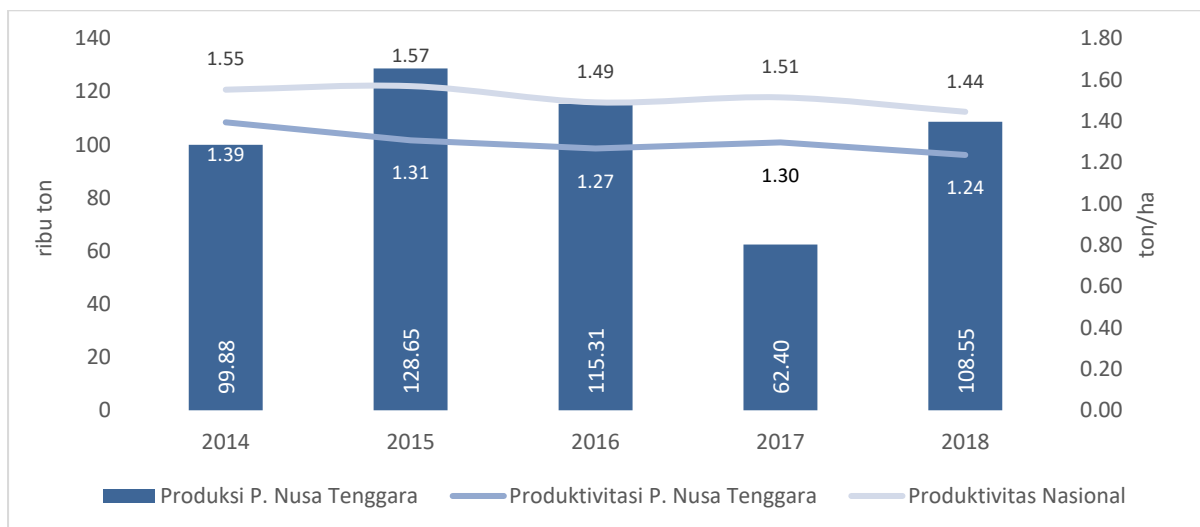


Sumber: BPS, Tahun 2020

Produksi kedelai tahun 2018 mencapai 108,55 ribu ton atau sekitar 11,05 persen dari total produksi kedelai nasional, dengan produktivitas sebesar 1,24 ton/ha atau lebih rendah dibandingkan produktivitas kedelai nasional (1,44 ton/ha). Produksi kedelai selama periode 2015-2018 mengalami peningkatan, dengan rata-rata kenaikan sebesar 2,17 ribu ton per tahun atau 11,63 persen per tahun. Terjadi peningkatan produksi di tahun 2018 sebesar 46,15 ribu ton atau sekitar 73,96 persen dari tahun sebelumnya. Untuk luas panen mengalami peningkatan yang sangat pesat di tahun 2018 hingga 87,88 ribu ha di mana tahun sebelumnya hanya 48,15 ribu ha, dengan *share* 12,92 persen terhadap luas lahan nasional. Produksi kedelai terbesar tahun 2018 di wilayah Nusa Tenggara terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 91,72 ribu ton (84,50 persen), lalu diikuti oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 16,83 ribu ton (15,50 persen) dari produksi kedelai wilayah Nusa Tenggara.

Gambar 53 :

Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Kedelai di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2014-2018

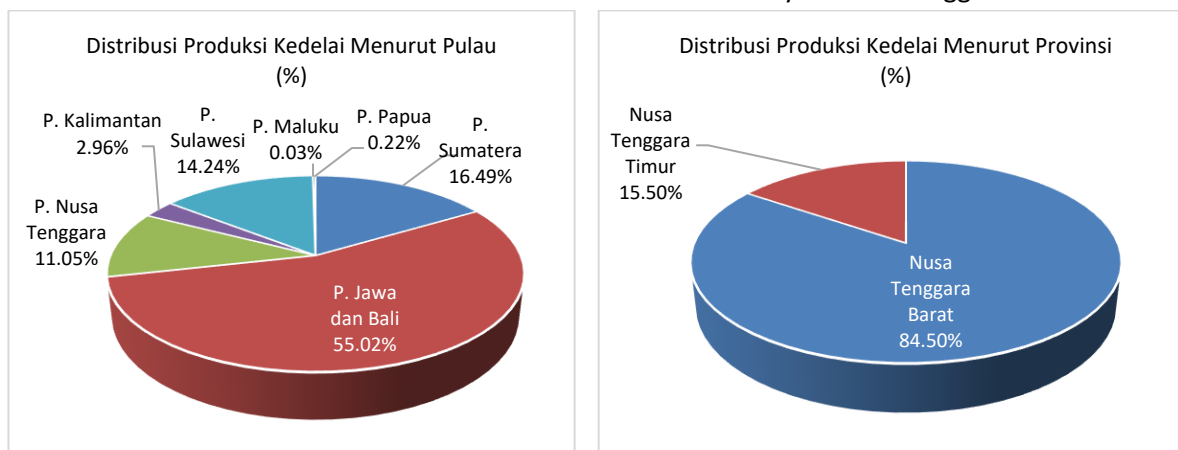


Sumber: Badan Pusat Statistik 2020



Gambar 54 :

Distribusi Produksi Kedelai menurut Pulau dan Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2018



Sumber: BPS, Tahun 2020

Tabel 42 :

Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Padi tahun 2020 dan Jagung serta Kedelai menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2018

Provinsi	Padi			Jagung			Kedelai		
	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
Nusa Tenggara Barat	272,193	1,309,760	4.81	306,899	2,059,222	6.71	77,167	91,724	1.19
Nusa Tenggara Timur	180,833	717,656	3.97	341,264	859,230	2.52	10,709	16,827	1.57

Sumber: BPS, Tahun 2020

Tanaman Perkebunan. Komoditas terbesar yang dihasilkan di wilayah Nusa Tenggara antara lain kelapa, tembakau, kopi, dan kakao (**Tabel 43**). Produksi kelapa di wilayah Nusa Tenggara tahun 2019 sebesar 118,5 ribu ton atau 4,19 persen dari produksi kelapa sawit nasional, meningkat jika dibandingkan dengan produksi tahun 2015. Selain kelapa, komoditas lainnya adalah tembakau dengan produksi mencapai 46,9 ribu ton atau sekitar 23,76 persen dari total produksi tembakau nasional. Sementara kopi menghasilkan produksi sebesar 30,4 ribu ton atau 3,99 persen dari produksi kopi nasional. Komoditas lain yang juga memiliki *share* tinggi yaitu kakao dengan *share* sebesar 2,83 persen dari nasional dengan produksi sebesar 22,2 ribu ton dari produksi nasional sebesar 784,1 ribu ton.

Tabel 43 :

Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Utama Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015 dan 2019

Komoditi	Wilayah Nusa Tenggara (ribu ton)		Nasional (ribu ton)		Share (%)	
	2015	2019	2015	2019	2015	2019
Kelapa Sawit	268.1	0.0	42,447.2	45,861.0	0.6	0.0
Kelapa	117.2	118.5	2,920.7	2,828.4	4.0	4.2
Karet	0.0	0.0	3,145.3	3,449.0	0.0	0.0
Kopi	25.9	30.4	639.2	761.1	4.1	4.0
Kakao	14.3	22.2	593.2	784.1	2.4	2.8
Tebu	0.0	2.5	2498.1	2258.2	0.0	0.1
Teh	0.0	0.0	132.5	137.8	0.0	0.0
Tembakau	35.7	46.9	193.7	197.4	18.4	23.8

Sumber: BPS, Tahun 2020

Produksi kelapa terbesar terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur diikuti oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan produksi masing-masing sebesar 69,7 ribu ton dan 48,8 ribu ton. Sedangkan produksi tembakau terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan produksi sebesar 46 ribu ton atau 98,08 persen dari total produksi karet di Nusa Tenggara. Sementara produksi kopi dan kakao terbesar di wilayah Nusa Tenggara terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk kopi sebesar 23,8 ribu ton dan untuk kakao di provinsi yang sama dengan produksi sebesar 20 ribu ton (**Tabel 44**).

Tabel 44 :

Penyebaran Produksi Tanaman Perkebunan Utama menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2019

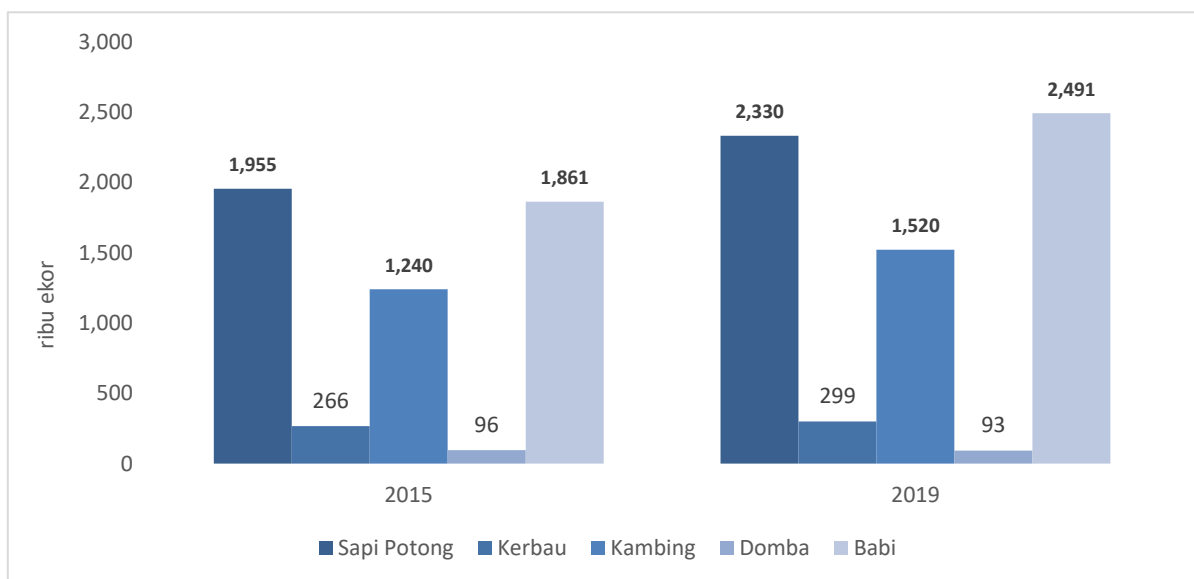
Provinsi	Kelapa		Kopi		Kakao		Tembakau	
	ribu ton	%	ribu Ton	%	ribu ton	%	ribu ton	%
Nusa Tenggara Barat	48.8	41.2	6.6	21.7	2.2	9.9	46.0	98.1
Nusa Tenggara Timur	69.7	58.8	23.8	78.3	20.0	90.1	0.9	1.9
NUSA TENGGARA	118.50	100.00	30.40	100.00	22.20	100.00	46.90	100.00

Sumber: BPS, Tahun 2020

Peternakan. Populasi ternak besar paling banyak diusahakan meliputi jenis babi, sapi potong, dan kambing. Populasi ternak babi tahun 2019 mencapai 2,49 juta ekor, sapi potong sebanyak 2,33 juta ekor dan kambing sebanyak 1,52 juta ekor (**Gambar 56**). Penyebaran populasi ternak babi dan kambing didominasi oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan sapi potong terbesar didominasi oleh di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan populasi ternak babi berjumlah 2,43 juta ekor, sapi potong 1,24 juta ekor, dan kambing sejumlah 818,65 ribu ekor (**Tabel 45**).

Gambar 55 :

Perkembangan Populasi Ternak Besar di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015 dan 2019, (dalam ribu ekor)



Sumber: BPS, Tahun 2020



Tabel 45 :

Populasi Ternak Besar menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2019, (ekor)

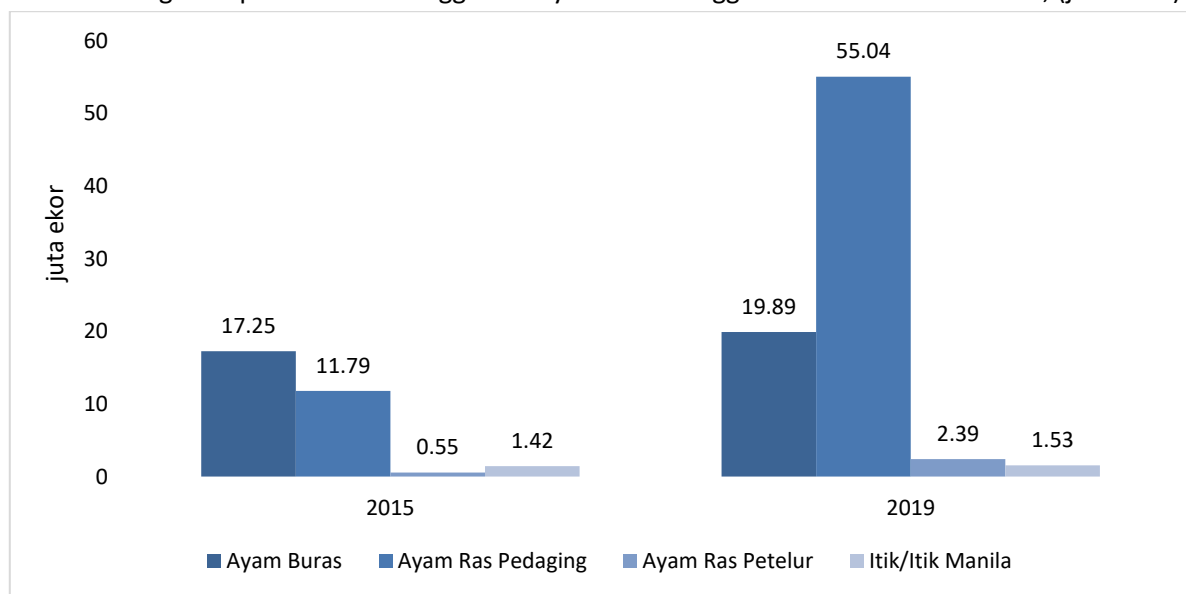
Provinsi	2019				
	Sapi Potong	Kerbau	Kambing	Domba	Babi
Nusa Tenggara Barat	1,242,749	124,527	701,427	27,241	58,899
Nusa Tenggara Timur	1,087,615	174,903	818,650	65,589	2,432,501
TOTAL	2,330,364	299,430	1,520,077	92,830	2,491,400

Sumber: BPS, Tahun 2020

Populasi ternak unggas terbesar meliputi jenis ayam ras pedaging dan ayam buras, dengan populasi pada tahun 2019 sebesar 55 juta ekor ayam ras pedaging dan 19,9 juta ekor ayam buras. Jika diperhatikan pada (**Gambar 57**), populasi unggas di wilayah Nusa Tenggara terjadi peningkatan yang signifikan di tahun 2019 terutama untuk ayam ras pedaging yang artinya kebutuhan akan protein hewani dari ayam permintaannya semakin meningkat di wilayah Nusa Tenggara. Populasi ayam ras pedaging dan ayam ras petelur terbesar terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat sedangkan untuk populasi untuk ayam buras terbesar ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (**Tabel 46**).

Gambar 56 :

Perkembangan Populasi Ternak Unggas Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015 dan 2019, (juta ekor).



Sumber: BPS, Tahun 2020

Tabel 46 :

Perkembangan Populasi Ternak Unggas menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015 dan 2019, (ribu ekor)

Provinsi	Ayam Buras		Ayam Ras Pedaging		Ayam Ras Petelur		Itik/Itik Manila	
	2015	2019	2015	2019	2015	2019	2015	2019
Nusa Tenggara Barat	6,661	8,909	9,104	37,268	350	1,885	1100.228	1167.694
Nusa Tenggara Timur	10,585	10,985	2,687	17,768	201	510	322.923	362.563
TOTAL	17,246	19,893	11,791	55,036	551	2,395	1,423	1,530

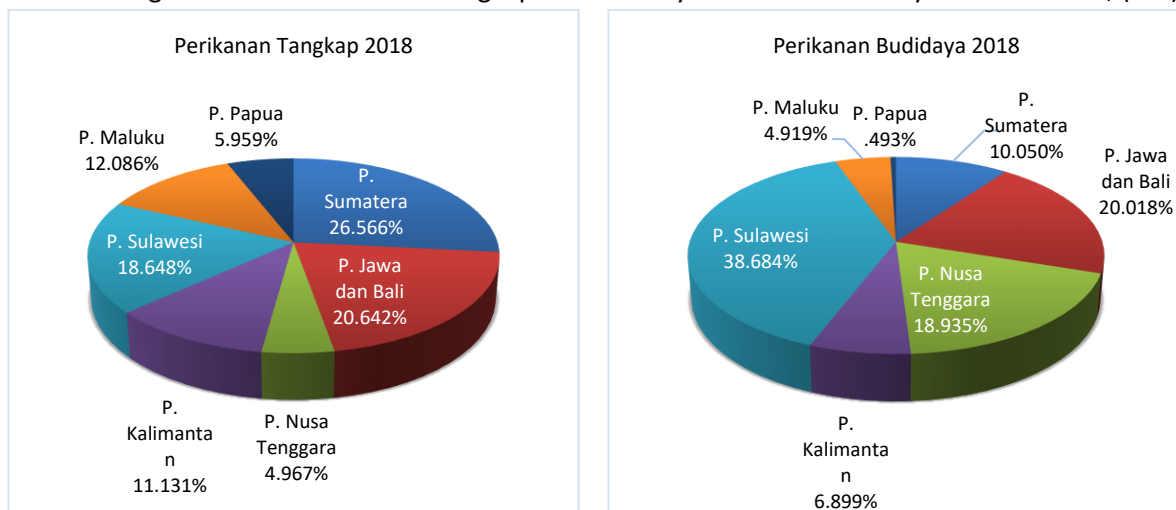
Sumber: BPS, Tahun 2020

Pengembangan Sektor Kemaritiman dan Kelautan.

Perikanan dan Kelautan. Produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun 2018 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2013. Produksi perikanan tangkap 2018 mencapai 365 ribu ton atau sekitar 4,97 persen dari produksi perikanan tangkap nasional, sedangkan produksi perikanan budidaya sebesar 2,98 juta ton atau sekitar 19,45 persen dari produksi perikanan budidaya nasional. Jika di lihat dari jenis perikanan tangkap, produksi perikanan tangkap tahun 2018 didominasi oleh perikanan laut sebesar 361 ribu ton atau sekitar 98,99 persen dari total perikanan tangkap di wilayah Nusa Tenggara. Daerah dengan produksi perikanan tangkap terbesar berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan untuk perikanan budidaya, produksi tahun 2018 didominasi oleh budidaya laut sebesar 2,65 juta ton atau sekitar 88,87 persen dari total produksi perikanan budidaya di wilayah Nusa Tenggara. Provinsi dengan produksi perikanan budidaya terbesar adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gambar 57 :

Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya berdasarkan wilayah di Indonesia, (ton)



Sumber: BPS, Tahun 2020

Tabel 47 :

Perkembangan Perikanan Tangkap di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2014 dan 2018 berdasarkan Provinsi, (ton)

Provinsi	Perikanan Laut		Perairan Umum		Jumlah	
	2014	2018	2014	2018	2014	2018
Nusa Tenggara Barat	227,084	204,283	3,560	3,687	230,644	207,970
Nusa Tenggara Timur	111,415	157,691	0	0	111,415	157,691
NUSA TENGGARA	338,499	361,974	3,560	3,687	342,059	365,661

Sumber: BPS, Tahun 2020

Tabel 48 :

Perkembangan Perikanan Budidaya di Wilayah Nusa Tenggara tahun 2014 dan 2018 berdasarkan Provinsi, (ribu ton)

Provinsi	Budidaya Laut		Tambak		Kolam		Keramba		Jaring Apung		Sawah	
	2014	2018	2014	2018	2014	2018	2014	2018	2014	2018	2014	2018
Nusa Tenggara Barat	749,7	850,2	111,6	172,0	21,8	59,9	1,4	2,4	2,3	3,0	0,6	1,7
Nusa Tenggara Timur	1.966,3	1.803,8	1,9	5,3	1,9	87,6	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1
NUSA TENGGARA	2.715,9	2.654,0	113,5	177,3	23,7	147,5	1,4	2,4	2,3	3,4	0,7	1,8

Sumber: BPS, Tahun 2020



Pengembangan Sektor Pariwisata dan Industri.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang merupakan motor penggerak perekonomian di Indonesia. Kekayaan alam Indonesia yang tersebar luas menjadikan wilayah Indonesia unggul dalam sektor pariwisata. Keberadaan destinasi-destinasi potensial seperti wisata budaya, wisata alam, agro wisata, desa wisata dan wisata-wisata tematik lainnya. Perkembangan pariwisata di Indonesia salah satunya dapat dilihat dari perkembangan jumlah wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata sebagai produk unggulan daerah di masa mendatang, pemerintah harus melakukan pembangunan sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang lebih memadai.

Salah satu indikator kinerja sektor pariwisata dapat ditunjukkan dengan perkembangan jumlah wisatawan baik yang berasal dari mancanegara maupun domestik. Perkembangan jumlah tamu asing dan domestik dari tahun 2015-2019 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah kunjungan tamu asing di wilayah Nusa Tenggara mencapai 604 ribu orang dengan pertumbuhan rata-rata pertahunnya sebesar 22,5 persen per tahun dengan *share* 4,15 persen dari total Indonesia. Apabila dilihat perkembangannya provinsi dengan jumlah tamu asing terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat (**Tabel 49**).

Sementara untuk perkembangan jumlah tamu domestik tahun 2019 mencapai 2,4 juta orang, naik jika dibandingkan dengan tahun 2018 dengan pertumbuhan rata-rata 2015-2019 sebesar 17,3 persen per tahun, dengan jumlah tamu domestik terbanyak adalah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (**Tabel 50**).

Tabel 49 :

Jumlah Tamu Asing pada Hotel Bintang dan Non Bintang menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara, Tahun 2015-2019, (orang)

Provinsi	Tamu Asing Hotel Bintang dan Non Bintang					Rata-Rata
	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan
Nusa Tenggara Barat	246.639	541.255	604.823	364.757	433.546	27,6%
Nusa Tenggara Timur	111.571	139.215	185.544	139.293	171.396	14,0%
NUSA TENGGARA	358.210	680.470	790.368	504.050	604.942	22,5%
INDONESIA	11.936.138	14.011.814	15.276.184	20.118.749	14.590.705	6,6%
SHARE (%)	4,80	2,56	4,45	3,93	3,45	

Sumber: BPS, Tahun 2020

Tabel 50 :

Jumlah Tamu Domestik pada Hotel Bintang dan Non Bintang menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara, Tahun 2015-2019, (orang)

Provinsi	Tamu Domestik Hotel Berbintang dan Non Berbintang					Rata-Rata
	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan
Nusa Tenggara Barat	791.509	1.528.560	1.818.397	1.280.013	1.490.367	24,7%
Nusa Tenggara Timur	672.953	942.652	1.006.899	987.733	906.131	9,2%
NUSA TENGGARA	1.464.461	2.471.212	2.825.296	2.267.746	2.396.497	17,3%
INDONESIA	68.908.048	118.392.155	128.376.800	132.689.627	131.437.282	20,7%
SHARE (%)	2,13	2,09	2,20	1,71	1,82	

Sumber: BPS, Tahun 2020

Untuk perkembangan jumlah akomodasi/hotel, secara nasional di Indonesia terdapat 28.230 unit hotel dengan rata-rata pertumbuhan tahun 2014-2018 sebesar 15,57 persen. Di wilayah Nusa Tenggara sendiri pada tahun 2018 jumlah hotel yang tercatat sebanyak 1.706 unit dengan *share* terhadap nasional sebesar 6,04 persen yang didominasi oleh hotel non-bintang dengan persentase 93,7 persen dari total hotel yang ada di wilayah Nusa Tenggara. Provinsi dengan jumlah hotel terbesar ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk jumlah kamar di wilayah Nusa Tenggara tersedia sebanyak 40.690 kamar dengan provinsi yang memiliki kamar terbanyak ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 51 :

Jumlah Akomodasi/Hotel Bintang dan Non Bintang menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara, Tahun 2014-2018

Provinsi	Jumlah Akomodasi Berbintang dan Non Bintang					Rata-rata
	2013	2014	2015	2016	2018	Pertumbuhan
Nusa Tenggara Barat	664	722	742	889	1,211	16.9%
Nusa Tenggara Timur	272	318	334	341	495	17.3%
NUSA TENGGARA	936	1,040	1,076	1,230	1,706	16.9%
INDONESIA	16,685	17,484	18,353	18,829	28,230	15.6%
SHARE (%)	5.61	5.95	5.86	6.53	6.04	

Sumber: BPS, Tahun 2020

Tabel 52 :

Jumlah kamar Akomodasi/Hotel Bintang dan Non Bintang menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara, Tahun 2014-2018

Provinsi	Jumlah Kamar Hotel Bintang dan Non Bintang					Rata-Rata
	2013	2014	2015	2016	2018	Pertumbuhan
Nusa Tenggara Barat	14,198	15,514	17,047	19,181	25,768	16.50%
Nusa Tenggara Timur	9,206	10,774	11,369	11,962	14,922	13.13%
NUSA TENGGARA	23,404	26,288	28,416	31,143	40,690	15.17%
INDONESIA	664,843	706,436	744,233	775,243	1,044,312	12.62%
SHARE (%)	3.52	3.72	3.82	4.02	3.90	

Sumber: BPS, Tahun 2020

dari sisi penyerapan tenaga kerja, perhotelan berkontribusi secara nasional menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak 652 ribu orang di tahun 2018 yang berkerja di hotel bintang dan non-bintang dengan pertumbuhan rata-rata 25,50 persen per tahun. Pertumbuhan tenaga kerja rata-rata tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun provinsi yang menyerap tenaga kerja terbanyak di tahun 2018 di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 53 :

Jumlah Tenaga Kerja Akomodasi/Hotel Bintang dan Non-Bintang menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara, Tahun 2014-2018

Provinsi	Jumlah Tenaga Kerja Akomodasi Bintang dan Non Bintang					Rata-Rata
	2013	2014	2015	2016	2018	Pertumbuhan
Nusa Tenggara Barat	8,098	8,930	9,444	11,384	19,271	26.46%
Nusa Tenggara Timur	2,734	3,214	3,408	3,826	7,568	33.41%
NUSA TENGGARA	10,833	12,144	12,852	15,210	26,839	28.19%
INDONESIA	307,280	326,315	333,123	340,416	652,018	25.50%
SHARE (%)	3.53	3.72	3.86	4.47	4.12	

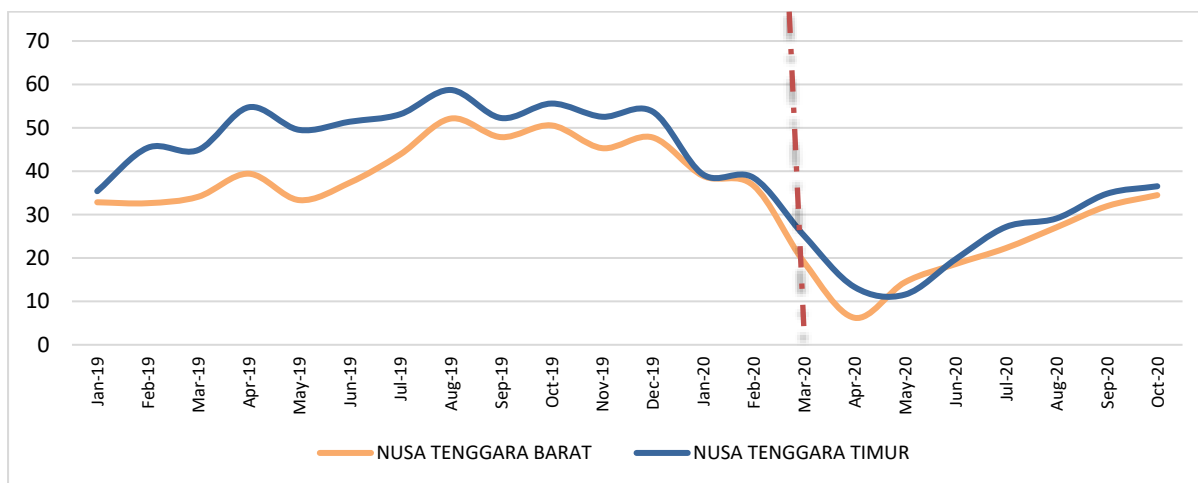
Sumber: BPS, Tahun 2020

Dilihat dari sisi tingkat penghunian kamar pada hotel bintang wilayah Nusa Tenggara dalam satu tahun terakhir mengalami penurunan. Pada bulan April 2020 tingkat penghunian kamar pada hotel bintang wilayah Nusa Tenggara sebesar 9,8 poin, menurun dari tahun sebelumnya yaitu pada bulan April 2019 sebesar 47,1 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa pandemi covid-19 sangat berpengaruh terhadap aktifitas perhotelan di Provinsi Nusa Tenggara. Akan tetapi dari gambar terlihat tren hingga oktober 2020 terus meningkat artinya sektor perhotelan sudah mulai bangkit kembali walaupun masih lebih rendah di bandingkan tahun sebelumnya.



Gambar 58 :

Tingkat Penghunian Kamar pada Hotel Bintang di Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2019-2020



Sumber: BPS, Tahun 2020

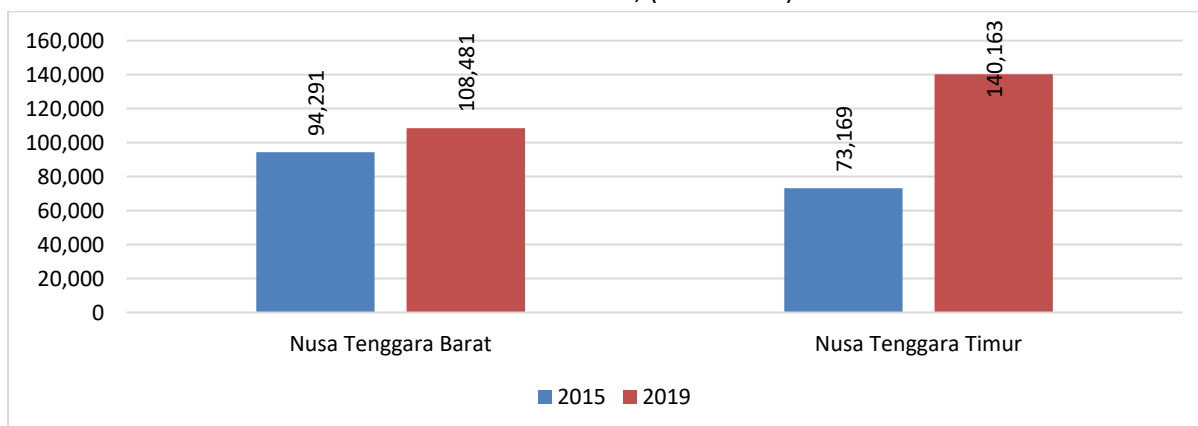
Industri Mikro Kecil (IMK)

Perkembangan jumlah IMK di wilayah Nusa Tenggara dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah IMK tahun 2019 sebanyak 248.644 unit IMK meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 167.460 unit pada tahun 2015, artinya ada selisih peningkatan sebesar 81.184 IMK antara tahun 2015 dan 2019. Jumlah IMK terbanyak terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah IMK sebanyak 140.163 unit pada tahun 2019, kemudian diikuti oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah IMK sebanyak 108.481 unit (**Gambar 59**).

Sementara untuk total pendapatan (*revenue*) IMK Wilayah Nusa Tenggara tahun 2019 sebesar 12,4 triliun rupiah turun dibandingkan tahun 2014 (20,83 triliun rupiah), dengan *revenue* terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Revenue* yang turun artinya IMK di wilayah Nusa Tenggara mengalami perlambatan karena meningkatnya jumlah IMK tidak serta merta meningkatkan *revenue* dari IMK itu sendiri. Sementara untuk penyerapan jumlah tenaga kerja IMK, total tenaga kerja yang terserap tahun 2019 mencapai 489 ribu orang meningkat dibandingkan dengan tahun 2015 sebanyak 460 ribu orang. Penyerapan jumlah tenaga kerja IMK paling besar terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (**Tabel 54**).

Gambar 59 :

Perkembangan Jumlah Industri Usaha Mikro-Kecil (IMK) di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015 dan 2019, (dalam unit)



Sumber: BPS, Tahun 2019

Tabel 54 :

Perkembangan Jumlah Pendapatan dan Tenaga Kerja Industri Mikro-Kecil menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015 dan 2019

Provinsi	Pendapatan (Rp. juta)			Tenaga Kerja (orang)		
	2015	2019	D 2015-2019	2015	2019	D 2015-2019
Nusa Tenggara Barat	17.828.489	8.398.353	-9.430.136	323.322	261.495	-61.827
Nusa Tenggara Timur	3.009.003	4.081.402	1.072.399	136.765	228.197	91.432
NUSA TENGGARA	20.837.492	12.479.754	-8.357.738	460.087	489.692	29.605

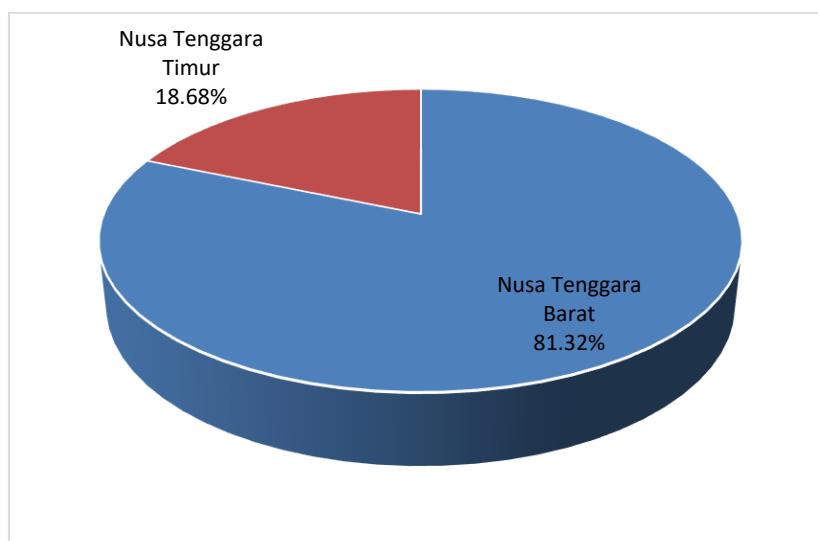
Sumber: BPS, Tahun 2019

Industri Menengah dan Besar

Perkembangan industri menengah besar di wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2017 menunjukkan bahwa kontribusi wilayah Nusa Tenggara terhadap total penciptaan nilai tambah nasional sebesar 0,05 persen setara dengan 1,58 triliun. Provinsi yang berkontribusi paling besar di wilayah Nusa Tenggara adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan kontribusi sebesar 1,28 triliun rupiah kemudian diikuti oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan kontribusi sebesar 296 miliar rupiah. Dari sisi tenaga kerja, industri menengah besar di Provinsi Nusa Tenggara Barat menyerap tenaga kerja sebesar 8.632 orang dengan komposisi 4.262 orang laki-laki dan 4.370 orang perempuan. Sedangkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur menyerap tenaga kerja yang lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat (2.289 orang) hal ini menunjukkan bahwa industri di Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk industri yang padat karya.

Gambar 60 :

Komposisi Perkembangan Nilai Tambah Industri Menengah Besar di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2017

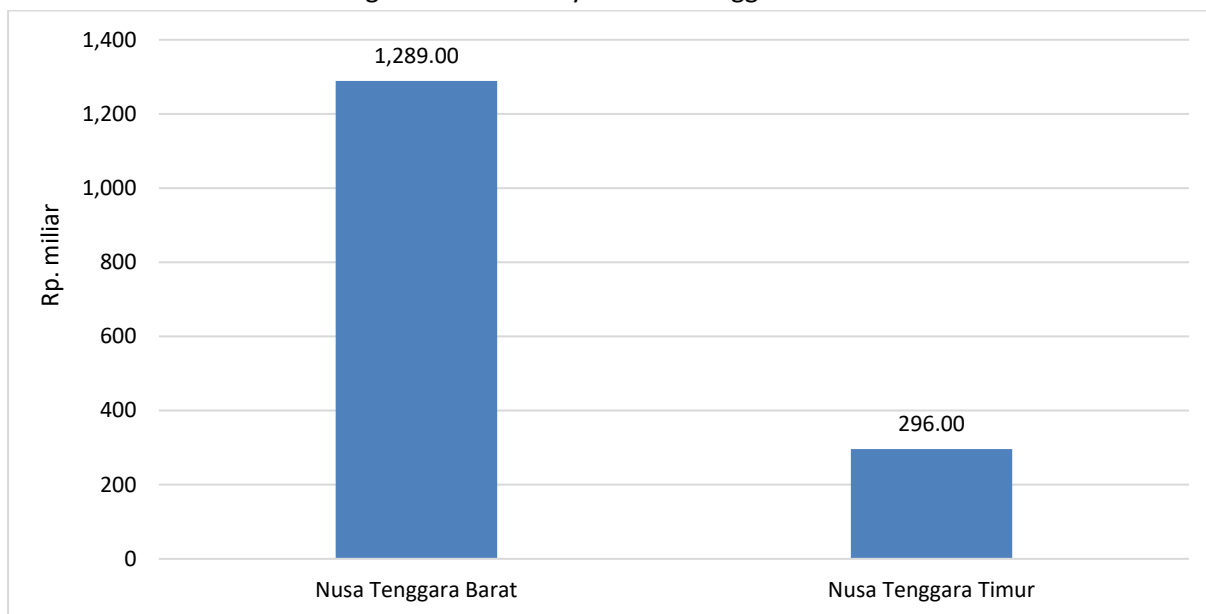


Sumber: Survey Industri, BPS



Gambar 61 :

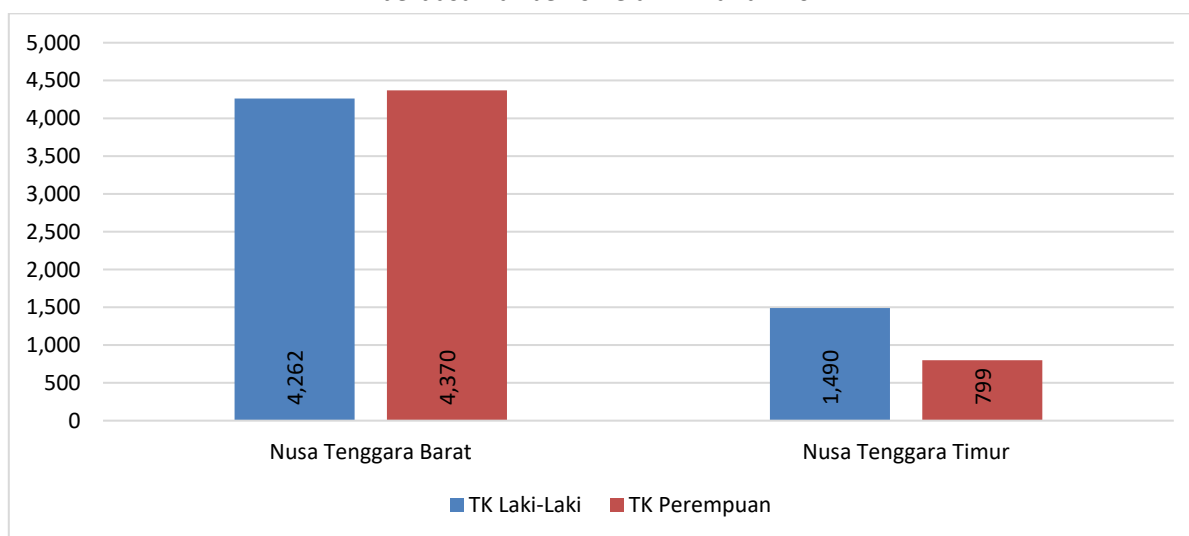
Nilai Tambah Industri Menengah Besar di Wilayah Nusa Tenggara Berdasarkan Provinsi Tahun 2017



Sumber: Survey Industri, BPS

Gambar 62 :

Jumlah Tenaga Kerja Industri Menengah Besar di Wilayah Nusa Tenggara berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017



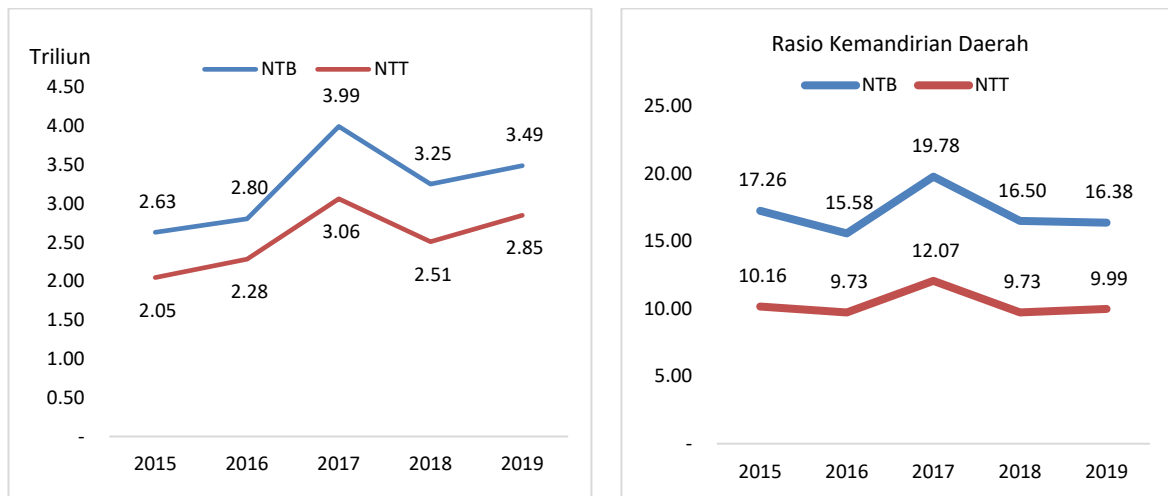
Sumber: Survey Industri, BPS

4.6. Perkembangan Keuangan Daerah

Keuangan daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya harus dilakukan secara efektif dan efisien agar tepat guna dan berhasil guna. Komponen utama pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Untuk menggambarkan perkembangan keuangan daerah antarprovinsi di wilayah Nusa Tenggara digunakan data gabungan APBD Provinsi dan Kabupaten Kota (Se-Provinsi).

Gambar 63 :

Perkembangan PAD dan Rasio Kemandirian Antarprovinsi Tahun 2015-2019



Sumber: DJPK, Kemenkeu, 2020

Keterangan: Berdasarkan Data APBD Realisasi (2015-2018), APBD Anggaran 2019 (data Se-Provinsi)

Jumlah PAD antarprovinsi di wilayah Nusa Tenggara, tertinggi di Provinsi NTB sebesar Rp 3,49 Triliun di tahun 2019, sedangkan terendah di Provinsi NTT sebesar Rp 2,85 triliun. Gambar 63, perkembangan PAD antarprovinsi di wilayah Nusa Tenggara pada periode 2015-2019 menunjukkan tren meningkat. Pertumbuhan PAD di Provinsi NTT meningkat sebesar 39,16 persen, dan Provinsi NTB meningkat sebesar 32,62 persen.

Tabel 55 :

Perkembangan PAD dan Rasio Kemandirian Daerah Antarprovinsi Tahun 2015-2019

Provinsi	PAD (Rp. triliun)					Tumbuh ('15-'19)	Rasio PAD/APBD (%)					Δ ('15-19)
	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
Nusa Tenggara Barat	2,63	2,80	3,99	3,25	3,49	32,62	17,26	15,58	19,78	16,50	16,38	-0,88
Nusa Tenggara Timur	2,05	2,28	3,06	2,51	2,85	39,16	10,16	9,73	12,07	9,73	9,99	-0,17
NUSA TENGGARA	4,68	5,09	7,06	5,76	6,34	35,48	13,22	12,27	15,48	12,66	12,72	-0,50

Sumber: DJPK, Kemenkeu, 2020

Keterangan: Berdasarkan Data APBD Realisasi (2015-2018), APBD Anggaran 2019 (data Se-Provinsi)

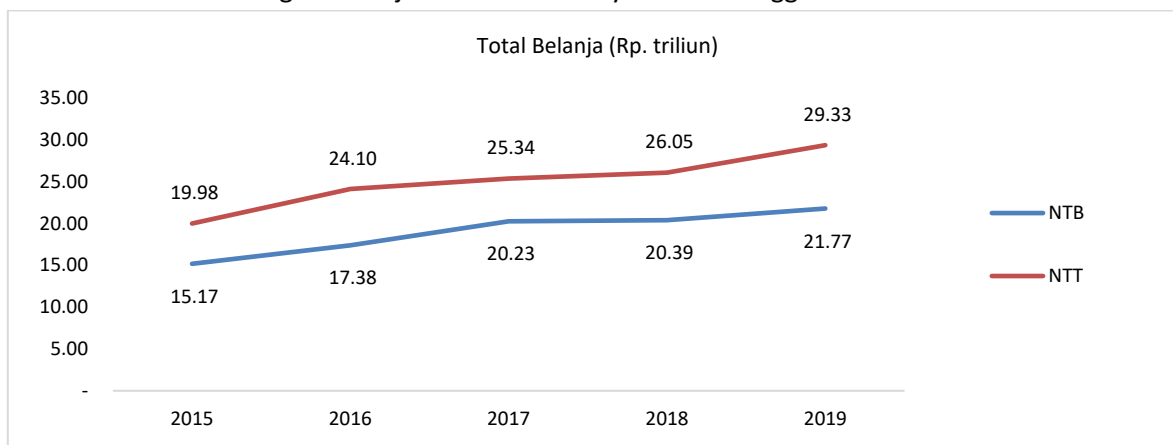
Rasio Kemandirian Daerah menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain. Rasio ini ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar angka rasio PAD maka semakin tinggi kemandirian daerah tersebut, dan sebaliknya.

Rasio kemandirian daerah antarprovinsi pada periode 2015-2019 di Provinsi NTB dan NTT menunjukkan tren menurun, dengan penurunan tertinggi di provinsi NTB sebesar (-0,88%), dan NTT sebesar (-0,17%). Rasio kemandirian tertinggi pada tahun 2019 terdapat di Provinsi NTB (16,38%), dan Provinsi NTT sebesar 9,99 persen.

Belanja Daerah di seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2019 sebesar Rp. 51,10 triliun meningkat sebesar Rp. 15,96 triliun dibanding tahun 2015 (Rp. 35,15 triliun). Belanja daerah se-provinsi tertinggi pada tahun 2019 berada di NTT sebesar Rp. 29,33 triliun, dan terendah di Provinsi NTB Rp. 21,77 triliun.



Gambar 64 :
Perkembangan Belanja di Seluruh Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2019



Sumber: DJPK, Kemenkeu, 2020

Keterangan: Berdasarkan Data APBD Realisasi (2015-2018), APBD Anggaran 2019 (data Se-Provinsi)

Tabel 56 :
Perkembangan Belanja di Seluruh Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2019

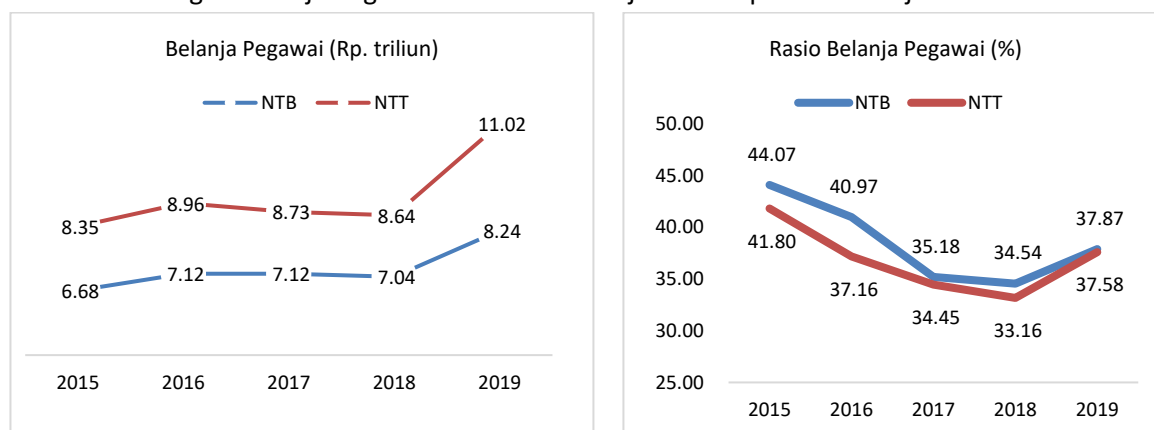
Provinsi	Tahun					Δ ('15-19)
	2015	2016	2017	2018	2019	
Nusa Tenggara Barat	15,17	17,38	20,23	20,39	21,77	6,60
Nusa Tenggara Timur	19,98	24,10	25,34	26,05	29,33	9,35
NUSA TENGGARA	35,15	41,48	45,58	46,44	51,10	15,96

Sumber: DJPK, Kemenkeu, 2020

Keterangan: Berdasarkan Data APBD Realisasi (2015-2018), APBD Anggaran 2019 (data Se-Provinsi)

Rasio Belanja Pegawai yang mencerminkan porsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah, diharapkan dapat semakin menurun porsinya, sehingga dapat dioptimalkan untuk belanja modal dan belanja produktif lainnya yang dapat berdampak terhadap peningkatan kinerja perekonomian daerah. Total belanja pegawai antarprovinsi pada periode 2015-2019 seluruhnya menunjukkan peningkatan, dengan belanja pegawai tertinggi terdapat di Provinsi NTT sebesar Rp. 11,02 Triliun, sedangkan di Provinsi NTB sebesar Rp. 8,24 triliun. Pertumbuhan belanja pegawai di Provinsi NTT sebesar 32,01 persen, dan lebih tinggi dibanding Provinsi NTB sebesar 23,34 persen.

Gambar 65 :
Perkembangan Belanja Pegawai dan Rasio Belanja terhadap Total Belanja Tahun 2015-2019



Sumber: DJPK, Kemenkeu, 2020

Keterangan: Berdasarkan Data APBD Realisasi (2015-2018), APBD Anggaran 2019 (data Se-Provinsi)

Rasio belanja pegawai di Provinsi NTB dan NTT menunjukkan tren menurun selama periode 2015-2018 dan meningkat di tahun 2019. Rasio tertinggi di tahun 2019 terdapat di NTB sebesar 37,87 persen, sedangkan di Provinsi NTT sebesar 37,58 persen.

Tabel 57 :

Perkembangan Belanja Pegawai dan Rasio Belanja terhadap Total Belanja Tahun 2015-2019

Provinsi	Belanja Pegawai (Rp. triliun)					Tumbuh ('15-'19)	Rasio Belanja Pegawai/ Total Belanja (%)					Δ ('15-19)
	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
Nusa Tenggara Barat	6,68	7,12	7,12	7,04	8,24	23,34	44,07	40,97	35,18	34,54	37,87	-6,20
Nusa Tenggara Timur	8,35	8,96	8,73	8,64	11,02	32,01	41,80	37,16	34,45	33,16	37,58	-4,22
NUSA TENGGARA	15,04	16,08	15,85	15,68	19,27	28,16	42,78	38,76	34,77	33,77	37,71	-5,07

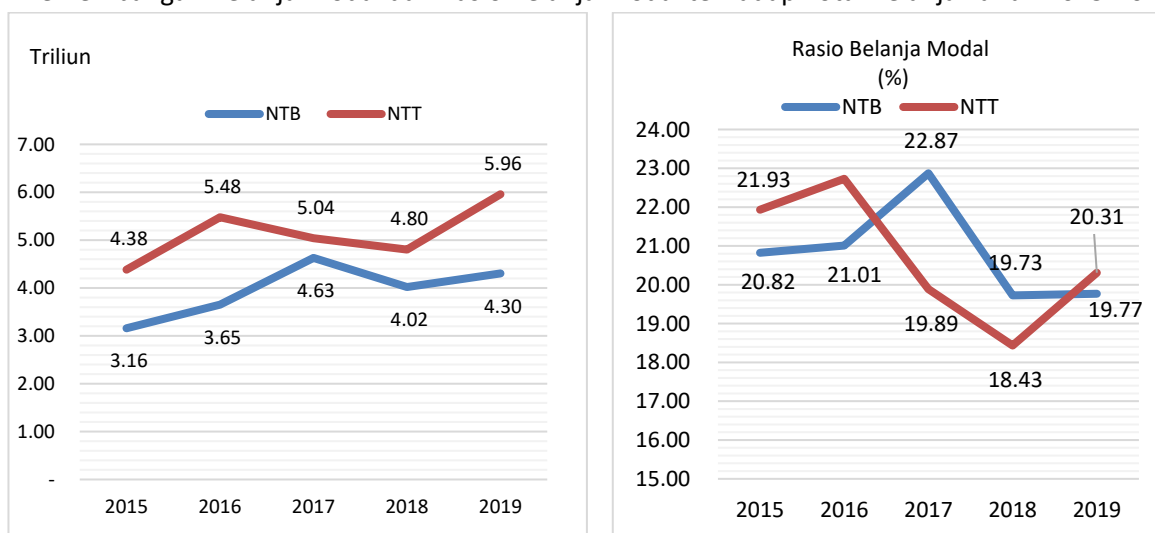
Sumber: DJPK, Kemenkeu, 2020

Keterangan: Berdasarkan Data APBD Realisasi (2015-2018), APBD Anggaran 2019 (data Se-Provinsi)

Rasio Belanja Modal dapat menunjukkan porsi belanja modal yang dibelanjakan terhadap total belanja daerah dalam rangka investasi daerah untuk pembangunan, termasuk pemberian layanan kepada masyarakat. Dengan demikian, rasio belanja modal semakin tinggi menunjukkan kinerja belanja daerah semakin produktif.

Gambar 66 :

Perkembangan Belanja Modal dan Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Tahun 2015-2019



Sumber: DJPK, Kemenkeu, 2020

Keterangan: Berdasarkan Data APBD Realisasi (2015-2018), APBD Anggaran 2019 (data Se-Provinsi)

Secara absolut, belanja modal tahun 2019 tertinggi terdapat di Provinsi NTT sebesar Rp. 5,96 Triliun, dan terendah di Provinsi NTB sebesar Rp. 4,30 triliun. Pertumbuhan belanja modal antarprovinsi pada periode 2015-2019 menunjukkan pertumbuhan positif, dengan angka tertinggi di Provinsi NTB sebesar 36,24 persen, dan Provinsi NTT sebesar 35,95 persen.



Berdasarkan gambaran rasio belanja modal terhadap total belanja seluruh provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2015 sebesar 21,46 persen berkurang sebesar 1,38 persen menjadi 20,08 persen pada tahun 2019. Rasio belanja modal antarprovinsi pada periode 2015-2019, di Provinsi NTB dan NTT menunjukkan tren fluktuatif dan cenderung menurun, dengan rasio belanja modal tahun 2019 di Provinsi NTT sebesar 20,31 persen, lebih tinggi dari Provinsi NTB sebesar 19,77 persen.

Tabel 58 :

Perkembangan Belanja Modal dan Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Tahun 2015-2019

Provinsi	Belanja Modal (Rp. triliun)					Tumbuh ('15-'19)	Rasio Belanja Modal/ Total Belanja (%)					Δ ('15-19)
	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
Nusa Tenggara Barat	3,16	3,65	4,63	4,02	4,30	36,24	20,82	21,01	22,87	19,73	19,77	-1,06
Nusa Tenggara Timur	4,38	5,48	5,04	4,80	5,96	35,95	21,93	22,73	19,89	18,43	20,31	-1,62
NUSA TENGGARA	7,54	9,13	9,67	8,82	10,26	36,07	21,46	22,01	21,21	19,00	20,08	-1,38

Sumber: DJPK, Kemenkeu, 2020

Keterangan: Berdasarkan Data APBD Realisasi (2015-2018), APBD Anggaran 2019 (data Se-Provinsi)

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu, dan untuk menunjukkan keberbandingannya digunakan Indeks Kapasitas Fiskal. Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk: (a) pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah; (b) penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, jika dipersyaratkan; dan/ atau (c) penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gambaran peta kapasitas fiskal ini menggambarkan APBD provinsi di wilayah Nusa Tenggara.

Kapasitas fiskal di Provinsi NTB menunjukkan perkembangan yang konstan tidak ada perubahan dengan kategori rendah selama periode 2015-2017. Sementara di Provinsi NTT menunjukkan tren konstan dengan kategori rendah selama periode 2015-2018, dan menurun menjadi kategori sangat rendah di tahun 2019.

Tabel 59 :

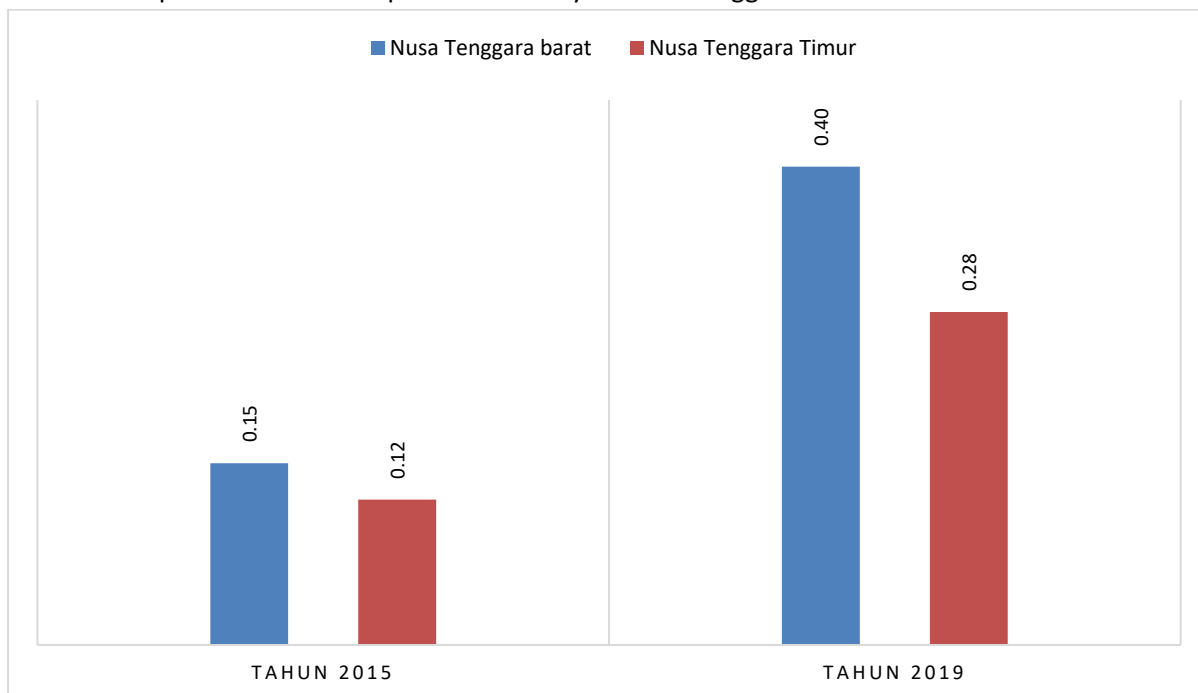
Peta Kapasitas Fiskal Antarprovinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2019

Provinsi	2015		2016		2017		2018		2019	
	IKF	Kategori	IKF	kategori	IKF	kategori	IKF	kategori	IKF	Kategori
Nusa Tenggara Barat	0,15	rendah	0,18	rendah	0,45	Rendah	0,48	Rendah	0,40	Rendah
Nusa Tenggara Timur	0,12	rendah	0,16	rendah	0,39	Rendah	0,40	Rendah	0,28	Sangat Rendah

Sumber: www.Jdih.kemenkeu.go.id

Gambar 67 :

Peta Kapasitas Fiskal Antarprovinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015 dan Tahun 2019



Sumber: www.Jdih.kemenkeu.go.id



PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

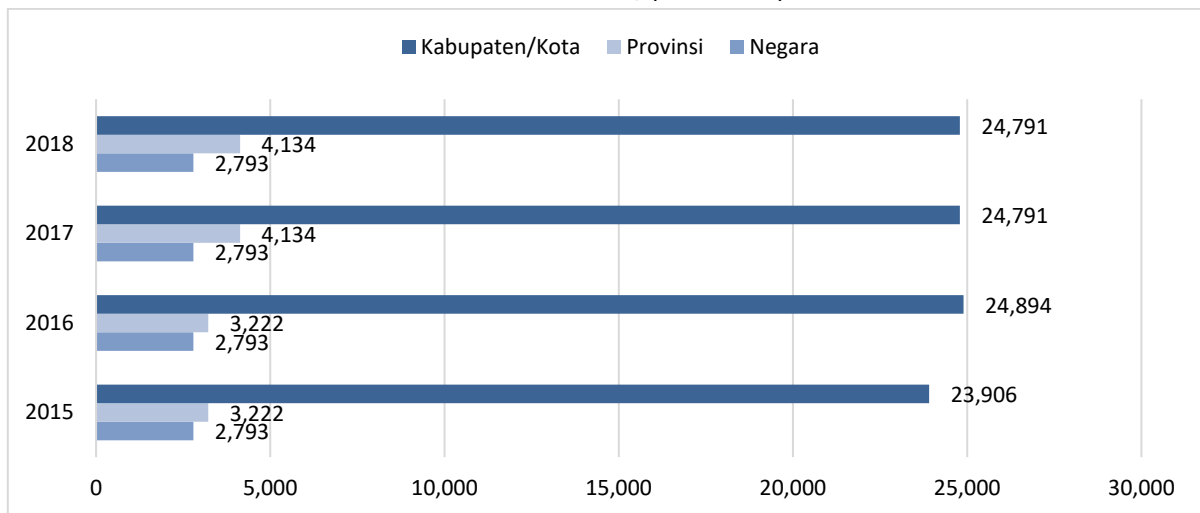
- ❖ Pada tahun 2018 total panjang jalan di wilayah Nusa Tenggara tercatat sepanjang 31.718 km dengan panjang jalan negara sepanjang 2.793 km, jalan provinsi sepanjang 4.134 km, dan jalan kabupaten sepanjang 24.791 km.
- ❖ Kondisi kualitas jalan di wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2018 rata-rata termasuk ke dalam kategori Mantap (baik+sedang), yaitu mencapai 62,14 persen dan kondisi Tidak Mantap sebesar 37,86 persen dari total panjang jalan. Rata-rata persentase panjang jalan (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) dengan kualitas mantap terbesar dicapai oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- ❖ Produksi listrik tahun 2018 mencapai 2,21 ribu GWh atau naik sebesar 2,2 persen dari produksi tahun 2017. Produksi energi listrik di wilayah Nusa Tenggara sebagian besar dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yaitu mencapai 55 persen dan PLTMG sebesar 39 persen.
- ❖ Perkembangan rasio elektrifikasi, dalam kurun waktu 2016-2019 wilayah Nusa Tenggara meningkat walaupun masih berada di bawah rata-rata rasio elektrifikasi nasional. Pada tahun 2019 seluruh provinsi di wilayah Nusa Tenggara memiliki angka rasio elektrifikasinya di bawah nasional namun Provinsi Nusa Tenggara Barat yang paling mendekati di angka 98,66.

5.1. Jalan

Perkembangan panjang jalan dalam empat tahun terakhir mengalami kenaikan di tahun 2015-2017, sedangkan di tahun 2018 tidak mengalami penambahan ruas jalan (**Gambar 68**). Pada tahun 2018 total panjang jalan di wilayah Nusa Tenggara tercatat sepanjang 31.718 km dengan panjang jalan negara sepanjang 2.793 km, jalan provinsi sepanjang 4.134 km, dan jalan kabupaten sepanjang 24.791 km.

Gambar 68:

Perkembangan Panjang Jalan menurut Kewenangan di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2018, (dalam Km)



Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum, 2020

Kondisi kualitas jalan di wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2018 rata-rata termasuk ke dalam kategori Mantap (baik+sedang), yaitu mencapai 62,14 persen dan kondisi Tidak Mantap sebesar 37,86 persen dari total panjang jalan. Rata-rata persentase panjang jalan (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) dengan kualitas Mantap terbesar dicapai oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan persentase yaitu mencapai 66,19 persen, dan untuk kualitas jalan dengan kelompok Tidak Mantap mencapai 44,91 persen. (**Tabel 60**).

Tabel 60:

Kualitas Jalan menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2018

Provinsi	Jalan Provinsi		Jalan Kabupate		Jalan Kota	
	% Mantap	% Tidak Mantap	% Mantap	% Tidak Mantap	% Mantap	% Tidak Mantap
Nusa Tenggara Barat	77,2	22,8	55,2	44,8	75,17	24,83
Nusa Tenggara Timur	63,7	36,3	49,6	50,4	51,94	48,06

Sumber: Statistik Perhubungan, BPS

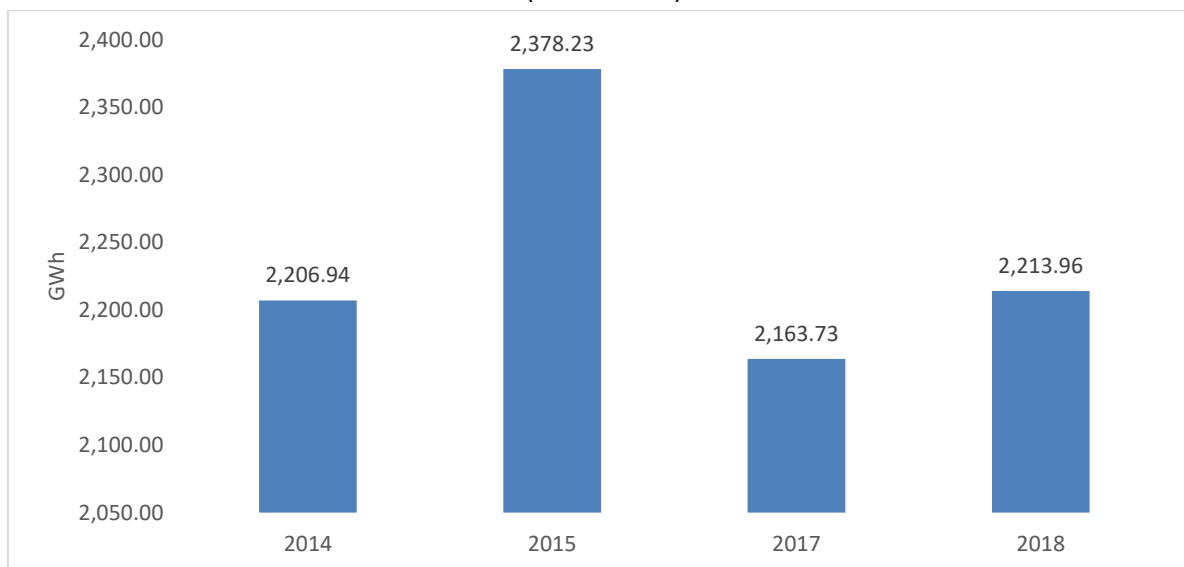


5.2. Listrik

Perkembangan produksi energi listrik di wilayah Nusa Tenggara meningkat, hanya di tahun 2017 terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2015 dan tahun 2018. Produksi listrik tahun 2018 mencapai 2,21 ribu GWh atau naik sebesar 2,2 persen dari produksi tahun 2017 (**Gambar 69**). Produksi energi listrik di wilayah Nusa Tenggara sebagian besar dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yaitu mencapai 55 persen dan PLTMG sebesar 39 persen (**Gambar 70**).

Gambar 69:

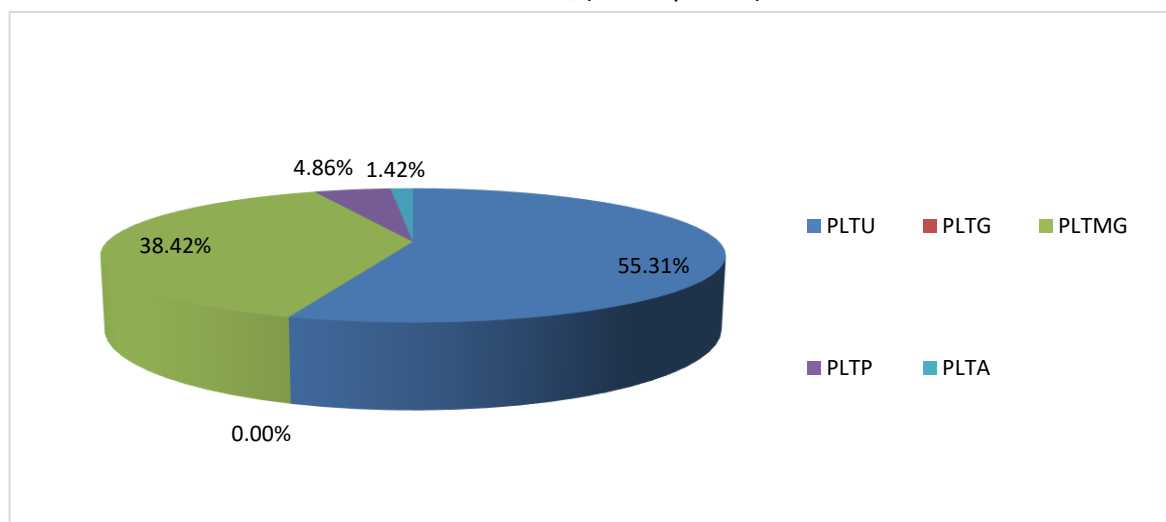
Perkembangan Energi yang Diproduksi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2014-2018, (dalam GWh)



Sumber : BPS, 2020

Gambar 70:

Komposisi Produksi Energi Listrik menurut Jenis Pembangkit di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2019, (dalam persen)

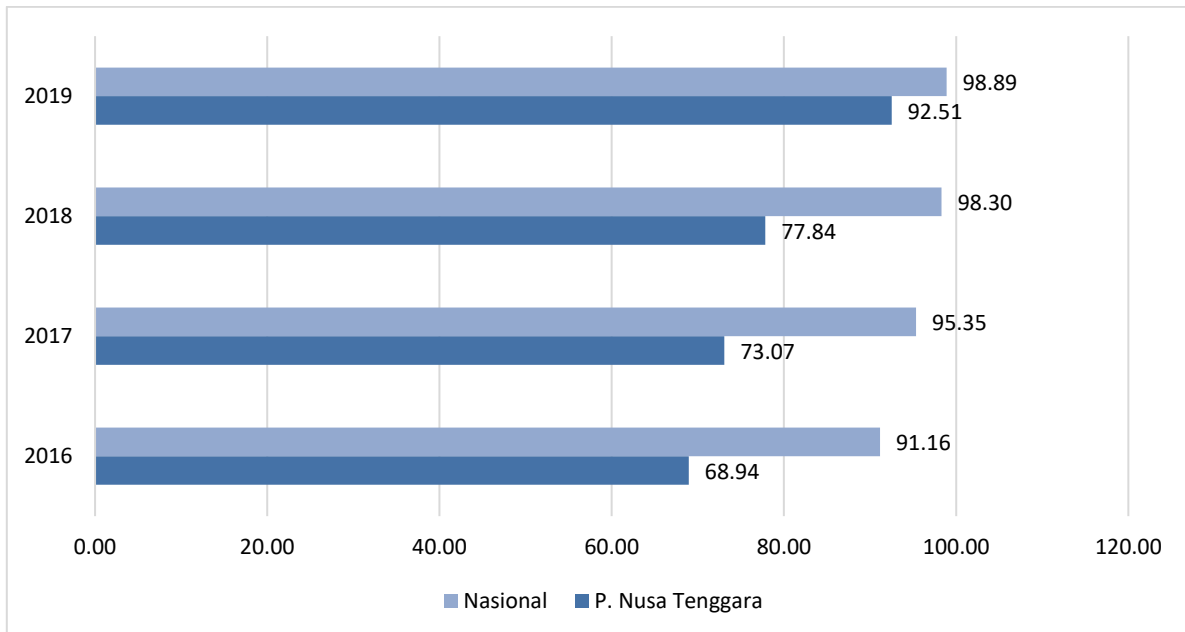


Sumber : Statistik Ketenagalistrikan, 2020

Perkembangan rasio elektrifikasi, dalam kurun waktu 2016-2019 wilayah Nusa Tenggara meningkat walaupun masih berada di bawah rata-rata rasio elektrifikasi nasional. Capaian rasio elektrifikasi tahun 2016 mencapai 68,94 persen, lebih rendah 22,22 dibandingkan dengan nilai nasional (**Gambar 71**). Capaian rasio elektrifikasi di tahun 2019 mengalami peningkatan 23,57 persen, masih lebih tinggi dibandingkan dengan nasional 6,38 persen. Pada tahun 2019 seluruh provinsi di wilayah Nusa Tenggara memiliki angka rasio elektrifikasinya di bawah nasional. (**Gambar 72**).

Gambar 71:

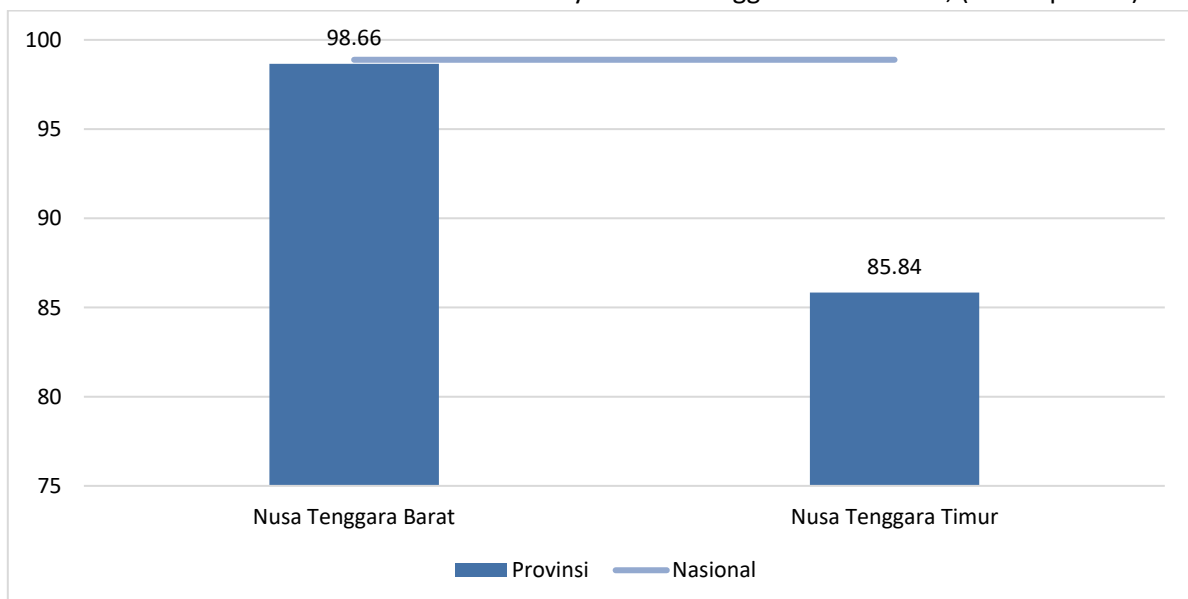
Perkembangan Rasio Elektrifikasi Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2016-2019, (dalam persen)



Sumber: statistik ketenagalistrikan, 2020

Gambar 72:

Rasio Elektrifikasi menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2019, (dalam persen)



Sumber: statistik ketenagalistrikan, 2020



06

Pengembangan Wilayah

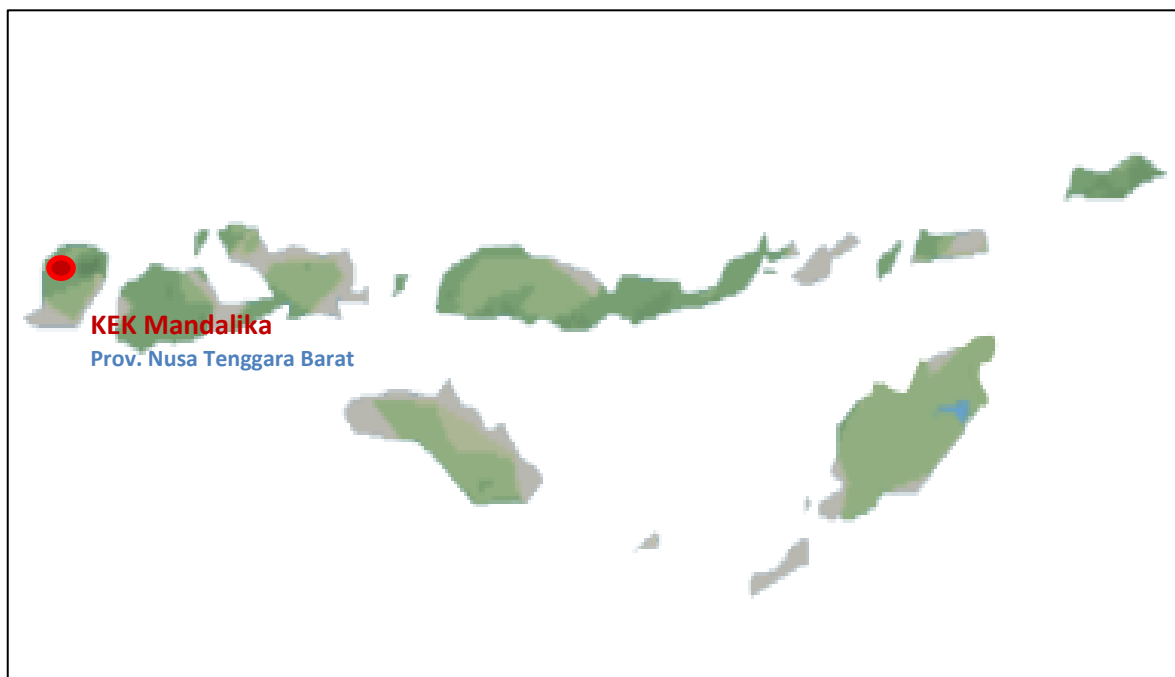
6.1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Wilayah Nusa Tenggara



Di wilayah Nusa Tenggara terdapat 1 KEK yaitu KEK Mandalika yang sudah berstatus operasional.

Gambar 73 :

Kawasan Ekonomi Khusus di Wilayah Nusa Tenggara



Sumber: Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan, BAPPENAS 2020

KEK Mandalika berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan total luas wilayah 1.035,67 Hektar. BUPP KEK Mandalika adalah PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) atau PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero), yang merupakan BUMN di bidang pengembangan dan manajemen pariwisata terintegrasi. Salah satu preseden kawasan yang dikelola oleh PT ITDC adalah The Nusa Dua. KEK Mandalika ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2014 dan telah diresmikan pada tanggal 20 Oktober 2017. KEK Mandalika memiliki kegiatan utama pengembangan pariwisata (hotel, resort, dan MICE).

KEK Mandalika menjadi salah satu KEK berbasis pariwisata yang memiliki progres pengembangan yang signifikan. KEK Mandalika diharapkan dapat mengakselerasi sektor pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sangat potensial, dengan mengangkat tema wisata alam dan olahraga dan mempertimbangkan kerentanan akan bencana, seperti yang terjadi di Lombok pada tahun 2018 lalu.

Gambar 74 :
Masterplan KEK Mandalika



Sumber: Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan, BAPPENAS 2020

Untuk menuju KEK Mandalika, dapat melalui jalur darat, udara, dan laut. Jalur darat, dapat melalui Jalan Kuta – Lombok sepanjang 19 km. Sementara untuk jalur udara dapat melalui Bandara Internasional Lombok di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, NTB. Jalur laut, dapat melalui Pelabuhan Lembar di Lembar, jika datang melalui/akan menyeberang ke Pelabuhan Padang Bai, Bali. Pelabuhan Lembar berjarak 46 km dari KEK Mandalika. Pilihan lainnya adalah Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur, jika datang melalui/akan menyeberang ke Pelabuhan Pototano, Sumbawa Besar. Pelabuhan Kayangan berjarak 86,2 km dari KEK. Pilihan lainnya adalah Pelabuhan Bangsal di Lombok Utara, jika akan menyeberang ke/datang dari Gili Trawangan. Pelabuhan Bangsal berjarak 79,3 km dari KEK.

Amenitas dan atraksi di KEK Tanjung Kelayang masih dalam proses pembangunan. Pembangunan amenitas yang direncanakan dalam 5 tahun ke depan adalah melalui penyediaan 102 Room Keys yang akan beroperasi di Novotel, 2.485 Room Keys dan MA/LUDA yang disepakati, dan kurang lebih 1.050 Room Keys yang telah direncanakan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 61 :
Rencana Pengembangan Amenitas KEK Mandalika

No	Tahun Operasional	Timbulan Jumlah Kamar	Kumulatif Jumlah Kamar Berdasarkan Max AR	Timbulan Jumlah Kamar Sesuai Financial Model	Kumulatif Jumlah Kamar Sesuai Financial Model
1	2020	1908	1908	1285	1285
2	2021	1504	3412	251	1536
3	2022	1363	4775	1378	2914
4	2023	2061	6836	1655	4569
5	2024	1599	8435	495	5064
6	2025	1309	9744	1166	6230



No	Tahun Operasional	Timbulan Jumlah Kamar	Kumulatif Jumlah Kamar Berdasarkan Max AR	Timbulan Jumlah Kamar Sesuai Financial Model	Kumulatif Jumlah Kamar Sesuai Financial Model
7	2026	522	10266	522	6752
8	2027	766	11032	833	7585
9	2028	2364	13396	620	8205
10	2029	2133	15529	1005	9210
11	2030	963	16492	1034	10244
12	2031	1849	18340	728	10972
13	2032	1114	19454	1114	12086
14	2033	2053	21507	958	13022
15	2034	2144	23652	1132	14176
16	2035	2534	26185	1229	15405
17	2036	261	26446	261	15666
18	2037	314	26760	315	15981
19	2038	151	26911	151	16132
20	2039	351	27262	689	16821
21	2040	351	27613	154	16975

Sumber: Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan, BAPPENAS 2020

Saat ini KEK Mandalika telah dan akan dilengkapi oleh amenities berstandar internasional, di antaranya yaitu:

1. Venue MICE dan Street Circuit
 - a. Sirkuit Street Race Musiman yang ditujukan untuk Balapan Hybrid dan Elektronik (E-Races)
 - b. Fasilitas hiburan untuk Maraton, Triatlon, dan jenis olahraga lainnya
 - c. Convention Center
2. 27 Hole Golf Course
 - a. Lapangan Golf berstandar PGA
 - b. Dirancang oleh tim profesional dan berpengalaman
 - c. Didukung panorama laut
3. International Branded Theme Park
 - a. Kawasan yang memiliki akses pantai
 - b. Taman dengan konsep tertentu
4. Marina Sea Front
 - a. 78 Berth dengan Terminal Ferry dan Cruise
 - b. Area komersial
 - c. Layanan lalu lintas laut antara Asia Tenggara dan Australia

Gambar 75 :

Gambar Rencana Pengembangan KEK Mandalika



Keterangan gambar:

- a** Kalicaa Villa Estate
- b** Rencana Theme Park
- c** Ilustrasi Marina Sea Front

Sumber: Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan, BAPPENAS 2020

Pasca gempa bumi Lombok tahun 2018, PT ITDC dengan Tim Forensik Universitas Brawijaya telah melakukan uji kelayakan bangunan. Berdasarkan tes tersebut, seluruh bangunan di KEK Mandalika dinyatakan aman dan masih dapat menahan beban yang ada termasuk beban gempa. Kini PT ITDC merancang Pedoman Tata Bangunan dan Lingkungan, salah satu lingkup aturannya adalah bangunan dibuat secara vertikal/diagonal agar dapat membelah alur gelombang tsunami. Sementara untuk hotel dan *resort* yang berlokasi di bibir pantai, diharuskan menetapkan *ground floor* sebagai fasilitas publik dengan struktur dinding yang mudah diterobos.

PT ITDC juga menyediakan fitur publik untuk mengurangi kekuatan arus gelombang tsunami seperti kolam, laguna, area evakuasi/titik kumpul yang memiliki struktur kuat dan mampu menampung seluruh pengguna bangunan, termasuk penyediaan kelengkapan alat bantu keamanan dan keselamatan. Hal ini juga dilengkapi dengan penanaman jenis vegetasi rendah yang tertanam kuat di tanah, diyakini dapat membantu mengurangi kekuatan arus gelombang tsunami sebelum berbenturan langsung dengan bangunan.

Titik-titik evakuasi di kawasan The Mandalika tersebar di tiga zona yakni zona lingkungan bina Barat, Tengah dan Timur. Zona lingkungan bina Barat terdiri dari beberapa area seperti Bukit Masjid Nurul Bilad, Bukit Benjon, Bukit Merese dan Tanjung Aan. Zona lingkungan bina Tengah terdiri dari Bukit Pongos, Bukit Sebango dan West Circle Hub di area Dusun Ebunut. Sementara untuk zona lingkungan bina Timur terdiri dari Bukit Gerupuk, Bukit Nandus dan East Circle Hub di area Desa Mertak.

PT ITDC selaku BUMN merupakan *anchor investor* bagi KEK Mandalika. Proyek pionir yang sedang dibangun adalah Pullman Hotel, dengan 260 room keys dan Villa. Hingga bulan April 2019, progres pembangunan hotel tersebut telah berjalan sejauh 38,39 persen, dan rencananya akan melakukan soft opening di kuartir kedua tahun 2020. Perkiraan nilai investasi KEK Mandalika untuk bidang infrastruktur adalah sebesar Rp 4,54 T (selama 9 tahun), dan untuk asset produktif adalah sebesar Rp 1,35 T (untuk Hotel Club Med dan Hotel Pullman). Total investasi kawasan adalah sebesar US\$3 Milyar (atau sekitar Rp 40 T).

Tabel 62:
Perkembangan Investasi KEK Mandalika

No	Nama Investor	Luas (ha)	Fasilitas	Nilai Investasi (Rp. miliar)
1	ITDC/ PT Kuta Mandalika Nusantara	4,8	Pullman Hotel	Rp 658
2	PT Lees International Development	3,25	Royal Tulip Hotel	Rp 132
3	PT Perusahaan Air Indonesia Amerika	2	SWRO	Rp 307
4	PT Perusahaan Resort Indonesia Amerika	7,6	Paramount Hotel	Rp 421,8
5	PT Elmar Mitra Perkasa	3,48	Golden Tulip	Rp 270
6	PT Mozaique Jiva One Sky	9,96	Marriot Hotel	Rp 657
7	PT Alam Hijau Mandalika	5,77	Aloft Hotel	Rp 75,63
8	PT Elmar Mitra Perkasa	9,37	Mandalika Beach Club	Rp 30
9	PT Palamarta Kuta Permai	2,84	Marta Hotel	Rp 75
10	PT Mahkota Permata Mandalika	19,3	Grand Aston	Rp 212,34
11	PT Mandalika Jaya Bersama	4,45	Cocomart	Rp 15,52
12		7,8	Laza Hotel	Rp 16,6
	Total	36,07		Rp 2,871
13	Vinci Grand Project	82,2	Sirkuit Moto GP, District Entertainment & Sport, Shaza Resort, Hotel Mysk (Bintang 4 dengan 400 kamar)	Rp 14,200

Sumber: Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan, BAPPENAS 2020



Tabel 63:
Status terakhir KEK Mandalika

Status Akhir 2020		Operasional
Status Lahan (Clear and Clean)		<ul style="list-style-type: none"> - Dari 1.035,67 Ha lahan KEK Mandalika, terdapat 183.8 ha yang sudah dimanfaatkan. - Land clearing zona tengah (area MotoGP) sudah mencapai 81,77% - Masih terdapat lahan enclave di zona sirkuit seluas 13,2 ha (2,01 sudah bebas, 11,2 Ha belum bebas)
Dukungan Infrastruktur	Dalam Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia jalan akses sepanjang 11 km • Gardu induk Menes-Caringin, Rencana Pembangunan Gardu Hubung Circuit • Penyulingan air laut menjadi tawar dikelola oleh PR Perusahaan Air Indonesia Amerika dengan sistem SWRO
	Luar Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Bandara Internasional Lombok berjarak 19 km. • Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali. • Pelabuhan Awang berjarak 12,4 km dari KEK Mandalika • Pelabuhan Lembar berjarak 46 km dari KEK Mandalika. • Pelabuhan Kayangan dan Pelabuhan Bangsal berjarak 86,2 km dan 79,3 km dari KEK. • Terdapat Jalan Strategis Nasional Tanah Awu – Kuta sejauh 19,47 km • Jalan Nasional Mataram-Mandalika • Penambahan kapasitas Gardu Induk Kuta 180MVA dari PLN • PLTS seluas 1200 Ha, kapasitas 50 MW oleh Pertamina EBT • IPA Jai Praya 200 L/detik, Rencana Pembangunan Bendungan Mujur berjarak 21 km • TPA Pengingat
Regulasi / Kelembagaan	RTRW/ Regulasi	RTRW : Kecamatan Pujut sebagai lokasi KEK Mandalika diperuntukkan sebagai kawasan objek wisata alam dalam RTRW Kab Lombok Tengah 2011-2031. Sementara itu, wilayah Kuta merupakan bagian dari Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Lombok yang diarahkan menjadi objek daerah tujuan wisata dalam dokumen RTRW Provinsi NTB Tahun 2006
	Organisasi/ Badan Pengelola	PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)
Rekomendasi		Percepatan investasi

Sumber: Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan, BAPPENAS 2020

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, PT ITDC (selaku BUPP KEK Mandalika), dan investor sedang berkolaborasi untuk percepatan pembangunan KEK Mandalika dalam rangka mempersiapkan MotoGP 2021. Progres fisik pembangunan MotoGP sendiri sudah mencapai 42,14 persen, dengan target beroperasi pada Oktober 2021. Pembangunan sirkuitnya dilakukan oleh Vinci Grand Project selaku anchor investor yang sudah menandatangani master agreement dengan komitmen investasi \$1M selama 15 tahun. Untuk infrastruktur jalan dalam kawasan telah dibangun melalui sumber dana PMN dan ke depan menggunakan dana dari AIB dan NIA. Dukungan pembangunan infrastruktur di luar kawasan seperti jalan akses, pelabuhan, bandara, listrik, limbah, TPS, dan marina untuk yacht terus dilakukan untuk memudahkan aksesibilitas dan kesiapan logistik. PT ITDC juga sudah menandatangani kontrak dengan 12 investor lokal untuk membangun sarana kawasan dengan total estimasi investasi mencapai Rp. 2,87 T. Sementara itu, dukungan layanan publik yang dibutuhkan adalah pembangunan Rumah Sakit Internasional yang diperlukan untuk mendukung layanan perkotaan berstandar internasional khususnya untuk kesiapan para atlet.

Pemberian manfaat kepada masyarakat difasilitasi melalui pembangunan homestay untuk merelokasi masyarakat ke daerah penyangga KEK Mandalika. Selain itu, PT ITDC sedang mengusulkan PEN yang dapat membantu proses pengembangan KEK Mandalika dan pemulihan Covid-19, yang akan disalurkan salah satunya untuk pembangunan Bazar UMKM yang dapat mengisi kuota 303 kios dan diperkirakan dapat menyerap 300 tenaga kerja.

6.2. Pembangunan Daerah Tertinggal

Daerah Tertinggal. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024, telah ditetapkan sebanyak 62 daerah (kabupaten). Berdasarkan jumlah kabupaten tersebut, maka selama periode 2015-2019 telah berhasil mengentaskan sebanyak 60 kabupaten dari 122 kabupaten tertinggal. Ada enam kriteria terkait penetapan daerah tertinggal, yaitu: (a) perekonomian masyarakat; (b) sumber daya manusia; (c) sarana dan prasarana; (d) kemampuan keuangan daerah; (e) aksesibilitas; dan (f) karakteristik daerah.

Tabel 64:

Daerah Tertinggal di Wilayah Nusa Tenggara meliputi 14 Kabupaten sebagai berikut:

No	Provinsi	Kabupaten		Provinsi	Kabupaten
1	Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	8	Nusa Tenggara Timur	Lembata
2	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	9	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao
3	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	10	Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah
4	Nusa Tenggara Timur	Kupang	11	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya
5	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	12	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur
6	Nusa Tenggara Timur	Belu	13	Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua
7	Nusa Tenggara Timur	Alor	14	Nusa Tenggara Timur	Malaka

Provinsi NTT memiliki daerah tertinggal terbanyak yaitu 13 kabupaten, sementara di Provinsi NTB hanya terdapat 1 kabupaten (Lombok Utara). dari total 14 kabupaten/kota. Ketertinggalan daerah-daerah di wilayah Nusa Tenggara secara umum disebabkan oleh terbatasnya ketersediaan infrastruktur ekonomi dan sosial, rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan masih tingginya tingkat kemiskinan, serta belum meratanya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan bermutu.

Gambaran umum daerah tertinggal di wilayah Nusa Tenggara disajikan pada **Tabel 63**, dengan beberapa indikator yang menggambarkan kondisi daerah tertinggal, di antaranya adalah: IPM, PDRB per kapita, tingkat pengangguran, dan kemiskinan, sesuai dengan data yang tersedia. Menurut data IPM tahun 2019, tingkat pembangunan sumberdaya manusia di 14 daerah tertinggal di wilayah Nusa Tenggara masih rendah, hal ini ditunjukkan dengan nilai IPM tertinggi di Kabupaten Sumba Timur baru mencapai 65,34, masih jauh berada di bawah IPM nasional (71,92). Sementara itu, IPM terendah berada di Kabupaten Sabu Raijua (56,66), dan Kabupaten Malaka (60,34). Berdasarkan perhitungan reduksi *shortfall* per tahun (*annual reduction in shortfall*) pada periode 2015-2019 yang mengindikasikan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang harus ditempuh untuk mencapai IPM ideal (IPM =100), IPM Kabupaten Rore Ndao (62,22) dengan reduksi *Shortfall* (1,75), dan Kabupaten Lombok Utara (IPM 64,49, dengan reduksi *shortfall* 1,71) termasuk kategori peningkatan IPM cepat (>1,70), sementara itu kabupaten lainnya termasuk kategori



menengah (1,5-1,7), bahkan Kabupaten Belu (IPM 62,54, reduksi *shortfall* 1,50) sudah termasuk diambang batas lambat.

Berdasarkan perkembangan PDRB per kapita (ADHB) pada tahun 2018, seluruh kabupaten daerah tertinggal memiliki PDRB per kapita jauh di bawah PDB per kapita nasional (Rp. 55,99 juta), dengan PDRB tertinggi berada di Kabupaten Sumba Timur (Rp. 22,93 juta), dan Lombok Utara (Rp. 20,42 Juta). Sementara itu, PDRB terendah berada di Kabupaten Sumba Barat Daya (Rp. 10,29 juta) dan Manggarai Timur (Rp. 10,56 juta). Berdasarkan perkembangan pada periode 2015-2018, peningkatan PDRB tertinggi berada di Kabupaten Sumba Timur (Rp. 4,6 juta), dan terendah di Kabupaten Sumba Barat Daya (Rp. 1,86 juta).

Dilihat dari indikator kemiskinan semester 1 tahun 2020, seluruh kabupaten tertinggal berada di bawah tingkat kemiskinan nasional (9,78%). Tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Sumba Tengah (34,49%), Sabu Raijua (30,18%). Sementara itu, tingkat kemiskinan terendah berada di Kabupaten Belu (15,37%), dan Kabupaten Malaka (16,04%). Berdasarkan perkembangan pada periode 2015-2020, tingkat kemiskinan di setiap kabupaten menunjukkan penurunan, dengan penurunan tertinggi dan signifikan terdapat di Kabupaten Lombok Utara sebesar 7,14 persen, dan penurunan terendah di Kabupaten Kupang sebesar 0,60 persen.

Berdasarkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2019, sebagian besar kabupaten sudah berada di bawah TPT Nasional (5,01%), kecuali TPT Kabupaten Belu (7,19%). Sementara itu, TPT terendah berada di Kabupaten Sumba Barat daya (1,25%) dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (1,94%). Berdasarkan perkembangan pada periode 2015-2019, terjadi peningkatan dan penurunan TPT di sebagian kabupaten. Penurunan TPT tertinggi berada di Kabupaten Sabu Raijua sebesar 4,87 persen, sedangkan peningkatan TPT tertinggi berada di Kabupaten Belu (1,80%).

Tabel 65 :

Karakteristik Daerah Tertinggal di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015/2019

Kabupaten	IPM			Persentase Penduduk Miskin (Persen)			PDRB Per kapita			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
	2015	2019	Reduksi <i>Shortfall</i>	2015	2020	Δ (2015 - 2019)	2015	2018**	Δ (2015 - 2018)	2015	2019	Δ (2015 - 2019)
NUSA TENGGARA BARAT												
Lombok Utara	61,15	64,49	1,71	34,13	26,99	-7,14	17.045	20.423	3.378	2,15		
NUSA TENGGARA TIMUR												
Sumba Barat	61,36	63,56	1,54	30,56	28,17	-2,39	13.460	17.014	3.554	1,80	3,15	1,35
Sumba Timur	62,54	65,34	1,65	31,74	29,65	-2,09	18.293	22.927	4.634	3,14	2,13	-1,01
Kupang	62,04	64,43	1,58	23,37	22,77	-0,60	15.685	18.436	2.751	4,15	4,48	0,33
Timor Tengah Selatan	59,90	62,23	1,55	31,12	27,49	-3,63	12.098	15.871	3.773	3,47	1,94	-1,53
Belu	60,54	62,54	1,50	16,81	15,37	-1,44	14.927	19.467	4.540	5,39	7,19	1,80
Alor	58,50	61,03	1,57	22,92	21,09	-1,83	10.971	13.925	2.954	3,59	3,03	-0,56
Lembata	62,16	64,91	1,64	27,13	26,14	-0,99	10.079	12.314	2.235	3,05	4,31	1,26
Rote Ndao	58,32	62,22	1,75	30,49	27,54	-2,95	14.628	17.624	2.996	2,37	2,73	0,36
Sumba Tengah	57,91	61,01	1,65	36,22	34,49	-1,73	12.098	15.251	3.153	2,87	3,43	0,56
Sumba Barat Daya	60,53	62,60	1,51	30,01	28,00	-2,01	8.430	10.294	1.864	3,81	1,25	-2,56
Manggarai Timur	56,83	60,47	1,70	28,64	26,52	-2,12	8.272	10.558	2.286	2,18	0,95	-1,23
Sabu Raijua	53,28	56,66	1,64	33,17	30,18	-2,99	11.266	13.922	2.656	7,76	2,89	-4,87
Malaka	57,51	60,34	1,61	17,28	16,04	-1,24	10.929	13.698	2.769	4,08	2,34	-1,74
INDONESIA	69,55	71,92	1,67	11,22	9,78	-1,44	45.120	55.987	10.867	5,81	5,01	-0,80

Sumber: Publikasi BPS, 2020

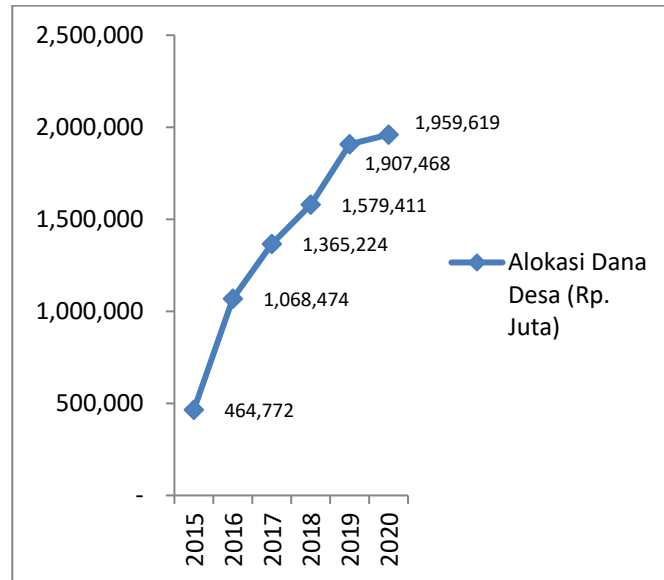
Keterangan: Kategori reduksi *shortfall* pertahun : (a) Sangat lambat jika : < 1,3; (b) Lambat jika : 1,3 – 1,5; (c). Menengah : 1,5 – 1,7; dan (d) Cepat jika : > 1,7.

Dalam rangka percepatan pembangunan di daerah tertinggal di wilayah Nusa Tenggara, alokasi dana desa yang telah dikururkan kepada kabupaten daerah tertinggal di wilayah Nusa Tenggara menunjukkan peningkatan yang signifikan selama periode 2015-2019. Pada tahun 2019 alokasi dana desa telah mencapai 1,96 Triliun yang terbagi kepada 1.727 desa, dengan rata-rata perdesa sebesar 1,134 juta per desa.

Rincian pagu dana desa menurut kabupaten-kabupaten daerah tertinggal di wilayah Nusa Tenggara dapat dilihat pada Gambar 77 dan Tabel 66, Kabupaten Timur Tengah Selatan merupakan kabupaten daerah tertinggal yang mendapatkan alokasi tertinggi (292,71 milyar rupiah) yang didistribusikan untuk 266 desa, atau rata-rata perdesa sebesar Rp 1,10 juta.

Gambar76:

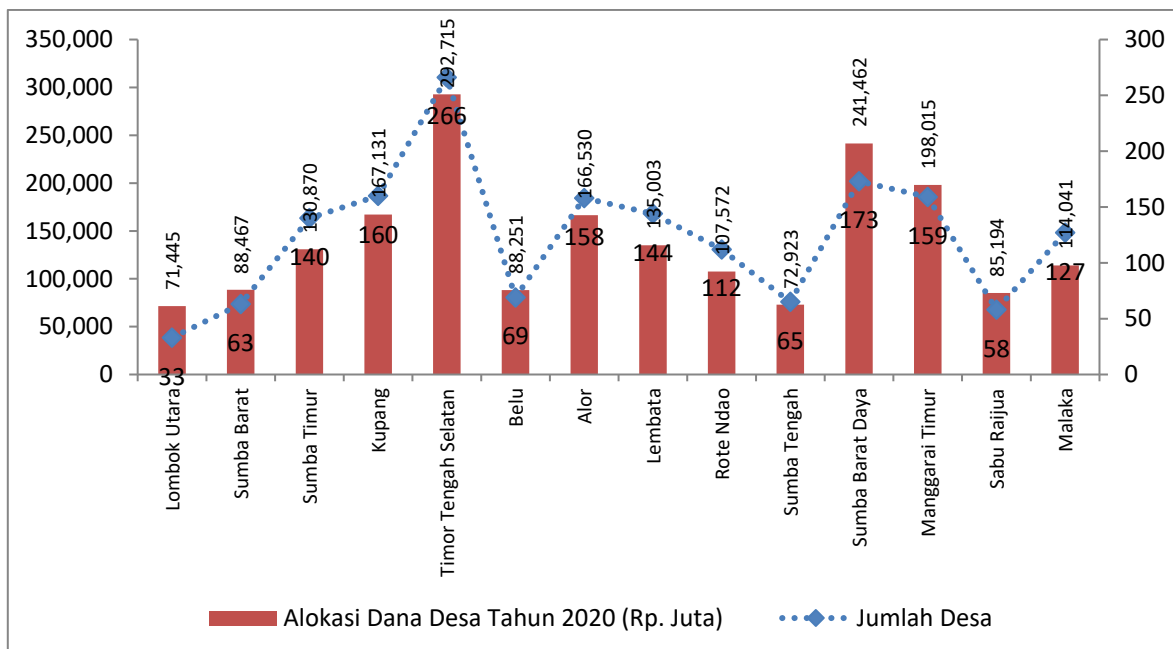
Alokasi Dana Desa untuk Daerah Tertinggal di Wilayah Nusa Tenggara Periode 2015-2020.



Sumber Data: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>

Gambar 77:

Alokasi Dana Desa Setiap Kabupaten Daerah Tertinggal di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2020



Sumber Data: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>



Tabel 66 :
Perkembangan Alokasi Dana Desa untuk Daerah Tertinggal di Wilayah Nusa Tenggara
Periode 2015-2019

No	Provinsi	Kabupaten	JML DESA 2020	Pagu Dana Desa (Rp. Juta)					
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	NTB	Lombok Utara	33	12.025	27.023	34.848	49.434	64.347	71.445
2	NTT	Sumba Barat	63	18.631	41.812	53.562	67.192	85.550	88.467
3	NTT	Sumba Timur	140	39.136	87.753	112.135	108.474	125.909	130.870
4	NTT	Kupang	160	44.658	100.747	128.307	136.520	165.134	167.131
5	NTT	Timor Tengah Selatan	266	73.623	165.176	210.759	233.687	287.091	292.715
6	NTT	Belu	69	19.579	43.936	56.139	72.451	84.043	88.251
7	NTT	Alor	158	42.781	95.966	122.522	139.900	163.157	166.530
8	NTT	Lembata	144	38.766	86.964	110.908	114.468	131.833	135.003
9	NTT	Rote Ndao	112	23.228	52.125	66.765	91.825	104.793	107.572
10	NTT	Sumba Tengah	65	18.746	42.064	53.994	59.272	70.607	72.923
11	NTT	Sumba Barat Daya	173	37.937	110.292	140.631	186.636	231.559	241.462
12	NTT	Manggarai Timur	159	43.898	98.520	126.092	160.856	198.015	198.015
13	NTT	Sabu Raijua	58	17.107	38.339	49.314	63.499	85.194	85.194
14	NTT	Malaka	127	34.658	77.758	99.247	95.197	110.237	114.041
			1.727	464.772	1.068.474	1.365.224	1.579.411	1.907.468	1.959.619

Sumber Data: Pusdatin Kemendes PPDT, 2019.

Penyebaran COVID-19 Dan Dampak Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat

7.1. Penyebaran COVID-19

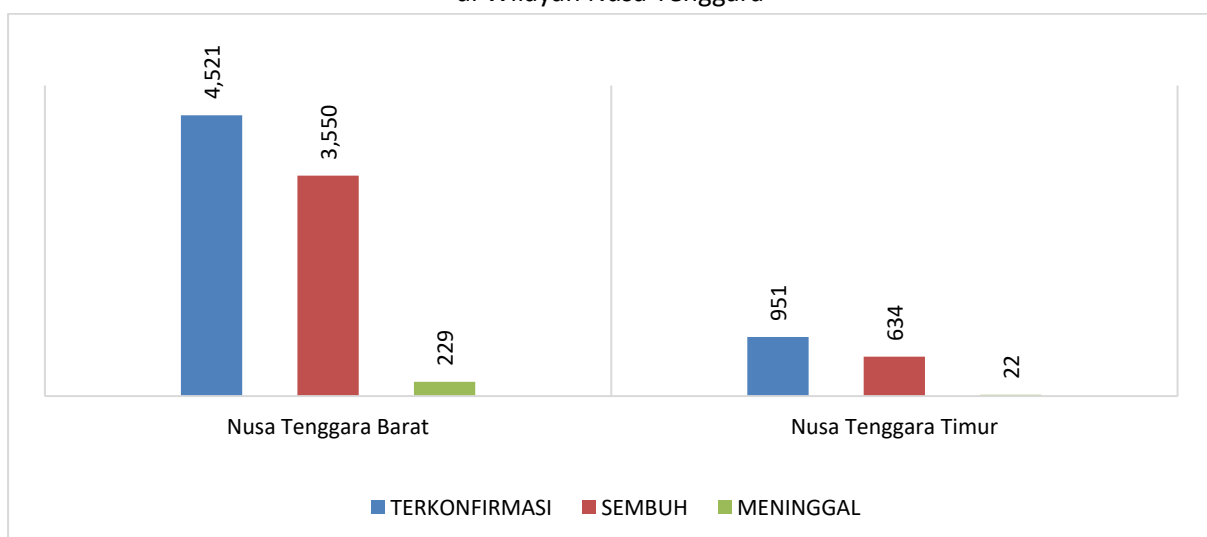
Pandemi Coronavirus jenis baru, telah memberikan dampak luas terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Coronavirus tersebut, ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (Covid-19). Gejala umum berupa demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$, batuk kering, dan sesak napas. Seseorang dapat terinfeksi dari penderita Covid-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut (segitiga wajah), maka orang itu dapat terinfeksi Covid-19.

Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan sumber virus, jenis paparan, dan cara penularan, serta jenis vaksin yang tepat. Berdasarkan perkembangan Covid-19 di Indonesia hingga November 2019, akan terus bertambah hingga proses vaksinasi yang tepat dapat diaplikasikan kepada penduduk Indonesia.

Berdasarkan data yang tersedia hingga awal bulan November 2019, dapat digambarkan penyebaran wabah di masyarakat yang berada di wilayah Nusa Tenggara berdasarkan jumlah terkonfirmasi (terinfeksi), sembuh, dan meninggal akibat Covid-19.

Gambar 78:

Jumlah Terkonfirmasi, Sembuh, dan Meninggal Akibat Covid-19 Antarprovinsi di Wilayah Nusa Tenggara



Sumber: www.covid19.go.id last update: 24-11-2020



Penduduk wilayah Nusa Tenggara yang telah terkonfirmasi terjangkit Covid-19 mencapai 5.472 orang atau 1,10 persen dari total penduduk Indonesia yang terkonfirmasi, dan yang meninggal sebanyak 251 orang (1,61%). Penyebaran antarprovinsi, tertinggi di Provinsi NTB sebanyak 4.521 orang (82,62%) dan yang meninggal sebanyak 229 orang (91,24%). Sedangkan di Provinsi NTT terkonfirmasi sebanyak 951 orang (17,38%) dan meninggal sebanyak 22 orang (8,76%).

Tabel 67:

Jumlah Terkonfirmasi, Sembuh dan Meninggal Akibat Covid-19 Antarprovinsi di Wilayah Nusa Tenggara.

Provinsi	Terkonfirmasi		Sembuh		Meninggal	
	jiwa	%	jiwa	%	jiwa	%
Nusa Tenggara Barat	4.521	82,62	3.550	84,85	229	91,24
Nusa Tenggara Timur	951	17,38	634	15,15	22	8,76
NUSA TENGGARA	5.472	100,00	4.184	100,00	251	100,00

Sumber: www.covid19.go.id last update: 24-11-2020

Berdasarkan data yang tersedia hingga awal November 2019, dampak yang diakibatkan dari pandemi Covid-19 terhadap masyarakat wilayah Nusa Tenggara dapat diinformasikan sebagai berikut:

Dampak Covid-19 Terhadap Pengangguran Terbuka.

Berdasarkan data terakhir pengangguran terbuka pada periode Februari - Agustus 2020, dapat diindikasikan adanya dampak pandemi Covid-19 terhadap peningkatan jumlah dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di wilayah Nusa Tenggara. Dampak tersebut menunjukkan peningkatan jumlah pengangguran terbuka di wilayah Nusa Tenggara sebanyak 83,38 ribu orang, dengan peningkatan jumlah pengangguran terbuka di Provinsi NTT sebesar 48,38 ribu orang, dan Provinsi NTB (35,18 ribu orang). Berdasarkan perkembangan TPT pada bulan Februari - Agustus 2020, Provinsi NTT dan NTB menunjukkan peningkatan jumlah dan tingkat pengangguran terbuka, dengan peningkatan TPT di Provinsi NTT sebesar 4,28 persen, dan Provinsi NTB sebesar 4,22 persen.

Tabel 68:

Perkembangan Pengangguran Terbuka Periode Februari dan Agustus 2020

Provinsi	Jumlah Pengangguran Terbuka (ribu orang)			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
	Feb 2020	Ags 2020	Δ Feb-Ags 2020	Feb 2020	Ags 2020	Δ Feb-Ags 2020
Nusa Tenggara Barat	78,22	113,40	35,18	3,14	4,22	1,08
Nusa Tenggara Timur	73,70	121,90	48,20	2,80	4,28	1,48
NUSA TENGGARA	151,92	235,30	83,38	2,96		

Sumber: Publikasi BPS, Data Sosial Ekonomi November 2020

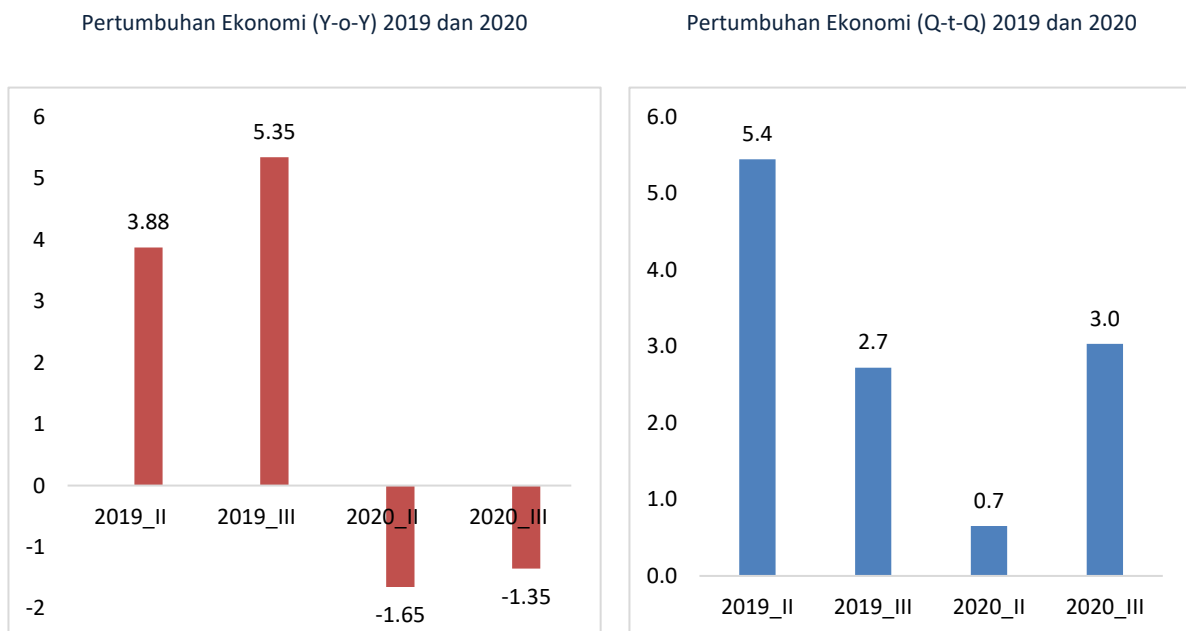
7.2. Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Daerah

Pandemi Covid-19 ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan kinerja perekonomian hamper disebagian besar wilayah di Indonesia. Pada Triwulan II 2020 dengan semakin meluasnya dampak pandemi Covid-19 yang memberikan tekanan pada kinerja perekonomian daerah yang cenderung menurun. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran Covid-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas masyarakat dan barang, yang kemudian menurunkan permintaan domestik serta aktifitas produksi, investasi, dan menurunnya tingkat daya beli masyarakat di berbagai daerah.

Pertumbuhan ekonomi wilayah Nusa Tenggara pada Triwulan II 2020 terkontraksi di angka -1,65 persen (yoy) menurun cukup tajam dibandingkan Triwulan II 2019 yang tumbuh sebesar 3,88 persen (yoy), (**Gambar 79**). Menurunnya kinerja ekonomi ini dipengaruhi oleh menurunnya pertumbuhan dari sektor jasa perusahaan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor transportasi dan pergudangan, dan sektor konstruksi yang tumbuh negatif di Triwulan II 2020 (**Gambar 80**). Pada Triwulan III 2020 kondisi pandemi Covid-19 masih mewarnai kinerja ekonomi daerah, dengan adanya kebijakan new normal mendorong adanya perbaikan terhadap kinerja ekonomi wilayah, tercatat perekonomian wilayah Nusa Tenggara tumbuh sebesar -1,35 persen (yoy) dan 3 persen (qtq). Membaiknya kinerja ekonomi pada Triwulan III 2020 didukung oleh meningkatnya kinerja seluruh sektor yang tumbuh positif, kecuali sektor pertanian yang masih terkontraksi dengan angka -7,6 persen. Pertumbuhan sektor industri pengolahan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, dan sektor transportasi dan pergudangan tumbuh paling tinggi di antara sektor lainnya (**Gambar 80**).

Gambar 79:

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II dan III Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2019 dan 2020



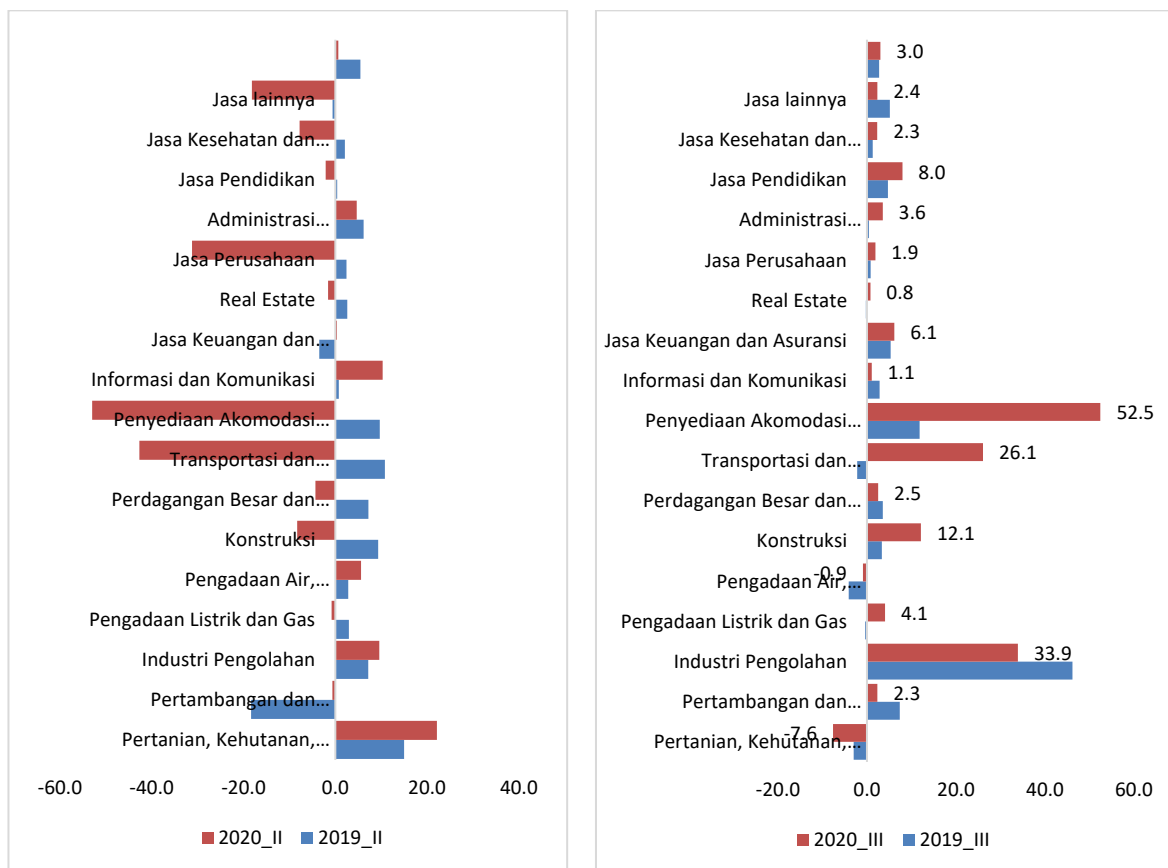


Gambar 80:

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II dan III menurut Lapangan Usaha di Wilayah Nusa Tenggara.

Pertumbuhan PDRB Trwulan II 2020 terhadap Triwulan II 2019 (Y-o_Y)

Pertumbuhan PDRB Trwulan III 2020 terhadap Triwulan III 2019 (Y-o-Y)

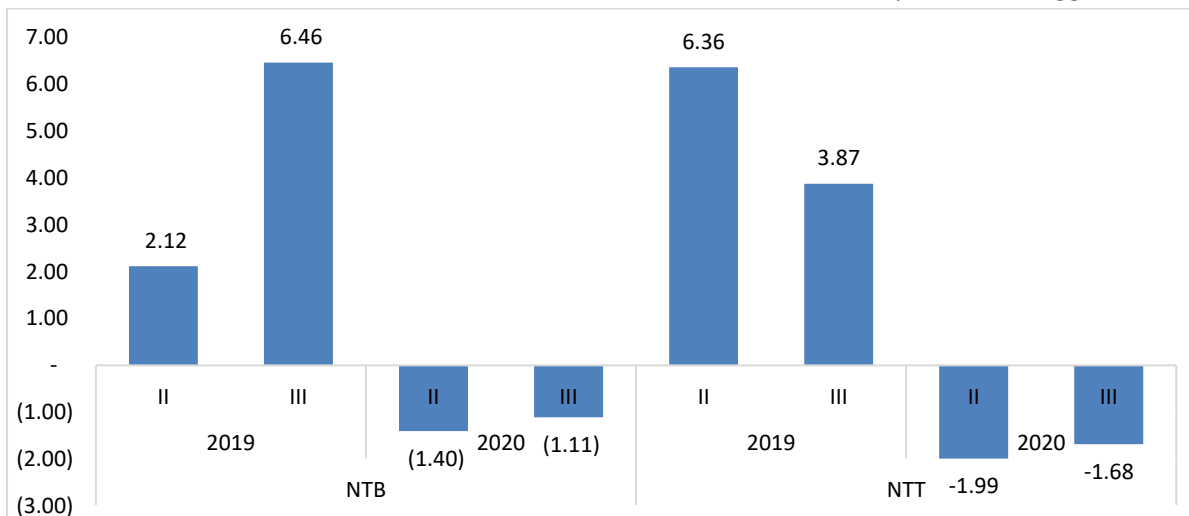


Sumber: Publikasi BPS, Tahun 2020

Kinerja ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur pada Triwulan II 2020 terkontraksi masing-masing pada angka -1,40 persen dan -1,99 persen dibandingkan kinerja ekonomi pada Triwulan II 2019. Penyebaran Covid-19 masih mewarnai terhadap kinerja ekonomi provinsi pada Triwulan III 2020, namun pada Triwulan III setiap provinsi mulai menunjukkan perbaikan. Pada Triwulan III 2020, tercatat Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur tumbuh masing-masing sebesar -1,11 persen dan -1,68 persen sedikit meningkat dibandingkan pertumbuhan Triwulan II 2020 (**Gambar 81**). Sektor-sektor pengungkit terhadap perbaikan kinerja ekonomi di Nusa Tenggara Barat antara lain sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor jasa keuangan, dan sektor informasi dan komunikasi. Sementara untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, antara lain adalah sektor konstruksi, sektor pengadaan listrik dan air, dan sektor informasi dan komunikasi (**Tabel 69**).

Gambar 81:

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II dan III menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara



Sumber: Publikasi BPS, Tahun 2020

Tabel 69:

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II dan III menurut Lapangan Usaha dan Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara

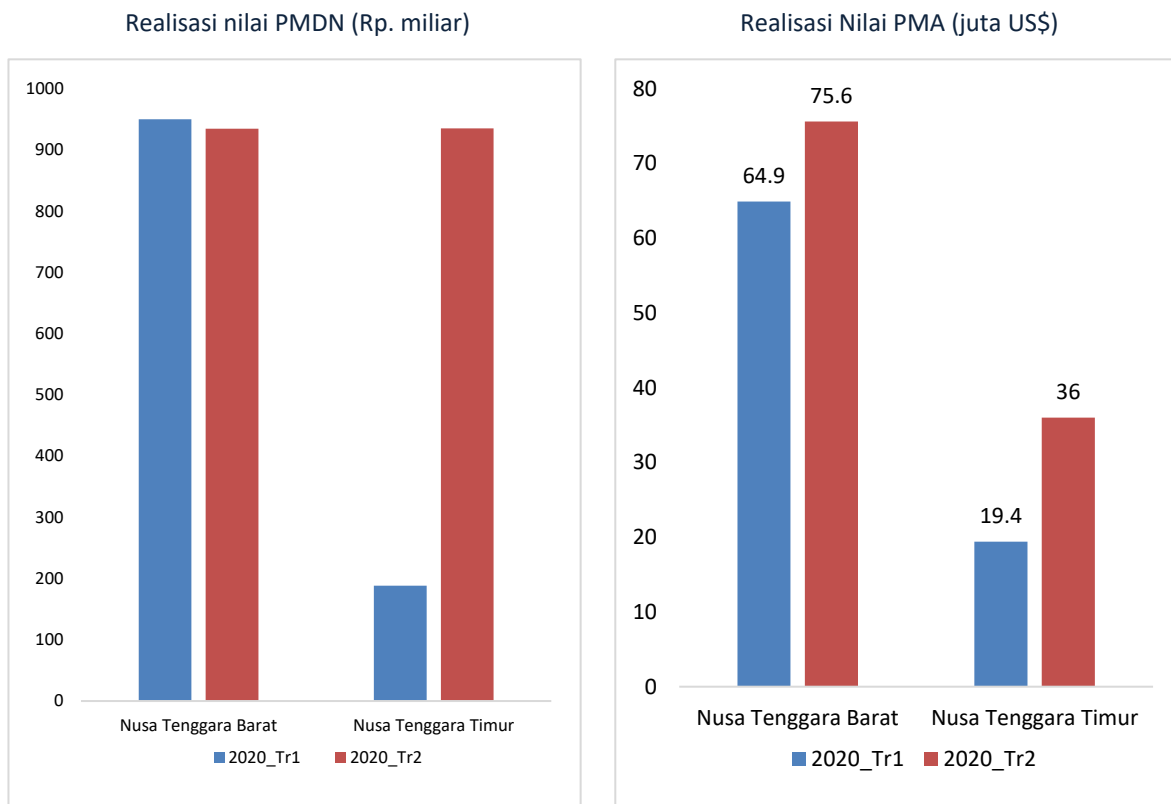
Lapangan Usaha	NTB				NTT			
	2019		2020		2019		2020	
	II	III	II	III	II	III	II	III
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.45	1.07	7.82	(1.66)	6.80	1.06	-0.45	0.05
Pertambangan dan Penggalian	(10.76)	10.09	47.78	40.32	5.59	2.72	-12.96	-13.91
Industri Pengolahan	7.83	1.68	4.01	(5.99)	9.53	10.54	-4.10	-7.17
Pengadaan Listrik dan Gas	4.07	14.23	9.03	13.67	2.48	-5.11	11.76	17.18
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.81	5.00	4.96	9.42	6.43	6.79	4.16	6.17
Konstruksi	6.73	24.42	(25.71)	(14.11)	2.94	0.75	-9.80	-9.99
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.38	8.05	(8.09)	(8.16)	8.33	8.79	-7.75	-10.05
Transportasi dan Pergudangan	1.78	1.51	(58.05)	(38.41)	7.05	1.76	-23.23	-16.05
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	(10.98)	19.51	(58.66)	(38.49)	8.21	5.67	-42.35	-35.84
Informasi dan Komunikasi	3.07	3.92	17.81	14.09	7.89	2.91	15.36	14.03
Jasa Keuangan dan Asuransi	(5.13)	(0.25)	10.83	16.74	-1.83	5.44	12.32	7.16
Real Estate	4.52	5.16	1.07	(0.02)	0.35	-3.45	-5.58	-0.83
Jasa Perusahaan	6.00	3.71	(9.04)	(3.79)	3.94	5.24	-52.51	-53.35
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.18	2.80	(1.45)	9.63	8.59	7.45	6.75	5.85
Jasa Pendidikan	7.97	8.08	0.02	(0.01)	6.02	7.49	-2.38	3.07
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.61	5.81	(9.69)	(6.69)	6.93	2.59	5.49	3.81
Jasa lainnya	6.67	3.71	(8.52)	(12.29)	7.42	5.84	-21.19	-21.63
TOTAL	2.12	6.46	(1.40)	(1.11)	6.36	3.87	-1.99	-1.68

Sumber: Publikasi BPS, Tahun 2020

Perkembangan realisasi investasi di masa pandemi Covid-19 di wilayah Nusa Tenggara, tercatat untuk nilai realisasi PMDN Triwulan II 2020 di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur cenderung tumbuh positif dan mengalami peningkatan dibandingkan nilai realisasi PMDN Triwulan I 2020, dengan peningkatan terbesar di Nusa Tenggara Timur lebih tinggi dibandingkan NTB. Hal yang sama untuk nilai realisasi PMA, terjadi peningkatan yang signifikan baik di NTB maupun NTT, dengan peningkatan NTT lebih tinggi dari realisasi PMA NTB (**Gambar 77**).



Gambar 82:
Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Triwulan I dan II menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara



Sumber: BKPM Tahun 2020